

**IDE KEADILAN BERBASIS PLURALITAS DAN KEBEBASAN:
MELACAK PRINSIP EPISTEMIK DAN TUNTUTAN ETIS
KEADILAN AMARTYA SEN**

**Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat
Magister Program Studi Ilmu Filsafat**

Diajukan Oleh

Sunaryo

01360808

Kepada



**PROGRAM PASCA SARJANA
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA**

Jakarta, Agustus 2011

ABSTRAK

- (A) Sunaryo (01360808)
- (B) Ide Keadilan Berbasis Pluralitas dan Kebebasan: Melacak Prinsip Epistemik dan Tuntutan Etis Keadilan Amartya Sen
- (C) vii+133 hlm; 2011
- (D) Kata-kata kunci: *pluralitas nalar, komparatif, institusionalisme transendental, hasil komprehensif, penalaran publik, ketidaksempurnaan, kapabilitas, kebebasan kepelakuan, niti,nyaya, daya efektif.*
- (E) Isi Abstrak: Ide keadilan selama ini, sebagaimana yang dipahami oleh John Rawls, Robert Nozick dan juga Ronald Dworkin, berfokus pada pendekatan institusi atau lembaga. Para pemikir ini mencoba mendesain sebuah institusi yang adil (*just institution*) yang dengan itu kemudian dapat menata masyarakat secara adil pula. Selain menggunakan kerangka institusi, ide keadilan yang diajukan selama ini juga cenderung mengasumsikan kesempurnaan dan keparipurnaan. Dengan asumsi ini, sebuah ide keadilan dianggap sudah final sehingga tidak perlu mendengar ide keadilan yang lain. Menurut Amartya Sen, pendekatan semacam ini disebut sebagai ide keadilan institusionalisme transendental (*transcendental institutionalism*). Melalui buku *The Idea of Justice*, ia menawarkan ide keadilan yang dapat mengoreksi pendekatan institusi dan mengasumsikan keparipurnaan. Ia juga menegaskan bahwa tujuan yang dapat dicapai dalam proyek keadilan sebenarnya bukan untuk menegakkan keadilan yang sempurna dan paripurna namun lebih pada upaya mengurangi ketidakadilan dan memajukan keadilan dalam masyarakat. Dalam mengoreksi perspektif institusi, ia menekankan peran kepelakuan (*agency*) dalam mengurangi ketidakadilan dan melakukan perluasan keadilan dalam masyarakat. Institusi tentu saja mengambil peran penting dalam menegakkan keadilan namun kepelakuan tetap bisa berkontribusi dalam mengurangi ketidakadilan. Dalam menanggapi asumsi keparipurnaan, ia sangat menekankan ide keadilan yang membuka ruang bagi pluralitas nalar dalam masyarakat yang majemuk. Melalui buku itu, ia mencoba membangun dasar kesetaraan bagi setiap pandangan untuk berpendapat secara terbuka, namun pada saat yang sama ia juga menuntut setiap pandangan untuk mendengar pandangan lain yang berbeda. Dalam upaya mengurangi ketidakadilan dan memajukan keadilan, Sen menyinggung signifikansi kebebasan. Ia memahami kebebasan dalam dua pengertian: kebebasan kesejahteraan (kapabilitas) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*). Untuk mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat ia menuntut kita melakukan perluasan kebebasan, karena semakin luas kebebasan yang dicapai maka semakin luas pula keadilan yang dapat dinikmati. Dalam melakukan perluasan kebebasan, kita tidak hanya mengandalkan peran institusi. Menurutnya, para pribadi (*agency*) juga dapat berkontribusi untuk memperluas kebebasan dan mengurangi ketidakbebasan dalam masyarakat.
- (F) Daftar Acuan: 52 (1958-2010)
- (G) Dr. B Herry-Priyono

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tesis Yang Diajukan	8
1.4. Metode Penulisan	9
1.5. Kerangka Isi Tesis	10
1.6. Tentang Amartya Sen	11
BAB 2: KEADILAN INSTITUSIONALISME TRANSENDENTAL DAN KRITIK ATASNYA	
2.1. Pendahuluan	15
2.2. Teori Keadilan Institusionalisme Transendental	16
2.3. Teori Keadilan John Rawls	17
2.3.1. Kritik terhadap utilitarisme	18
2.3.2. Keadilan Sebagai “ <i>Fairness</i> ”	19
2.3.3. Posisi Asali dan Selubung Ketidaktahuan	22
2.3.4. Dua Prinsip Keadilan	25
2.4. Kontribusi Rawls dalam Refleksi Tentang Keadilan	29
2.5. Kritik Sen atas Teori Keadilan Rawls	31
2.5.1. Kritik Internal	31
2.5.2. Kritik Eksternal	34
2.5.2.1. Hal-hal Dasar dan Kapabilitas	34
2.5.2.2. Relevansi Perilaku Aktual	36
2.5.2.3. Kontrak Sosial dan Perspektif Global	37
2.6. Keadilan Komparatif Amartya Sen	39
2.7. Rangkuman	40
BAB 3: MEMBANGUN DASAR BAGI PLURALITAS NALAR	
3.1. Pendahuluan	43
3.2. Tindakan Penalaran Publik	44

3.2.1.	Publikasi Nalar	47
3.2.2.	Objektivitas Inter-Posisional	49
3.2.3.	Imparsialitas Terbuka	51
3.2.4.	Hasil Komprehensif	53
3.3.	Pendekatan Komparatif dan Teori Pilihan Sosial	55
3.4.	Prinsip Pluralitas dalam Pendekatan Komparatif	59
3.4.1.	Pluralitas Informasi	60
3.4.2.	Pluralitas Posisi	62
3.4.3.	Pluralitas Rasionalitas	63
3.4.4.	Pluralitas Nalar Imparsial	66
3.5.	Ketidaksempurnaan Terbuka	69
3.6.	Rangkuman	70
BAB 4: PERLUASAN KEBEBASAN KESEJAHTERAAN DAN KEPELAKUAN		
4.1.	Pendahuluan	72
4.2.	Sentralitas Kehidupan dan Kebebasan	74
4.3.	Dua Pengertian Kebebasan	76
4.4.	Kebebasan sebagai Kapabilitas	79
4.4.1.	Kebebasan untuk Mencapai	81
4.4.2.	Kebebasan dari Deprivasi	84
4.4.3.	Kebebasan dan Kontrol Langsung	87
4.4.4.	Kapabilitas dan Pluralitas	90
4.5.	Kebebasan Kepelakuan	91
4.5.1.	Kepelakuan dan Kontrol	93
4.5.2.	Kebebasan versus Kesejahteraan	96
4.5.3.	Kepelakuan dan Tanggungjawab	98
4.6.	Rangkuman	100
BAB 5: PRINSIP EPISTEMIK DAN TUNTUTAN ETIS KEADILAN		
5.1.	Pendahuluan	102
5.2.	Penalaran Publik Sebagai Prinsip Epistemik	103
5.3.	Perluasan Kebebasan Sebagai Tuntutan Etis	107
5.4.	Masalah Kebebasan dan Tentang Yang Baik	110
5.4.1.	Batas-batas Kebebasan Partikularitas Nilai	111
5.4.2.	Tentang Yang Baik dan Objektivitas Nilai	116

5.5. Rangkuman	118
BAB 6: PENUTUP	
6.1. Rangkuman	121
6.1.1. Rangkuman Bab 1 Hingga Bab 5	121
6.1.2. Masalah Filsafat Yang Dipersoalkan	123
6.1.3. Tesis	125
6.2. Relevansi Tesis	126
6.3. Kelebihan dan Kelemahan Tesis	127
DAFTAR PUSTAKA	130

BAB 1

PENDAHULUAN

“Apa yang menggerakkan kita...bukanlah upaya pewujudan dunia yang adil secara paripurna...namun lebih pada upaya pengurangan ketidakadilan yang ada disekitar kita.”¹

“Masalah keadilan pada akhirnya berhubungan dengan cara bagaimana kehidupan manusia berlangsung, dan bukan semata persoalan institusi yang ada di sekitar mereka.”²

(Amartya Sen, *The Idea of Justice*)

1.1. Latar Belakang

Sejak publikasi buku *A Theory of Justice* karya Rawls pada tahun 1971, gagasan teori keadilan telah menjadi isu penting dalam perdebatan filsafat politik. Buku itu merupakan perluasan dari artikel *Justice as Fairness* yang ditulis sebelumnya oleh Rawls pada 1957. Salah satu gagasan yang menstimulasi lahirnya teori keadilan Rawls adalah paham utilitarisme dalam filsafat politik yang diinspirasi oleh Bentham dan Sidgwick.³ Salah satu prinsip kaum utilitaris yang mengatakan bahwa sebuah pertimbangan selalu didasari pada penjumlahan manfaat yang dinikmati oleh masyarakat sebanyak mungkin, menurut Rawls, memiliki potensi untuk merenggut kebebasan individu dengan mengorbankan sekelompok kecil masyarakat untuk kepentingan kelompok yang lebih besar. Dengan berpegang pada nilai keadilan yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan kebebasan yang dimiliki setiap individu, Rawls menegaskan bahwa seorang individu memiliki hak untuk tidak dijadikan korban atas nama kepentingan umum sekalipun. Karenanya, Rawls menolak dengan tegas

¹ “What moves us...is not the realization that the world falls short of being completely just...but that there are clearly remediable injustices around us which we want to eliminate.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. vii

² “Justice is ultimately connected with the way people’s lives go, and not merely with the nature of the institutions surrounding them.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. x

³ “...society is rightly ordered, and therefore just, when its major institutions are arranged so as to achieve the greatest net balance of satisfaction summed over all the individuals belonging to it.” Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, hlm. 20

semua tindakan yang dapat mengorbankan kebebasan individu atau kelompok yang lebih kecil sebagaimana dimungkinkan dalam utilitarisme.⁴

Gagasan Rawls yang oleh banyak ahli dikategorikan sebagai liberal egalitarian kemudian dikritik baik oleh kelompok komunitarian seperti Walzer dan Sandel, dan oleh kelompok libertarian seperti Nozick. Oleh kelompok komunitarian, Rawls yang dipengaruhi oleh Kant dianggap telah menyusupkan prinsip-prinsip masyarakat liberal dengan mengabaikan keragaman komunitas dan partikularitas budaya,⁵ sementara oleh kelompok libertarian teori keadilan Rawls dianggap masih kurang memberikan perhatian pada kebebasan individu.⁶ Dalam beberapa karya berikutnya (mis. *Political Liberalism*, 1993; *The Law of Peoples*, 1999; dan *Justice as Fairness: A Restatement*, 2001), Rawls berupaya untuk menjawab beberapa keberatan yang muncul dan memperbaiki argumen yang dianggap rapuh. Sudah cukup banyak buku dan artikel yang ditulis dalam rangka menanggapi teori keadilan Rawls dan asumsi-asumsi yang ada di dalamnya. Salah satu di antara yang terbaru adalah buku *The Idea of Justice* (2009) yang ditulis oleh seorang ilmuwan sosial, filsuf dan peraih nobel ekonomi 1998, Amartya K. Sen. Melalui buku ini, Sen menawarkan pendekatan keadilan yang berbeda namun sekaligus memperkaya teori keadilan sebelumnya.

Perbedaan mendasar antara Sen dan Rawls dapat kita lihat pada titik berangkat dalam melihat keadilan. Sen cenderung untuk menjawab pertanyaan bagaimana ketidakadilan dikurangi dibanding mengupayakan lahirnya satu institusi dengan aturan yang adil secara paripurna. Menurutnya, pendekatan terakhir disebut institusionalisme transendental (*transcendental institutionalism*), sementara yang pertama disebut pendekatan komparatif (*realization-focused comparison*). Paling tidak ada dua fokus yang membedakan dua pendekatan ini. *Pertama*, institusionalisme transendental memiliki konsentrasi pada upaya untuk melahirkan keadilan yang paripurna, sementara

⁴ Bdk. Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 3-4. "Therefore in a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled; the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interests."

⁵ Salah satu kritik Walzer terhadap teori keadilan Rawls adalah klaim universalitas teori keadilan yang mengklaim dapat diaplikasikan pada semua kebudayaan. Bagi Walzer, bagaimana mungkin kita dapat memahami keadilan bila kita abai pada keragaman perspektif budaya yang nyatanya tidak tunggal. Lih. Farelly, *Contemporary Political Theory*, 2004, hal. 98.

⁶ Dalam *Anarchy, State and Utopia*, Nozick mempertahankan apa yang ia sebut sebagai *minimal state*. Menurutnya, tugas negara hanya dibatasi untuk melindungi rakyat dari tindak pemaksaan, pencurian, perampokan dan menjaga keberlangsungan kontrak dan peran sejenis lainnya. Fungsi negara dalam mengurangi kesenjangan ekonomi rakyatnya – sebagaimana yang diusulkan oleh kaum egalitarian – dapat dipandang sebagai tindakan tidak adil dari negara karena akan melakukan kekerasan terhadap hak-hak (kebebasan) rakyatnya. Lih. Farelly, *Contemporary Political Theory*, hal. 33.

pendekatan komparatif memiliki perhatian besar pada upaya mengurangi ketidakadilan yang ada dalam realitas konkret secara terus menerus dan pada peran keragaman perspektif mengenai keadilan sebagai kontributor penting dalam mengurangi ketidakadilan. *Kedua*, institusionalisme transendental lebih mengupayakan lahirnya sebuah institusi dan aturan yang ada di dalamnya. Sementara pendekatan komparatif lebih berfokus pada kehidupan aktual masyarakat yang tidak hanya bergantung pada sesuatu yang bersifat institusional, tetapi juga perlu memerhatikan tindakan masyarakat dan pilihan-pilihan sosial yang akan memengaruhi kehidupan mereka (Sen, 2009:5-6).

	Rawls	Sen
Model Pendekatan	Institusionalisme Transendental: Melahirkan satu institusi dengan aturan yang adil	Pendekatan Komparatif: Mengurangi ketidakadilan melalui keragaman perspektif tentang keadilan
Fokus	Mengupayakan terbentuknya keadilan paripurna	Mengurangi ketidakadilan dan memajukan keadilan sebagai proses yang dilakukan secara terus menerus
	Melahirkan satu institusi dengan aturan yang adil	Memerhatikan kehidupan aktual masyarakat sebagaimana yang ada dalam tindakan konkret dan interaksi sosialnya
Asumsi	Nalar Tunggal (<i>One Reason</i>) = Konklusi Tunggal (<i>One Conclusion</i>)	Nalar Plural (<i>Many reasons</i>) = Konklusi Plural (<i>Many Conclusions</i>)
Inspirasi Pemikiran	Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant	Adam Smith, the Marquis de Condorcet, Jeremy Bentham, Mary Wollstonecraft, Karl Marx, John Stuart Mill,

Perbedaan titik berangkat ini memiliki implikasi yang berbeda, khususnya pada asumsi, tujuan dan fokus dalam memahami keadilan. Bagi Sen sendiri, asumsi transendentalisme dan insitusionalisme memiliki persoalan besar. Pada asumsi transendentalisme, menurutnya tidak mungkin bagi kita untuk membuat sebuah kesepakatan yang betul-betul dapat kita sepakati bersama (persoalan kemungkinan untuk terwujud [*feasibility*]) dan bila kita dapat menyepakati tentang sesuatu, bukan tidak mungkin di kemudian hari kesepakatan tersebut tidak lagi disepakati sehingga kita perlu mengupayakan satu kesepakatan baru (persoalan pengulangan [*redundancy*]). Sementara dalam asumsi institusionalisme, yang menjadi persoalan mengapa dalam memahami konsep keadilan kita hanya mengandalkan peran institusi dan aturan-aturan yang ada di dalamnya? Tidakkah – selain institusi dan aturan yang ada di dalamnya –

kita juga perlu memerhatikan tindakan-tindakan aktual dan pilihan-pilihan sosial masyarakat yang memengaruhi kehidupan mereka (Sen, 2009:8-10).

Paling tidak ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam memahami pendekatan keadilan komparatif Amartya Sen. *Pertama*, pendekatan keadilan komparatif lebih memerhatikan upaya untuk mengurangi ketidakadilan dan memajukan keadilan. Dalam upaya ini, pendekatan komparatif melihat keragaman perspektif tentang keadilan dalam masyarakat yang tidak tunggal sebagai sebuah keniscayaan dan bahkan dapat berkontribusi besar dalam mengurangi ketidakadilan dalam dunia riil. Menurut Sen, pendekatan ini secara analitis berbeda dengan pendekatan pada umumnya yang mengupayakan lahirnya sebuah institusi yang adil secara paripurna (Sen, 2009:ix). Perbedaan ini dapat kita lihat dalam pembedaan Sen antara *niti* dan *nyaya* yang sama-sama memiliki makna keadilan.⁷ Hanya saja dalam pengertian yang pertama, kebenaran sebuah tindakan banyak berhubungan dengan kecocokan organisasional, sementara dalam pengertian yang kedua lebih memerhatikan implikasi, proses dan lebih spesifik lagi adalah perhatian pada bagaimana kehidupan manusia berlangsung.⁸ Dalam hal ini, perspektif keadilan yang ingin ditawarkan oleh Sen adalah keadilan dalam arti yang berhubungan dengan kehidupan manusia secara luas (*nyaya*), bukan yang terbatas pada institusi (*niti*).

Kedua, upaya mengurangi ketidakadilan yang berangkat dari keragaman perspektif mengenai keadilan memang bisa saja melahirkan konklusi yang tidak sama antar-perspektif tersebut. Dalam hal ini, menurut Sen, yang dibutuhkan adalah penalaran atau pemberian alasan (*reasoning*) atas upaya mengurangi ketidakadilan yang dilakukan oleh satu perspektif tertentu. Dengan demikian, keragaman atau pluralitas yang dihasilkan adalah keragaman yang sudah melewati proses dialog antar-perspektif dan menguji alasan yang diajukan (Sen, 2009:ix-x). Proses penalaran ini merupakan upaya agar sebuah perspektif tidak berjalan sendiri tanpa memerhatikan perspektif yang lain. Dan yang *ketiga*, pendekatan komparatif berfokus pada kehidupan masyarakat secara luas dibanding pada pembentukan institusi yang memiliki implikasi yang sangat

⁷ Dalam kamus Sanskrit yang disusun oleh MacDonell, *niti* diartikan sebagai tuntunan atau panduan moral yang bersifat praktis, sementara *nyaya* memiliki tekanan pada kebiasaan yang cocok dan pantas. Lih. Arthur Anthony MacDonell, 1954, 1958, *A Practical Sanskrit Dictionary*, Oxford University Press, hlm. 146 dan 148.

⁸ “*The former idea, that of niti, relates to organizational propriety as well as behavioural correctness, whereas the latter, nyaya, is concerned with what emerges and how, and in particular the lives that people are actually able to lead.*” Sen, *The Idea of Justice*, hal. xv

terbatas. Menurut Sen, ide keadilan pada akhirnya berkaitan dengan soal cara bagaimana kehidupan masyarakat berjalan, bukan semata-mata soal institusi.⁹ Dengan demikian, pendekatan komparatif akan bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat secara aktual dan memerhatikan penilaian mereka mengenai keadilan (Sen, 2009:x-xi).

1.2. Perumusan Masalah

Hal yang melatari pencarian tentang yang adil pada umumnya berangkat dari rasa ketidakadilan yang dialami sebagian komunitas dalam masyarakat. Dari titik berangkat ini, para filsuf kemudian berupaya menyusun syarat kemungkinan dari sesuatu yang disebut sebagai adil. Seorang filsuf politik seperti Rawls dengan tesis “*justice as fairness*” telah mengabdikan hampir seluruh karir akademiknya untuk menyusun syarat-syarat kemungkinan sebuah institusi masyarakat yang adil. Dengan bersandar pada warisan pencerahan dari jalur etika Kantian dan teori kontrak sosial Locke maka tersusunlah sebuah syarat kemungkinan yang menjadi dasar teori keadilan. Prinsip kesetaraan, kebebasan, kemasukakalan (*reasonableness*), rasional, imparsialitas, selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) dalam posisi asali (*the original position*) adalah beberapa kerangka dasar yang penting dalam teori keadilan Rawls. Pendekatan keadilan Rawls (termasuk Dworkin dan Nozick) dikategorikan oleh Sen sebagai teori keadilan institusionalisme transendental.

Berbeda dengan Rawls dan juga para pemikir lain yang berupaya melahirkan syarat kemungkinan keadilan melalui penataan sebuah institusi sosial secara paripurna, Sen mencoba mendekati masalah ketidakadilan dalam perspektif yang lebih luas, tidak semata-mata masalah penataan institusi. Pilihan sosial dan tindakan aktual yang diambil, dalam pandangan Sen, turut menentukan upaya masyarakat dalam mengurangi ketidakadilan. Hal yang perlu digarisbawahi dari ide keadilan Sen adalah bahwa keadilan paripurna bukanlah sesuatu yang dapat diwujudkan di dunia yang sejak awal identik dengan ketidakadilan. Karenanya fokus dalam ide keadilannya – yang ia sebut sebagai ide keadilan dalam perspektif *nyaya* – lebih pada upaya untuk mengurangi ketidakadilan bukan melahirkan keadilan yang paripurna. Selain itu, dalam memahami ide keadilan ia tetap berangkat dari keragaman itu sendiri. Baginya setiap kebudayaan memiliki perpektif tentang keadilan yang sangat beragam dan harus ditempatkan dalam

⁹ “*Justice is ultimately connected with the way people’s lives go, and not merely with the nature of the institutions surrounding them.*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. x

posisi yang setara. Karena prinsip kesetaraan ini, Sen berupaya membangun dasar bagi pluralitas perspektif untuk memberikan kontribusi dalam mengurangi ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Meski setiap komunitas memiliki perspektif mengenai keadilan, setiap perspektif juga harus terbuka untuk dikontestasikan dalam sebuah ajang penalaran publik (*public reasoning*) bersama dengan perspektif lain yang berbeda. Dengan demikian, sebuah perspektif tertentu mengenai keadilan bukanlah sebuah *monad* tanpa jendela dan tanpa kemungkinan untuk berdialog. Sebuah konsep perlu mendengar dan bahkan mungkin perlu mempertimbangkan konsep lain dalam memahami konsep keadilannya.

Dari proposal yang diajukan Sen, penulis melihat dua proses penting yang harus dilalui dalam pendekatan keadilannya: pertama, menjaga pluralitas pandangan mengenai keadilan; dan kedua, menekankan pentingnya peran proses penalaran publik (*public reasoning*) antar-pandangan tersebut. Selain penekanan pada dua proses tersebut, Sen juga memberikan perhatian pada isi keadilan yang hendak dilindungi. Penulis melihat sentralitas kehidupan dan kebebasan dalam ide keadilan Sen yang kemudian penulis pahami sebagai isi dari keadilan dalam perspektif *nyaya*. Berdasarkan pemahaman ini maka penulis merumuskan tiga pertanyaan yang penulis anggap mendasar dan dapat mengantarkan penulis pada sebuah rumusan tesis mengenai ide keadilan Amartya Sen:

1. Mengapa teori keadilan institusionalisme transendental – khususnya sebagaimana yang diwakili oleh Rawls – dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab masalah ketidakadilan?
2. Dalam pendekatan komparatif yang memberi ruang bagi keragaman perspektif mengenai keadilan, bagaimana ide-ide yang saling bertentangan yang sama-sama mengklaim dan mengatasnamakan keadilan dapat dimungkinkan dalam ruang bersama?
3. Sen mengkritik pendekatan keadilan yang hanya menjadikan institusi sebagai tema utama (*niti*). Baginya, ide keadilan berkaitan dengan hidup manusia secara luas (*nyaya*). Jika ide keadilan Sen memiliki perhatian pada kehidupan manusia secara luas, lantas hal apa yang menjadi sangat mendasar bagi kehidupan manusia dalam upaya mengurangi ketidakadilan?

Berangkat dari tiga pertanyaan yang penulis anggap dapat mengantarkan pada sebuah rumusan tesis, penulis kemudian melakukan penelusuran untuk mencari jawaban yang diberikan oleh Sen sendiri. Atas pertanyaan yang pertama penulis berpendapat bahwa dalam pandangan Sen ketidakmemadaiannya pendekatan institusionalisme transendental adalah karena pendekatan ini terlalu bergantung pada lokus institusi dan adanya kecenderungan untuk melihat gagasan keadilan yang mereka lahirkan sebagai ide yang sempurna dan final. Untuk mengatasi itu, Sen menawarkan model teori keadilan yang menekankan pentingnya peran institusi dan juga kepelakuan (*agency*). Dalam pandangannya, baik institusi maupun pelaku tindakan dapat berkontribusi bagi upaya mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat. Selain itu, Sen juga memahami setiap gagasan keadilan yang dilahirkan selalu dalam status yang tidak pernah final sehingga karenanya memerlukan perspektif lain yang dapat mengoreksi kekurangan yang ada dalam ide atau perspektif keadilan tertentu.

Melalui pertanyaan yang kedua, penulis melihat bahwa bagi Sen, keragaman perspektif dan pemahaman mengenai keadilan dalam masyarakat adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Satu perspektif bisa saja berseberangan dan bertolak belakang dengan perspektif yang lain. Hal ini sangat disadari oleh Sen sebagaimana dapat dilihat dari ilustrasinya tentang tiga orang anak yang memperebutkan sebuah suling (tiga orang anak tersebut adalah Anne, Bob dan Carla). Masing-masing dari mereka mengklaim bahwa mereka memiliki suling tersebut dengan alasan dan asumsi mereka sendiri.¹⁰ Bagi Sen, hal yang dapat menjembatani perbedaan perspektif ini adalah kemampuan setiap perspektif untuk berdialog dan mendengar pandangan yang berbeda melalui praktik penalaran publik (*public reasoning*). Melalui proses penalaran publik – sebagaimana yang dipahami Sen – pendekatan keadilannya memerhatikan dua hal sekaligus: perhatian terhadap ruang kesetaraan bagi pluralitas nalar dan perhatian terhadap tuntutan untuk mau mendengar dan mempertimbangkan nalar yang berbeda. Melalui dua hal ini, Sen tidak hanya memberikan hak yang setara kepada setiap nalar untuk mempublikasikan gagasannya (gerak keluar) tetapi juga menuntut setiap nalar untuk mendengar dan mempertimbangkan nalar-nalar yang lain (gerak kedalam). Penulis akan mengeksplorasi jawaban atas pertanyaan yang kedua ini di dalam bab 3.

¹⁰ Bob mengklaim berhak atas suling itu karena ia adalah yang paling miskin di antara yang lain (prinsip egalitarian), Carla merasa berhak karena dia yang membuat suling tersebut (prinsip libertarian), sementara Anne merasa berhak karena ia adalah satu-satunya yang dapat memainkan alat musik itu dengan baik (didukung argumen hedonis utilitarian). Lih. Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 12-13.

Sementara dari pertanyaan yang ketiga penulis memiliki hipotesis bahwa kebebasan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan sangat diproteksi dalam ide keadilan Sen. Ia memahami konsep kebebasan bukan hanya sebagai tindakan memilih yang tidak dipaksa oleh sesuatu yang bersifat eksternal (kebebasan dalam arti proses), tetapi juga sebagai kesempatan untuk mencapai apa yang dianggap bernilai (kebebasan dalam arti kesempatan). Sen mengeksplorasi pengertian kebebasan yang pertama melalui ide kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) dan pengertian yang kedua melalui konsep kapabilitas (kebebasan kesejahteraan/*well-being freedom*). Melalui pemahaman ini, Sen melihat signifikansi kebebasan bukan hanya sebagai kebebasan manusia dari sistem otoritarianisme tetapi juga kebebasan dari kemiskinan, kelaparan dan penyakit. Dalam pandangan Sen, baik kebebasan kepelakuan maupun kebebasan kesejahteraan selalu dituntut untuk diperluas, bukan malah dipersempit. Perluasan kebebasan memiliki korelasi dengan pengurangan ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat. Dan tuntutan untuk melakukan perluasan kebebasan tidak hanya diharapkan pada lokus institusi tetapi juga dapat dilakukan oleh setiap orang yang memiliki daya efektif (*effective power*) untuk melakukan sebuah perubahan. Uraian mengenai hal ini akan penulis eksplorasi lebih jauh dalam bab 4.

1.3.Tesis Yang Diajukan

Berdasarkan tiga pertanyaan yang diajukan dan temuan yang diperoleh, penulis mencoba merumuskan ide keadilan Sen sebagai berikut:

“Dari kritik Sen atas pendekatan institusionalisme transendental, ada dua hal yang sangat mendasar dalam ide keadilan Sen. Yang pertama tentang prinsip epistemik, dan yang kedua tentang tuntutan etis keadilan Sen. Tentang yang pertama, untuk meraih keadilan, Sen sangat menekankan model perspektif terbuka – sebagaimana yang ada dalam penalaran publik – yang tidak melihat persoalan hanya dari sudut tertentu saja. Melalui penalaran publik, di satu sisi seseorang akan memperoleh pemahaman yang lebih kaya, di sisi yang lain model ini juga menjadi realisasi kebebasan setiap perspektif untuk menyuarakan kepentingannya. Sementara tentang yang kedua, ide keadilan Sen yang menjadikan kehidupan (manusia) secara luas sebagai tema sentral (*nyaya*) melihat kebebasan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan, ia menuntut agar tindakan yang diambil selalu didasarkan pada upaya memperluas kebebasan kepelakuan dan kesejahteraan. Atas dasar pemahaman ini maka tuntutan etis keadilan Sen dipandu oleh sebuah imperatif yang berbunyi ‘bertindaklah dengan nalar terbuka, yang sedemikian rupa sehingga dapat memperluas kebebasan kepelakuan dan kebebasan kesejahteraan!’.”

Ide keadilan Sen yang memberikan tempat bagi pluralitas nalar sebagai sesuatu yang sangat penting memiliki implikasi besar bagi pengertian mengenai yang adil dan tidak adil. Pengertian mengenai adil dan tidak adil pertama-tama bukan hanya soal isi dari capaian keputusan, tetapi juga proses bagaimana keputusan itu dicapai. Sebuah keputusan bukanlah sesuatu yang diturunkan dari prinsip yang lahir dari satu aktor tertentu, tetapi lebih pada proses penalaran bersama di antara kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan persoalan yang tengah dihadapi. Prinsip epistemik keadilan Amartya Sen dalam hal ini lebih dimaknai sebagai proses penalaran bersama yang terbuka terhadap pandangan-pandangan yang beragam.¹¹ Dengan demikian, ide keadilan Sen bukanlah sebuah hasil refleksi personal seorang filsuf yang dapat diaplikasikan di semua tempat dan semua zaman.

Gagasan lain yang juga sangat penting dalam ide keadilan Sen adalah kebebasan. Sen memahami kebebasan tidak hanya sebagai tidak adanya paksaan dari luar (kebebasan dalam arti proses), tetapi juga sebagai kesempatan (*opportunity*). Dua pengertian kebebasan ini akan diuraikan dalam konsep kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) dan konsep kapabilitas. Bagi Sen, dua pengertian kebebasan ini dituntut untuk selalu diperluas (bukan malah dipersempit) baik oleh institusi maupun oleh para pribadi. Tuntutan untuk memperluas kebebasan dalam dua pengertian ini juga menjadi semacam tuntutan etis yang berlaku bagi setiap orang dan juga institusi dalam kaitannya dengan upaya memperluas keadilan. Baginya, perluasan kebebasan memiliki korelasi dengan upaya perluasan keadilan. Dengan demikian, ide mengenai pluralitas dan kebebasan adalah dua hal yang sangat penting dalam ide keadilan Sen dan menjadi landasan bagi prinsip epistemik dan tuntutan etis yang akan diuraikan dalam tesis ini.

1.4. Metode Penulisan

Metode penulisan tesis ini adalah penelitian pustaka yang menggunakan karya Sen yang berjudul *The Idea of Justice* (The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 2009) sebagai sumber utama. Selain buku *The Idea of Justice*, penulis juga menggunakan dan menelaah buku Sen yang lain seperti *Inequality Reexamined* (1992), *Development as Freedom* (1999) dan *Rationality and Freedom*

¹¹ Dalam teori mengenai perolehan pengetahuan, istilah epistemik biasanya merujuk pada cara bagaimana pengetahuan diperoleh. Terkait dengan pengertian ini, maka pengertian prinsip epistemik keadilan dimaknai sebagai proses bagaimana ide mengenai keadilan dicapai. Dalam pandangan Sen, ide keadilan dicapai atau diperoleh bukan melalui refleksi personal seorang diri, melainkan hasil dari proses penalaran bersama dengan nalar yang beragam.

(2002) sebagai sumber pendukung utama. Artikel-artikel Sen yang tersebar di beberapa jurnal ilmiah turut membantu penulis dalam memahami isu yang diulas dalam hubungannya dengan ide besar mengenai keadilan. Dalam kaitannya dengan tema keadilan yang oleh Sen dikategorikan sebagai pendekatan keadilan institusionalisme transendental penulis banyak menggunakan buku *A Theory of Justice* dan *Justice as Fairness: A Restatement* karya Rawls sebagai sumber utama. Beberapa karya komentator juga menjadi bagian dari literatur pendukung yang sudah penulis masukan.

1.5.Kerangka Isi Tesis

Penulis menyusun tesis ini dalam enam bab. Pada bab pertama penulis memberikan latar belakang kritik Sen yang banyak dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls. Hal terpenting yang penulis sampaikan dalam bab ini adalah soal rumusan permasalahan yang penulis ajukan. Ada tiga pertanyaan yang penulis anggap mendasar dan diharapkan dapat mengantarkan penulis pada sebuah tesis mengenai ide dasar keadilan Amartya Sen. Selain itu, pada bab ini penulis juga menjelaskan metode penelitian penulisan tesis. Dalam hal ini penulis akan menggunakan penelitian pustaka dan menjadikan buku *The Idea of Justice* sebagai bahan utama. Terakhir, karena tesis ini terkait dengan tokoh tertentu maka penulis perlu memberikan ulasan singkat tentang siapa Amartya Sen.

Pada bab kedua penulis akan menguraikan teori keadilan yang disebut sebagai institusionalisme transendental dan kritik Sen atasnya. Dalam memberikan uraian tentang teori keadilan institusionalisme transendental penulis mengambil teori keadilan Rawls sebagai representasi. Sementara dalam menguraikan kritik Sen terhadap teori keadilan Rawls, penulis akan mengklasifikasi menjadi kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal lebih dimaksudkan sebagai kritik yang berangkat dari logika teori Rawls sendiri, sementara kritik eksternal berangkat dari logika yang dibawa oleh Sen sebagai pengkritik.

Pada bab ketiga penulis akan masuk pada uraian mengenai praktik penalaran publik. Gagasan dasar dari bab ketiga sebenarnya berangkat dari pertanyaan kedua yang penulis ajukan dalam perumusan masalah. Pada bab ini penulis menguraikan bagaimana kemajemukan nalar diatasi dan dimungkinkan dalam ruang bersama. Salah satu teori penting yang penulis angkat dalam bab ini adalah teori pilihan sosial. Dalam pandangan Sen, teori ini memberikan dua gagasan dasar yang menjadi asumsi penting dalam pendekatan komparatif: yakni asumsi pluralitas dan asumsi ketidaksempurnaan.

Pada bab keempat penulis menguraikan dua pengertian kebebasan dalam pandangan Sen. Dua pengertian itu adalah kebebasan dalam arti proses dan kebebasan dalam arti kesempatan. Kebebasan dalam pengertian yang pertama dijelaskan dalam teori kebebasan kepelakuan sementara pengertian yang kedua dijelaskan dalam teori kapabilitas. Ide tentang kebebasan, dalam pandangan penulis, merupakan ide yang sangat mendasar dalam pendekatan keadilan Sen yang memiliki motivasi pada upaya mengurangi ketidakadilan, bukan melahirkan sebuah keadilan yang sempurna dan paripurna.

Pada bab kelima penulis mencoba mengulas materi dua bab sebelumnya, bab ketiga dan bab keempat, dalam kaitannya dengan rumusan pertanyaan yang penulis ajukan serta upaya untuk merumuskan sebuah tesis. Apa yang penulis peroleh dari ulasan ini adalah dua hal yang menurut penulis cukup mendasar dalam ide keadilan Amartya Sen: yang pertama tentang prinsip epistemik dan yang kedua tentang tuntutan etis keadilan Amartya Sen. Selain dua hal ini, penulis juga mencoba memberikan catatan terhadap gagasan kebebasan Sen dalam hubungannya dengan partikularitas nilai dan objektivitas nilai.

Dan yang terakhir, pada bab enam penulis memberikan penutup tesis dan akan mencoba merangkum isi dari setiap bab sebelumnya serta masalah filosofis yang penulis persoalkan dalam tesis ini. Selain hal ini, pada bab terakhir ini penulis akan memberikan ulasan singkat mengenai relevansi yang dapat diangkat dari tesis ini serta kelebihan dan kekurangannya.

1.6. Tentang Amartya Sen¹²

Amartya Kumar Sen lahir pada 3 Nopember 1933 di Santiniketan, Bengal barat dari keluarga yang sudah terikat dengan tradisi intelektual dan dunia pendidikan yang cukup mengakar. Ayahnya, Ashutosh Sen, mengajar kimia di Universitas Dhaka, sementara kakek dari garis ibunya, Kshiti Mohan Sen adalah pengajar sastra Sanskrit di Visva-Bharati – sekolah yang didirikan oleh peraih nobel Rabindranath Tagore. Di masa awal pendidikannya, Sen bersekolah di Visva-Bharati dan setelah selesai ia kemudian melanjutkan ke Presidency College di Kalkutta. Setelah menuntaskan jenjang pendidikan di anak benua India ini ia kemudian meneruskan pendidikan ke Trinity College Universitas Cambridge, Inggris. Di masa-masa awal pendidikannya, Sen

¹² Uraian tentang Amartya Sen, penulis banyak ambil dari MLA style: "Amartya Sen - Autobiography". Nobelprize.org. 29 Apr 2011 http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998/sen-autobio.html, dan dari rekaman wawancara tentang sejarah pembentukan pemikiran Sen dalam http://wn.com/Conversations_with_History_Amartya_Sen

memiliki ketertarikan pada sastra (Sanskrit), Matematika dan Fisika. Di jenjang selanjutnya Sen memantapkan diri untuk bergelut dengan bidang ekonomi. Namun dengan wawasan pengetahuan yang cukup luas, Sen selalu berupaya menempatkan perannya sebagai seorang ilmuwan bukan hanya dalam tampilan seorang intelektual di balik meja. Ia selalu menuntut dirinya untuk memberikan kontribusi pada kehidupan yang lebih luas.

Ia mengajar di beberapa tempat melintasi kota, negara dan bahkan benua. Setelah lulus dari Cambridge ia mengabdikan diri di dua tempat yang sudah membentuk karakter intelektualnya, di Santiniketan dan Cambridge. Dalam perkembangan selanjutnya ia juga mengajar di Delhi University, di The London School of Economics, Oxford University, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), Stanford University, Berkeley University dan Cornell University. Pada saat mengajar di Universitas Cambridge ia memiliki beberapa mahasiswa yang kemudian memiliki nama besar, khususnya di bidang ekonomi. Beberapa di antaranya adalah Samuel Brittan, Mahbub ul Haq, Rehman Sobhan, Michael Nicholson, Lal Jayawardena, Luigi Pasinetti, Pierangelo Garegnani dan Charles Feinstein. Perjalanan hidup Sen tidak pernah beranjak dari dunia akademik. Dalam ujarannya, ia tidak memiliki keseriusan pada pekerjaan di luar dunia akademik. Saat ini ia lebih banyak menghabiskan kerja akademiknya di Universitas Harvard, Amerika Serikat.

Sen melanjutkan pendidikan ke Cambridge pada tahun 1953. Meski ia sudah mendapatkan gelar B.A. (*Bachelor of Arts*) dalam bidang ekonomi dan matematika di Kalkutta, di Cambridge ia kembali mengambil B.A dalam bidang yang sama, khususnya dalam bidang ekonomi murni. Dalam pandangannya, studi ekonomi di Cambridge kurang matematis bila dibandingkan dengan studi ekonomi di Kalkutta. Studi ekonomi di Cambridge lebih banyak berurusan dengan isu-isu mendasar dalam bidang ekonomi yang kemudian banyak memprovokasinya untuk menelisik isu-isu itu lebih mendalam. Sen menyelesaikan studi di Cambridge dalam waktu yang relatif cepat, yakni dua tahun. Salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi Sen pada saat di Cambridge adalah adanya perdebatan besar antara mereka yang disebut sebagai pengikut John Maynard Keynes di satu sisi dan mereka yang skeptis dengan gagasan Keynes yang kemudian disebut sebagai neo-klasik.

Perjumpaan Sen dengan studi filsafat dimulai ketika ia mendapatkan sebuah hadiah fellowship di Trinity College di Cambridge. Hadiah fellowship itu memberikan

kesempatan – baca: kebebasan – kepada Sen untuk mengambil studi apa saja yang ia kehendaki selama empat tahun. Kesempatan itu ia ambil dengan memilih bidang yang menurutnya termasuk sebuah keputusan radikal, yakni studi filsafat. Pilihan tersebut tentu bukan tanpa dasar karena Sen sudah memiliki ketertarikan dengan persoalan logika dan epistemologi. Dalam perkembangan selanjutnya, minatnya terhadap filsafat semakin berkembang ke masalah etika dan filsafat politik. Dalam pandangannya, isu ini memiliki keterkaitan dengan masalah yang sudah ia minati sebelumnya yakni soal demokrasi dan kesetaraan. Perluasan studi hingga ke filsafat, menurutnya, menjadi sangat penting bukan hanya karena filsafat memiliki persinggungan dengan ekonomi – misalnya adanya persinggungan antara teori pilihan sosial dengan logika matematika, filsafat moral dan soal ketidaksetaraan serta deprivasi, tetapi juga karena belajar filsafat menjadi sesuatu yang bernilai pada dirinya. Petualangan filsafat yang banyak memerhatikan masalah moral dan filsafat politik telah mempertemukan Sen dengan pemikir-filsuf besar seperti John Rawls, Isaiah Berlin, Bernard Williams, Ronald Dworkin, Derek Parfit, Thomas Scanlon, Robert Nozick dan lain-lain.

Sebagai seorang intelektual, Sen termasuk intelektual yang cukup subur. Karyanya tersebar dalam bentuk buku dan tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, baik jurnal ekonomi, sosial, politik dan juga filsafat. Buku-buku yang terkait dengan ekonomi dan teori ekonomi misalnya *Choice of Techniques* (Oxford: Basil Blackwell, 1960a, 1962, 1968); *Growth Economics* (Harmondsworth: Penguin Books, 1960b); *Collective Choice and Social Welfare* (San Francisco: Holden Day, 1970); *Guidelines for Project Evaluation* (UNIDO, United Nations, New York, 1972); *On Economic Inequality*, (Oxford: Clarendon Press, 1973); *Employment, Technology, and Development* (Oxford: Clarendon Press, 1975); *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (Oxford: Clarendon Press, 1981); *Choice, Welfare and Measurement* (Oxford: Basil Blackwell, 1982); *Resources, Values and Development* (Oxford: Basil Blackwell; 1984); *Commodities and Capabilities*, (Amsterdam: North-Holland, 1985).

Sementara buku-buku besar yang terkait dengan isu moral dan filsafat politik di antaranya adalah *Utilitarianism and Beyond* (Cambridge University Press, 1982); *On Ethics and Economics* (Oxford and New York: Basil Blackwell, 1987); *Hunger and Public Action* (Oxford: Clarendon Press, 1989); *The Political Economy of Hunger*, (dalam 3 volume diedit bersama Jean Dreze) (Oxford: Clarendon Press, 1990 dan

1991); *Inequality Reexamined* (Oxford: Clarendon Press, New York: Russell Sage Foundation, and Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992); *The Quality of Life* (diedit bersama Martha Nussbaum) (Oxford: Clarendon Press, 1993); *Development as Freedom* (Oxford University Press, 1999); *Rationality and Freedom* (the Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 2002) dan terakhir *The Idea of Justice* (the Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 2009). Sedangkan artikel yang ditulis di jurnal-jurnal ilmiah banyak membahas soal teori pilihan sosial (*social choice theory*), ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*), rasionalitas dan perilaku ekonomi, metodologi ekonomi, masalah kelaparan, ketidaksetaraan gender, pembangunan ekonomi dan juga soal filsafat politik dan etika.

BAB 2

KEADILAN INSTITUSIONALISME TRANSCENDENTAL DAN KRITIK ATASNYA

2.1. Pendahuluan

Pada bab 2 ini penulis akan menjelaskan titik berangkat ide keadilan Amartya Sen sebagaimana yang diuraikan dalam buku *The Idea of Justice*. Ide besar Sen dalam buku tersebut dapat dilihat sebagai respon terhadap teori-teori keadilan yang ia sebut sebagai teori keadilan institusionalisme transendental yang di antaranya diwakili oleh Rawls, Dworkin dan Nozick. Pengertian institusionalisme dimaksudkan sebagai kerangka teori yang mengandalkan peran institusi atau struktur dalam upaya mengatur masalah sosial. Sementara pengertian transendental merujuk pada dua pengertian yang saling berhubungan: yang pertama bahwa aturan-aturan yang sudah disepakati terlepas dari para individu yang sudah menyepakati; dan yang kedua, di dalam pengertian itu terdapat asumsi bahwa aturan-aturan yang sudah disepakati bersifat sempurna dan paripurna. Menurut Sen, teori-teori keadilan yang dibangun oleh Rawls, Dworkin dan juga Nozick termasuk dalam kategori keadilan institusionalisme transendental.

Karenanya, sebelum masuk pada uraian mengenai pendekatan keadilan komparatif Sen, penulis akan menjelaskan salah satu teori keadilan institusionalisme transendental lebih dahulu, dalam hal ini teori keadilan John Rawls. Sen sendiri dalam *The Idea of Justice* secara khusus memberikan tanggapan atas gagasan keadilan Rawls, meski di beberapa tempat lain ia juga menyinggung konsep keadilan Dworkin dan Nozick. Dalam uraian mengenai teori keadilan Rawls kita akan melihat sebagian konsep dasar yang menjadi fondasi dalam teori keadilannya. Setelah uraian mengenai teori keadilan Rawls, selanjutnya kita melihat bagaimana teori keadilan ini ditanggapi langsung oleh Sen. Dalam tanggapannya ini, Sen menunjukkan beberapa kontribusi penting dari teori keadilan sebagai *fairness*. Pada saat yang sama ia juga mengkritik teori keadilan Rawls yang penulis bagi menjadi kritik internal dan kritik eksternal. Setelah uraian ini, kita akan melihat gagasan dasar yang ada dalam pendekatan keadilan Sen. Dalam pandangan Sen, ide mengenai kebebasan bukanlah capaian yang lepas dari proses diskusi bersama dengan yang lain. Gagasan dasar ini menjadi sesuatu yang sangat sentral dalam pendekatan keadilan Amartya Sen.

2.2. Teori Keadilan Institusionalisme Transendental

Pada umumnya, teori-teori keadilan yang dibangun oleh pemikir seperti Rawls, Dworkin dan Nozick berupaya mendesain struktur dasar masyarakat beserta pengandaian-pengandaian yang ada di dalamnya. Dengan mendesain struktur dasar, para pemikir ini berasumsi bahwa masyarakat akan dapat ditata secara baik dan adil. Satu masyarakat yang adil harus dimulai dari penataan institusi yang adil. Dalam menata struktur masyarakat, para filsuf ini membangun teori dan konsep yang menjamin hal-hal mendasar dalam ide keadilan. Beberapa hal mendasar itu misalnya adalah prinsip kebebasan, kesetaraan, imparsialitas, objektivitas, penghormatan terhadap hak, distribusi pendapatan yang fair dan sebagainya. Meski pandangan para pemikir ini berbeda-beda, namun arah penekanannya tetap pada soal yang sama yakni penataan institusi. Karena itu mereka semua disebut sebagai pemikir institusionalis.¹³

Pendekatan institusionalis semacam ini, menurut Sen, banyak dipengaruhi oleh teori kontrak sosial Hobbes, Locke dan Rousseau. Dalam ide kontrak sosial terdapat asumsi dasar yang sama yakni bahwa masyarakat yang baik dan adil harus dimulai dari perumusan kesepakatan sosial yang didasarkan pada prinsip kebebasan, kesetaraan, penghormatan terhadap hak dan janji (kontrak). Bagi Sen sendiri, gagasan tentang signifikansi institusi dan aturan yang ada di dalamnya tentu saja penting untuk menata masyarakat secara baik dan adil, namun apa yang diberikan oleh institusi tetap memiliki keterbatasan yang harus dilengkapi oleh peran para pelaku atau individu itu sendiri.¹⁴ Dengan demikian, Sen sebenarnya tidak menggugat signifikansi institusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, namun lebih pada pengayaan variabel pendorong terbentuknya keadilan dalam masyarakat. Itu artinya peran institusi dan pelaku perorangan memiliki peran yang sama-sama signifikan.

Sementara melalui terma transendental tampaknya Sen merujuk pada dua pengertian yang saling berhubungan. Dalam pengertian yang pertama terdapat asumsi bahwa aturan-aturan yang sudah disepakati terlepas dari para individu yang sudah

¹³ Dalam teori keadilan Rawls hal ini dapat dilihat dalam sentralitas penataan institusi atau struktur dasar masyarakat yang menjadi tema utama dalam teori keadilannya. "...the basic structure of society is the way in which the main political and social institutions of society fit together into one system of social cooperation, and the way they assign basic rights and duties and regulate the division of advantages that arises from social cooperation over time." Rawls, 2001, *Justice as Fairness: a Restatement*, hlm. 10

¹⁴ "Institutions and rules are, of course, very important in influencing what happens, and they are part and parcel of the actual world as well, but the realized actuality goes well beyond the organizational picture, and includes the lives that people manage – or do not manage – to live." Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm.18

menyepakati; dan dalam pengertian yang kedua bahwa aturan-aturan yang sudah disepakati bersifat sempurna dan paripurna. Teori-teori keadilan yang diinspirasi oleh teori kontrak sosial selalu mendasarkan ide keadilannya pada konsensus yang sudah dibuat dalam fase tertentu.¹⁵ Jika kesepakatan itu disahkan, maka aturan yang sudah disepakati itu menjadi regulasi kehidupan bersama bahkan hingga generasi setelah mereka. Konsensus yang sudah disepakati cenderung ditempatkan sebagai konsensus final yang tidak lagi membuka diri pada perubahan-perubahan realitas yang semakin kompleks.

Dengan pengertian itu, Sen berpendapat bahwa teori-teori keadilan institusionalisme transendental dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab masalah ketidakadilan yang sangat kompleks. Ia mengkategorikan teori keadilan yang mendasarkan pada institusi sebagai perspektif keadilan *niti*. Bagi Sen, masalah ketidakadilan tidak cukup bila hanya didekati dari pendekatan *niti*. Karena itu, ia mencoba melihat masalah keadilan dalam perspektif yang lebih luas atau yang ia sebut sebagai perspektif keadilan *nyaya*. Dengan ide keadilan *nyaya*, masalah ketidakadilan tidak hanya didekati lewat penataan institusi tetapi juga memperluas kemampuan individu untuk mengurangi ketidakadilan. Selain itu, untuk menanggapi kecenderungan pada asumsi kesempurnaan, Sen berpendapat bahwa sebuah pandangan pada dirinya selalu bersifat tentatif untuk saat itu dan di situ. Dengan demikian, apapun yang sudah dihasilkan perlu untuk selalu dievaluasi, diperbaiki dan diperkaya agar dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi.

2.3. Teori keadilan Rawls

Dalam karya Sen yang berjudul *The Idea of Justice*, teori keadilan Rawls banyak disinggung karena menjadi salah satu titik tolak Sen dalam merefleksikan dan menguraikan gagasan mengenai keadilan. Uraian mengenai teori keadilan Rawls disusun dalam empat sub-bab, pertama latar belakang teori keadilan Rawls yang merespon paham utilitarisme; kedua konsep dasar mengenai *fairness* itu sendiri; ketiga penjelasan mengenai posisi asali (*the original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*); dan yang keempat adalah uraian mengenai dua prinsip keadilan yang dihasilkan dari fase posisi asali.

¹⁵ Dalam teori kontrak sosial modern, fase ini disebut sebagai kondisi alamiah (*state of nature*) sementara Rawls memodifikasinya menjadi posisi asali (*the original position*).

2.3.1. Kritik Terhadap Utilitarisme

Teori keadilan Rawls merupakan upaya untuk memberikan alternatif bagi dominasi teori utilitarisme dalam kajian filsafat politik, khususnya utilitarisme klasik dari Bentham dan Sidgwick.¹⁶ Prinsip paling mendasar dalam utilitarisme menegaskan bahwa kebijakan atau tindakan dapat dianggap benar dan baik sejauh ia menghasilkan manfaat yang maksimum dan dinikmati oleh orang sebanyak mungkin.¹⁷ Melalui prinsip utilitarian, individu atau komunitas yang menjadi pelaku kebijakan dan tindakan akan mempertimbangkan (mengkalkulasi) nilai untung-rugi hasil tindakannya. Seberapa besar keuntungan atau manfaat yang dicapai dan berapa banyak orang yang akan menikmati manfaat tersebut. Dalam etika, pandangan utilitarian masuk dalam kategori teleologis di mana ukuran kebaikan terletak pada hasil yang dicapai, bukan pada tindakan itu sendiri. Pandangan etika semacam ini memiliki implikasi yang sangat serius bagi pandangan yang menempatkan manusia sebagai tujuan pada dirinya. Demi mencapai hasil atau tujuan yang dianggap bernilai manfaat besar dan akan dinikmati oleh banyak orang terbuka kemungkinan bagi seorang utilitarian (baik individu maupun kolektif) untuk melakukan tindakan yang bertentangan secara etis dari perspektif deontologis.

Sebagai sebuah ilustrasi dari kebijakan yang didasari pada pandangan utilitarisme, misalnya membenaran penggusuran rumah warga miskin untuk kepentingan

¹⁶ Dalam kalimat pertama dari buku *The Principle of Morals and Legislation*, Bentham memulai uraian tentang kodrat manusia yang selalu terarah pada pertimbangan akan prinsip kegunaan (*"Nature placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determinate what we shall do. ...They govern us in all we do, in all we say, in all we think..."*) Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, bab 1-i). Menurutnya, alam-lah yang telah membuat manusia tunduk pada dua tuan yang berdaulat itu (kenikmatan dan rasa sakit). Dengan pernyataan itu, ia percaya bahwa prinsip kegunaan merupakan prinsip yang menentukan (determinatif) baik pada level individu maupun kelompok. Prinsip kegunaan selalu menjadi pertimbangan seseorang atau kelompok dalam meloloskan satu tindakan yang rasional (*"By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever"*) Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, bab 1-ii). Setiap tindakan selalu dituntun oleh pertimbangan bahwa tindakan tersebut mengandung kegunaan yang lebih besar. Bagi Bentham prinsip ini menjadi semacam rumus Euklidian dalam pilihan untuk melakukan tindakan. Sementara Mill yang juga tokoh utilitarian besar berupaya memperbaiki pandangan Bentham. Salah satunya adalah dengan membedakan arti kenikmatan fisik dan kenikmatan rohani. Mill memahami nilai kebahagiaan dalam utilitarisme tidak dalam arti kenikmatan fisik sebagaimana khas pada utilitarisme Bentham. Secara lebih mendalam, Mill hendak menempatkan nilai kebahagiaan yang utama pada kenikmatan mental (atau rohani), bukan kenikmatan fisik (*"It must be admitted, however, that the utilitarian writers in general have placed the superiority of mental over the bodily pleasures chiefly in the greater permanency, safety, uncostliness,..."*) Mill, *Utilitarianism*, bab. 2-iv).

¹⁷ *"...society is rightly ordered, and therefore just, when its major institutions are arranged so as to achieve the greatest net balance of satisfaction summed over all the individuals belonging to it."* Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, hlm. 20

umum seperti jalan. Para pengambil kebijakan dihadapkan pada dua hal, tuntutan pembangunan jalan agar bisa menjadi stimulus ekonomi yang menguntungkan dan keberadaan rumah warga miskin di sekitar tempat yang akan dibangun jalan. Dalam kalkulasi para pengambil kebijakan, pembangunan jalan memiliki manfaat yang jauh lebih besar daripada mempertahankan rumah warga miskin. Karena pertimbangan ini, para pengambil kebijakan memilih untuk membangun jalan dan menggusur rumah warga yang kebetulan tinggal di tempat itu. Mereka mengorbankan kepentingan warga dan tempat tinggalnya demi kepentingan dan manfaat yang jauh lebih besar. Dalam pandangan para pengkritik utilitarisme, apa yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan ini adalah menjadikan manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan, padahal manusia adalah tujuan pada dirinya yang tidak bisa dilangkahi untuk kepentingan apapun.

Pandangan utilitarian di atas menjadi salah satu titik tolak bagi Rawls dalam membangun dasar teori mengenai keadilan. Rawls menolak pandangan etis yang menjadikan manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu meski ia akan menghasilkan manfaat besar atau untuk kepentingan yang lebih besar.¹⁸ Rawls membalik prioritas yang baik atas hak menjadi prioritas hak atas yang baik (*the priority of the right over the good*). Manusia adalah tujuan pada dirinya, bukan sarana untuk mencapai tujuan. Dengan pandangan ini, Rawls hendak menekankan paham deontologis Kant yang memahami kebenaran tindakan bukan pada hasil tapi justru pada tindakan itu sendiri. Etika deontologis atau etika kewajiban Kant menyatakan bahwa satu tindakan dapat dikatakan benar secara etis bukan karena tindakan itu akan menghasilkan manfaat yang besar tetapi karena memang tindakan itu wajib dilakukan. Kewajiban itu datang dari perintah “bertindaklah secara moral!”. Tindakan dalam etika kewajiban dipandu oleh satu rumusan yang sangat terkenal “bertindaklah semata-mata menurut prinsip (maksim) yang dapat sekaligus kau kehendaki menjadi hukum umum” (Magnis-Suseno, 1997:145-147).

2.3.2. Keadilan Sebagai “Fairness”

Subjek utama dari keadilan adalah struktur dasar dalam masyarakat. Menurut Rawls, struktur dasar adalah satu model di mana institusi sosial dan institusi politik

¹⁸ “Each person possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override” Rawls, 1999 *A Theory of Justice*, hlm. 3. Dan “in a just society the basic liberties are taken for granted and the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interests” Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, hlm. 25

bersinambung dengan sistem kerjasama sosial, dan sistem kerjasama ini kemudian menata pengaturan hak-kewajiban serta pembagian manfaat yang dihasilkan.¹⁹ Konsep keadilan Rawls memiliki perhatian besar pada cara bagaimana institusi sosial besar harus mendistribusikan hak dan kewajiban dasar, serta pembagian manfaat di dalam suatu kerjasama sosial.²⁰ Yang dimaksudkan dengan institusi besar misalnya adalah konstitusi politik, prinsip ekonomi dan aturan sosial. Konsep keadilan, melalui prinsip-prinsip yang ada di dalamnya menata struktur dasar dalam kerjasama sosial, dan secara tidak langsung ia kemudian menata proses yang berjalan dalam organisasi masyarakat.²¹ Di antara prinsip dasar itu adalah bahwa setiap orang yang terlibat dalam kerjasama sosial ini haruslah bebas, rasional dan setara. Secara deskriptif, Rawls menuliskan maksud dari konsep keadilan sebagai *fairness* sebagai berikut:

“...ide yang menuntun adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat menjadi objek dari kesepakatan asali. Prinsip-prinsip (yang dimaksud, pen.) itu adalah prinsip bahwa orang-orang yang bebas dan rasional yang memiliki perhatian untuk memajukan kepentingan mereka akan menerima (hasil kesepakatan, pen.) di dalam sebuah posisi awal kesetaraan yang menjadi terma dasar yang menentukan bagi asosiasi mereka. Prinsip-prinsip (dasar) ini mengatur kesepakatan-kesepakatan lebih lanjut; mereka menspesifikkan jenis-jenis kerjasama sosial yang dapat dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintahan yang dapat dibangun. Inilah cara melihat prinsip keadilan yang saya sebut keadilan sebagai *fairness*.”²²

Dengan demikian, konsep keadilan sebagai *fairness* terkait erat dengan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam satu kerjasama sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Menurut Rawls, ide dasar yang menata kerjasama sosial paling tidak memiliki tiga ciri berikut. Yang pertama, kerjasama sosial diatur oleh aturan yang dapat

¹⁹ “...the basic structure of society is the way in which the main political and social institutions of society fit together into one system of social cooperation, and the way they assign basic rights and duties and regulate the division of advantages that arises from social cooperation over time.” Rawls, 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, hlm. 10

²⁰ “...the primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantages from social cooperation.” Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, hlm. 6

²¹ “Since justice as fairness starts with the special case of the basic structure, its principles regulate this structure and do not apply directly to or regulate internally institutions and associations within society.” Rawls, 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, hlm. 10

²² “... the guiding idea is that the principles of justice for the basic structure of society are the object of the original agreement. They are the principles that free and rational persons concerned to further their own interests would accept in an initial position of equality as defining the fundamental terms of their association. These principles are to regulate all further agreements; they specify the kinds of social cooperation that can be entered into and the forms of government that can be established. This way of regarding the principle of justice I shall call justice as fairness.” Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, hlm. 10

diterima oleh masyarakat bersangkutan. Aturan yang dijalankan bukanlah produk dari satu otoritas yang sama sekali tidak berangkat dari masyarakat (yang menjadi pelaku aturan) itu sendiri. Yang kedua, kerjasama sosial harus bertopang pada prinsip kerjasama yang fair. Tidak ada satu bagian dari pelaku kerjasama sosial yang merasa dipaksa karena dominasi yang lain. Itu artinya dalam kerjasama harus ada relasi mutualitas dan resiprositas yang setara. Dalam kerjasama sosial yang fair, kebebasan dan kesetaraan warganegara harus dijamin dan tidak dikorbankan untuk kepentingan apapun.²³ Sementara yang ketiga, kerjasama harus bertujuan untuk mencapai tujuan atau manfaat/kebaikan bersama (bdk. Rawls, 2001:6)

Dalam *Justice as Fairness: A Restatement* (2001), Rawls menegaskan bahwa salah satu tujuan praktis dari konsep keadilan sebagai *fairness* adalah untuk memberikan dasar moral dan filosofis dari institusi demokrasi dan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kebebasan dan kesetaraan dipahami dalam kerangka itu.²⁴ Untuk tujuan itu, maka kita perlu melihat hubungan antara kultur publik politis yang berlangsung dalam masyarakat dengan prasyarat-prasyarat yang diandaikan dalam ide keadilan politis. Dalam masyarakat demokratis diasumsikan bahwa mereka tidak asing dengan pandangan bahwa konstitusi dan hukum harus didasarkan pada prinsip kebebasan dan kesetaraan. Tanpa pengandaian pemahaman itu akan sangat sulit untuk membayangkan satu kerjasama sosial yang adil bagi semua yang terlibat di dalamnya.

Menurut Rawls, salah satu peran penting dari prinsip keadilan adalah untuk menspesifikasikan syarat keadilan dalam sebuah kerjasama sosial. Prinsip ini menjelaskan lebih lanjut masalah kewajiban dan hak dasar yang harus ditegakkan oleh satu institusi sosial dan politik tertentu. Prinsip ini juga mengatur pembagian manfaat yang dihasilkan dari kerjasama tersebut.²⁵ Dalam masyarakat demokratis, warganegara dilihat secara politis sebagai orang-orang yang bebas dan setara. Dengan demikian konsepsi keadilan dalam demokrasi sebagaimana yang dipahami oleh Rawls terkait dengan pemahaman mengenai konsep kewarganegaraan yang bebas dan setara. Gagasan ini juga memiliki

²³ "...in a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled; the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interests" Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, hlm.3-4

²⁴ "One practicable aim of justice as fairness is to provide an acceptable philosophical and moral basis for democratic institutions and thus to address the question of how liberty and equality are to be understood" Rawls, 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, hlm.5

²⁵ "The role of principles of justice (as part of a political conception of justice) is to specify the fair terms of social cooperation. These principles specify the basic rights and duties to be assigned by the main political and social institutions, and they regulate the division of benefits arising from social cooperation and allot the burdens necessary to sustain it" Rawls, 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, hlm.7

hubungan dengan apa yang ia sebut sebagai masyarakat yang tertata baik (*well-ordered society*).²⁶ Dua ide ini, yakni ide tentang kewarganegaraan dan masyarakat yang tertata baik menjadi ide sentral dalam memandu institusi demokrasi yang didasarkan pada konsep keadilan politis yang dibayangkan oleh Rawls.²⁷

2.3.3. Posisi Asali dan Selubung Ketidaktahuan

Untuk bisa sampai pada sensibilitas moral yang fair dan adil, Rawls mengandaikan satu kondisi yang ia sebut sebagai posisi asali (*the original position*). Konsep posisi asali ini memiliki kesinambungan makna dengan konsep kondisi alamiah (*state of nature*) dalam teori kontrak sosial. Namun bagi Rawls sendiri, konsep posisi asali ini lebih abstrak dari konsep kondisi alamiah karena kesepakatan yang ada dalam posisi asali harus dilihat sebagai sesuatu yang hipotetis dan non-historis. Ia disebut hipotetis karena kita bertanya tentang apa yang oleh kelompok-kelompok (dalam posisi asali) dapat atau akan sepakati, bukan apa yang telah mereka sepakati. Sementara disebut non-historis karena realitas kesepakatan itu tidak pernah betul-betul terjadi.²⁸ Skema yang ada dalam posisi asali hanya dijadikan sebagai alat analisa terhadap produk kesepakatan sosial.

Namun, meski konsep posisi asali ini bersifat hipotetis, konsep ini penting untuk memodelkan dua hal: yang pertama ia memodelkan sesuatu yang kita pahami sebagai kondisi yang adil dan fair, di mana para warganegara yang bebas dan setara menyepakati prinsip yang mengatur struktur dasar mereka; dan yang kedua ia memodelkan sesuatu yang kita anggap sebagai batasan-batasan yang dapat diterima oleh semua kelompok yang terlibat.²⁹ Jadi jika posisi asali dimaksudkan untuk memodelkan

²⁶ Menurut Rawls, paling tidak dalam masyarakat yang tertata baik memiliki tiga ciri berikut: yang pertama semua warganegara menerima konsep politis mengenai keadilan yang sama; yang kedua struktur dasarnya ditata oleh prinsip-prinsip keadilan; dan yang ketiga semua warganegara memiliki pemahaman mengenai keadilan yang bersifat normal dan efektif. Pemahaman ini yang memungkinkan mereka menerima prinsip-prinsip keadilan. Bdk. Rawls, 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, hlm. 8-9

²⁷ "...this central idea is worked out in conjunction with two companion fundamental ideas. These are: the idea of citizens (those engaged in cooperation) as free and equal persons; and the idea of a well-ordered society, that is, a society effectively regulated by a public conception of justice", Rawls, 2001 *Justice as Fairness: A Restatement*, hlm.5

²⁸ "...(i) it is hypothetical, since we ask what the parties could, or would, agree to, not what they have agreed to. (ii) it is nonhistorical, since we do not suppose the agreement has ever, or indeed ever could actually be entered into." Rawls, 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, hlm. 16-17

²⁹ "First, it models what we regard – here and now – as fair conditions under which the representatives of citizens, viewed solely as free and equal persons, are to agree to the fair terms of cooperation whereby the basic structure is to be regulated. Second, it models what we regard – here and now – as acceptable restriction on the reasons on the basis of which the parties, situated in fair conditions, may properly put forward certain principles of political justice and reject others." Rawls, 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, hlm. 17

dua hal ini maka prinsip dan keputusan yang disepakati oleh kelompok-kelompok yang terlibat merupakan prinsip dan keputusan yang adil serta didukung oleh nalar yang baik.

Konsep posisi asali adalah konsekuensi dari ide mengenai tata kelola masyarakat yang bekerjasama berdasarkan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Dalam skema pemikiran Rawls, konsep posisi asali adalah upaya untuk menjawab pertanyaan dasar berikut: bagaimana kita menerapkan kesepakatan yang fair kedalam prinsip-prinsip keadilan politis dari struktur dasar masyarakat?³⁰ Rawls dengan tegas menjawab bukanlah kesepakatan yang ditentukan oleh satu otoritas ilahi atau oleh satu konsep moral tertentu.³¹ Bagi Rawls, jenis kondisi yang dapat menjawab pertanyaan itu adalah kondisi di mana setiap warganegara tidak melibatkan satu otoritas (yang dianggap sakral) atau pandangan moral tertentu dalam membuat satu keputusan. Kondisi yang diperlukan adalah suatu posisi asali di mana semua pihak yang terlibat itu berstatus warganegara yang bebas dan setara.

Namun posisi asali yang bertitik tolak pada konsep warganegara yang berstatus bebas dan setara masih dianggap belum cukup untuk menjelaskan suatu kerjasama sosial yang mendasarkan pada prinsip keadilan politis. Dalam fase posisi asali, penting bagi kita untuk mengasumsikan bahwa semua warganegara harus dilucuti dari pengetahuan mengenai struktur sosial yang mereka hidupi.³² Dalam fase ini, para warganegara juga harus terbebas dari atribut-atribut yang dapat membuat mereka melakukan pertimbangan-pertimbangan kompromistis. Dengan kata lain, dalam posisi asali ini para warganegara berada dalam selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), di mana tidak ada satu pilihan prinsip atau putusan yang mereka ambil karena pertimbangan bahwa mereka akan mendapat keuntungan dari pilihan itu. Prinsip atau putusan dalam posisi asali adalah produk dari warganegara yang bebas dan setara, serta

³⁰ “The idea of the original position is proposed ...as the answer to the question of how to extend the idea of a fair agreement to an agreement on principles of political justice for the basic structure.” Rawls, 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, hlm. 16

³¹ “... the fair terms of social cooperation are to be given by an agreement entered into by those engaged in it. One reason it does this is that, given the assumption of reasonable pluralism, citizen cannot agree on any moral authority, say a sacred text or a religious institution or tradition. Nor can they agree about a moral order of values or the dictates of what some view as natural law. So what better alternative is there than an agreement between citizens themselves reached under conditions that are fair for all?” Rawls, 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, hlm. 15

³² “...we must specify a point of view from which a fair agreement between free and equal persons can be reached; but this point of view must be removed from and not distorted by the particular features and circumstances of the existing basic structure.” Rawls, 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, hlm. 15

tidak mengetahui siapa atau apa yang mereka representasikan dan pada atribut apa mereka akan ditempatkan pasca posisi asali.³³

Rawls mendeskripsikan posisi asali sebagai posisi awal yang tepat (*appropriate initial status quo*), karena pada posisi ini semua orang diperlakukan setara. Karenanya untuk bisa sampai pada posisi itu kita harus membangun kondisi-kondisi yang memungkinkan itu. Paling tidak ada dua batasan (*constraint*) yang harus terkandung dalam prinsip-prinsip yang dipilih dalam posisi asali. Yang pertama adalah bahwa prinsip-prinsip itu harus memiliki batasan (standar) formal dari sebuah hak. Yang kedua para pihak yang terlibat harus ada dalam kondisi yang disebut selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) (Farely, 2004a:8).

Yang dimaksud dengan batasan formal adalah bahwa prinsip-prinsip yang dipilih harus bersifat umum (*general*), dapat diaplikasikan secara universal, diakui secara umum sebagai pemutus akhir dalam menata atau mengatur berbagai klaim moral yang saling bertentangan. Sementara yang dimaksud dengan selubung ketidaktahuan adalah bahwa semua pihak harus mengosongkan efek dari kontingensi spesifik yang membuat mereka tergoda untuk mengeksploitasi potensi sosial dan alamiah mereka demi keuntungan mereka sendiri. Paling tidak, di dalam posisi asali, para pihak yang terlibat tidak mengetahui beberapa informasi berikut: tempat mereka di dalam masyarakat, ras atau gender mereka, kemampuan mereka, konsep mereka mengenai yang baik, kondisi (ekonomi atau politik) tertentu dalam masyarakat, dan generasi yang mereka miliki (Farely, 2004a:8).

Dengan demikian, gagasan mengenai keadilan sebagai *fairness* mengandaikan satu kondisi di mana semua pihak yang terlibat memiliki kebebasan yang sama luasnya dan mereka tidak memilih dalam satu kondisi di mana mereka mengetahui efek putusan tersebut bagi diri atau kelompoknya. Prinsip atau putusan yang diambil adalah hasil dari pertimbangan rasional para warganegara yang bebas dan setara serta ada dalam selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) Prinsip atau putusan yang diambil bukanlah hasil pertimbangan untung-rugi (bagi diri atau kelompoknya) melainkan apa yang seharusnya dijadikan aturan yang dapat diterima oleh semua orang yang memiliki posisi yang sama.

³³ Kiranya, kondisi yang ada dalam posisi asali ini menjadi dasar dalam gagasan Rawls mengenai *Political Liberalism*. Dalam *Political Liberalism*, Rawls mencoba mengaplikasikan bagaimana ide mengenai posisi asali diterapkan dalam satu komunitas politik plural yang terpecah-pecah dalam ragam doktrin yang sangat banyak. Lihat Rawls, 1996, *Political Liberalism*, hlm. xviii

2.3.4. Dua Prinsip Keadilan

Dengan asumsi bahwa kita telah berada dalam satu fase posisi asali sebagaimana yang dibayangkan oleh Rawls, maka semua yang terlibat dalam fase ini akan menyepakati dua prinsip keadilan Rawls. Dalam pandangannya, ketidaktahuan posisi yang akan kita tempati dan status kebebasan serta kesetaraan yang dimiliki akan membawa seluruh kelompok yang ada dalam posisi asali untuk mengafirmasi prinsip ini. Dua prinsip keadilan itu menegaskan bahwa:³⁴

1. Setiap orang memiliki klaim tak terbatalan yang sama untuk sebuah skema yang betul-betul memadai dari kebebasan dasar yang setara, di mana skema itu juga sesuai (kompatibel) dengan skema kebebasan yang sama bagi semua; dan
2. Ketidaksetaraan sosial dan (ketidaksetaraan, pen.) ekonomi adalah (hanya dizinkan, pen.) untuk memenuhi dua hal: yang pertama peluang pekerjaan dan posisi tertentu harus terbuka bagi semua (warganegara, pen.) dalam satu kondisi kesetaraan kesempatan yang fair; yang kedua memberikan manfaat paling besar kepada kelompok yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan/*difference principle*).

Menurut Rawls, penerapan prinsip-prinsip ini harus berdasarkan aturan leksikal (*lexical order*) di mana prinsip pertama harus ditegakkan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada prinsip keadilan yang kedua. Begitu juga, kita harus memprioritaskan prinsip kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*) sebelum masuk kedalam prinsip perbedaan (*difference principle*) (Rawls, 2001:43). Bagi Rawls urutan prioritas prinsip keadilan ini penting mengingat prinsip kedua harus mengandaikan pemenuhan prinsip pertama. Dengan kata lain, prinsip pertama menjadi dasar atau fondasi yang memungkinkan kita bisa masuk pada prinsip keadilan berikutnya.

Menurut Freeman, gagasan utama dari prinsip yang pertama adalah adanya hak dan kebebasan seseorang yang lebih mendasar dan lebih penting dari hal-hal yang lain. Dengan prinsip yang pertama ini, Rawls mendefinisikan ideal demokrasi pada pengejawantahan warganegara yang setara yang memiliki status sama dalam mengakses

³⁴ “... (a) each person has the same indefensible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberty, which scheme is compatible with the same scheme of liberties for all; and (b) social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity; and, second, they are to be the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle).” Rawls, 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, hlm. 42-43

kekuasaan sehingga dapat memengaruhi pembuatan undang-undang serta berpartisipasi dalam kehidupan politik yang bersifat publik. Gagasan berikut dari prinsip pertama ini menegaskan kebebasan personal untuk mengembangkan kapasitas kemanusiaannya. Freeman menyebut gagasan kebebasan semacam ini sebagai paham kebebasan yang mewakili tradisi kebebasan adiluhung (Freeman, 2007:45).

Lebih lanjut, Freeman menjelaskan bahwa makna kebebasan dalam prinsip pertama ini tidak dimaknai hanya dalam pengertian kebebasan semata (*liberty*) tetapi lebih sebagai kebebasan dasar (*basic liberty*). Rawls menyebutkan bahwa kebebasan dasar yang dijamin dalam prinsip pertama ini adalah kebebasan berpikir dan kebebasan berkeyakinan; kebebasan politik dan kebebasan berserikat; hak dan kebebasan yang terkait dengan kebebasan dan integritas seseorang (baik secara fisik maupun psikologis); dan yang terakhir adalah hak dan kebebasan yang dilindungi oleh aturan hukum (Rawls, 2001:44). Dengan demikian, kebebasan yang dipahami bukan kebebasan dalam arti bebas untuk melakukan apa saja, misalnya mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang ia mau tanpa memerhatikan aturan yang ada atau masuk ke rumah orang tanpa permissi (Freeman, 2007:45-46).

Bagi Rawls, signifikansi hak dan kebebasan dasar ini bertujuan untuk memproteksi apa yang ia sebut sebagai dua daya moral (*the two moral powers*). Dua daya moral yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan penilaian adil atau tidak adil terhadap sebuah institusi dasar atau kebijakan sosial; dan kemampuan untuk sampai pada konsepsi mengenai yang baik. Dua daya ini sulit diandaikan tanpa adanya jaminan kebebasan dasar sebagaimana yang ada dalam prinsip pertama (Rawls, 2001:45).

Dalam menjelaskan prinsip kesetaraan kesempatan, Rawls sangat menekankan bahwa kesetaraan di sini tidak dimaknai dalam arti kesetaraan formal sebagaimana yang dipahami oleh liberal klasik (*formal equality of opportunity*). Konsep kesetaraan kesempatan formal dimaknai secara praktis dalam slogan “karir terbuka untuk semua yang berbakat” (*careers open to talents*).³⁵ Konsep kesetaraan formal dalam arti ini telah menjadi dasar bagi gagasan tentang pasar bebas (*free market*). Dengan pandangan ini maka akses kesempatan pekerjaan berarti terbuka hanya kepada mereka yang memiliki talenta dan kemampuan yang baik. Pandangan ini tidak melihat hal-hal yang

³⁵ “*In the system of natural liberty the initial distribution is regulated by the arrangements implicit in the conception of careers open to talents...*” Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, hlm. 62

menyebabkan mengapa seseorang memiliki talenta baik atau buruk. Rawls menyebut model kesetaraan kesempatan macam ini sebagai sistem kebebasan alamiah yang hanya membuka kesempatan kepada mereka yang memiliki talenta terbaik tanpa memerhatikan kontingensi sosial dan alamiah yang melatari talenta yang dimiliki seseorang.

Dalam pandangan Rawls, pengertian kesetaraan kesempatan formal ini dianggap kurang memadai. Baginya persoalan kesetaraan kesempatan tidak cukup dimaknai secara formal bahwa satu posisi terbuka bagi mereka yang memiliki talenta terbaik, tetapi juga kesempatan yang fair untuk mencapai posisi tertentu.³⁶ Interpretasi liberal klasik tidak menjawab persoalan bahwa talenta dan kemampuan seseorang sebenarnya ditentukan oleh latar belakang kelas sosialnya (bdk. Rawls, 1999:62-63). Itu artinya orang yang hidup dalam kemiskinan tidak akan memiliki talenta dan kemampuan sebagaimana mereka yang hidup dengan kesejahteraan ekonomi yang cukup. Karena itu ia masuk pada model interpretasi berikut, yakni apa yang ia sebut sebagai kesetaraan liberal (*liberal equality*). Dengan pengertian ini, kesetaraan kesempatan tidak hanya dimaknai dalam arti “karir terbuka untuk semua yang berbakat”, tetapi lebih dari itu yakni kesetaraan kesempatan yang fair (*fair equality of opportunity*). Kesetaraan yang fair mencoba untuk mengeliminir, atau paling tidak mengurangi pengaruh kontingensi sosial terhadap kesempatan seseorang. Upaya meminimalisasi pengaruh kelas sosial terhadap kesempatan dan prospek masa depan seseorang misalnya dapat dilakukan dengan memerhatikan latar belakang sosial ekonominya pada saat sebuah kebijakan dirumuskan (Farely, 2004a: 10-11).

Klaim liberal klasik yang mengatakan bahwa distribusi yang mendasarkan pada prinsip pasar bebas akan jauh lebih efisien harus dilihat lebih kritis. Efisiensi distribusi yang diklaim hanya mempertimbangkan momen saat distribusi dilakukan. Mereka tidak melihat bahwa kemampuan dan talenta yang dimiliki oleh seseorang juga dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dan lingkungannya. Itu artinya kemampuan dan talenta seseorang bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri tetapi juga ditentukan oleh faktor di luar dirinya. Karena itu, dalam mempertimbangkan prinsip keadilan, Rawls sangat menggaris bawahi kontingensi sosial seseorang. Menurutnya prinsip *fair equality of opportunity* adalah upaya untuk mengurangi kelemahan yang diakibatkan oleh faktor

³⁶ “The thought here is that positions are to be not only open in a formal sense, but that all should have a fair chance to attain them.” Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, hlm. 63

latar belakang seseorang. Dalam pandangan Rawls, kontingensi yang diminimalisasi bukan hanya kontingensi sosial tetapi juga kesewenang-wenangan distribusi kemampuan alamiah. Setiap manusia lahir dalam kondisi alamiah tertentu tanpa melihat kelas sosialnya. Karena itu, interpretasi liberal juga perlu melihat mereka yang memiliki cacat alamiah dalam mendistribusikan kesempatan.³⁷

Sementara gagasan mengenai prinsip perbedaan (*difference principle/DP*) tidak dimaknai dalam arti bahwa negara berkewajiban membantu warganegara yang tidak beruntung dengan memberikan dana kesejahteraan (semacam Bantuan Langsung Tunai [BLT] di Indonesia). Menurut Freeman, yang dimaksud dengan prinsip perbedaan (DP) adalah penataan institusi hukum agar memerhatikan soal hak kepemilikan dan kontrak, serta penataan institusi ekonomi agar aktivitas perdagangan dan konsumsi dapat berimplikasi pada prospek yang lebih baik bagi warganegara (individu-individu) yang tidak beruntung. Prinsip perbedaan lebih dimaknai sebagai desain sistem ekonomi yang mampu mempromosikan manfaat bagi kelompok tidak beruntung secara optimal. Dalam bahasa lain, sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip perbedaan dapat menciptakan kesempatan kesejahteraan yang besar bagi kelompok masyarakat miskin (*trickle down*). Paling tidak ada dua titik tekan yang hendak didorong lewat prinsip perbedaan ini: pertama, perhatian terhadap kelompok tidak beruntung dengan mengatur sistem kepemilikan, produksi dan transaksi; kedua, sistem ekonomi yang paling adil adalah sistem ekonomi yang dapat membuat kelompok tidak beruntung menjadi jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya (Freeman, 2007:99).

Dengan demikian, fokus prinsip perbedaan ada pada institusi bukan individu. Prinsip perbedaan diaplikasikan untuk mengatur sistem ekonomi dan sistem hukum yang berjalan dalam struktur dasar masyarakat. Hukum yang ada dalam prinsip perbedaan adalah untuk memberikan panduan bagaimana seharusnya hukum dibuat (*rule for making the rules*). Rawls membayangkan bahwa prinsip perbedaan menjadi prinsip utama yang memandu proses deliberasi warganegara demokratis ketika memperdebatkan soal-soal kebaikan bersama (*common good*). Meski diaplikasikan dalam ranah institusi, prinsip perbedaan (DP) secara tidak langsung sebenarnya tetap

³⁷ "Let us suppose that we know from economic theory that under the standard assumptions defining a competitive market economy, income and wealth will be distributed in an efficient way, and that the particular efficient distribution which results in any period of time is determined by the initial distribution of assets, that is, by the initial distribution of income and wealth, and of natural talents and abilities." Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, hlm. 62

mengarah pada individu. Dalam skema tangan tak terlihat (*invisible hand*) Smith, dengan memerhatikan sistem institusi ekonomi dan hukum, produk hukum yang dihasilkan akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan individu. Dengan demikian kesejahteraan warganegara menjadi konsekuensi yang tak terelakkan dalam sistem ekonomi dan hukum yang berdasarkan pada prinsip perbedaan (Freeman, 2007: 99-101).

Menurut Rawls, agar dapat disebut sebagai kerjasama sosial yang adil dan fair maka dua prinsip dasar ini harus diaplikasikan dalam struktur dasar masyarakat. Melalui dua prinsip ini, Rawls memahami bahwa struktur dasar masyarakat memiliki dua peran yang saling terkait. Yang pertama, struktur dasar masyarakat harus mampu melindungi dan menjamin kebebasan dasar yang setara untuk semua warganegara dan menegakkan satu rezim konstitusional yang adil. Dan pada peran yang kedua, dengan memerhatikan peran konstitusi diharapkan dapat memberikan institusi latar dari keadilan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan kerangka konsep warganegara yang bebas dan setara (Rawls, 2001:48).

2.4.Kontribusi Rawls dalam Refleksi Tentang Keadilan

Tidak dapat dipungkiri oleh Sen sendiri bahwa teori keadilan Rawls memberikan sumbangan besar bagi refleksi para ahli teori politik mengenai keadilan. Baginya, John Rawls adalah salah seorang pemikir penting yang banyak memengaruhinya dalam merefleksikan ide tentang keadilan. Ia sudah mengikuti gagasan Rawls sejak paper “*decision procedures*” yang ditulis pada tahun 50-an. Ia juga terus mengikuti Rawls ketika artikel *Justice as Fairness* muncul pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan menjadi buku *A Theory of Justice* yang terbit pada tahun 1971.

Menurut Sen, salah satu ide dasar yang mendahului gagasan tentang keadilan Rawls adalah konsepnya mengenai *fairness*. Bagi Rawls, *fairness* terkait erat dengan konsep imparzialità yang menjadi pengandaian penting dalam posisi asali (*the original position*). Posisi asali adalah kondisi primordial kesetaraan di mana setiap warganegara tidak mengetahui apakah keputusan yang diambil dalam posisi yang bebas dan setara itu akan menguntungkan dirinya atau kelompoknya (*veil of ignorance*) (Sen, 2009: 52-55). Dengan asumsi-asumsi ini, sebuah keputusan berkorelasi dengan keadilan sejauh ia mematuhi prinsip-prinsip *fairness* sebagaimana yang disyaratkan dalam fase posisi asali.

Secara ringkas, dalam *The Idea of Justice* Sen menunjukkan beberapa kontribusi penting yang telah disumbangkan oleh Rawls lewat teori keadilannya (Sen, 2009: 62-65). Beberapa kontribusi itu adalah sebagai berikut:

- Kontribusi besar yang pertama dan yang cukup sentral dari Rawls adalah gagasan *justice as fairness* sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Dengan gagasan ini, teori keadilan Rawls dianggap melampaui konsep keadilan yang diajukan oleh perspektif utilitarian. Meski demikian Sen tetap harus mengatakan bahwa ia tidak terlalu yakin apakah konsep imparzialità yang diandaikan oleh Rawls dalam posisi asali itu betul-betul memadai untuk membangun teori keadilan – Sen mengkritik gagasan imparzialità Rawls sebagai konsep imparzialità tertutup.
- Sumbangan kedua yang juga penting dalam pendekatan Rawls adalah gagasannya mengenai prinsip objektivitas dalam nalar praktis (*practical reason*). Melalui prinsip ini, Rawls menegaskan bahwa konsep objektivitas harus memperkuat kerangka berpikir yang memadai untuk menghasilkan satu putusan atau kesimpulan yang bisa dicapai melalui nalar dan bukti setelah diskusi dan refleksi.
- Kontribusi ketiga Rawls adalah pengandaian daya moral (*the moral powers*) yang memungkinkan kita untuk bertindak adil. Menurut Rawls, karena daya moral itu maka manusia memiliki kapasitas untuk mengerti tentang yang adil (*the just*) dan yang baik (*the good*). Dalam uraiannya mengenai daya moral, Rawls telah membuat distingsi penting mengenai yang rasional (*rational*) dan yang masuk akal (*reasonable*).
- Kontribusi keempat adalah prioritas prinsip kebebasan yang setara dalam teori keadilan Rawls. Prinsip kebebasan sangat menentukan pada saat ia menguraikan bagian kedua dari prinsip keadilan yang kedua, yakni prinsip perbedaan (*difference principle*). Baginya, prinsip kebebasan harus diandaikan ketika kita memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar semisal penghasilan (*income*) dan hal-hal dasar (*primary goods*). Selain itu, prinsip kebebasan (*liberty*) juga penting ketika kita berada dalam praktik penalaran publik (*practice of public reasoning*).

- Kontribusi kelima adalah gagasan mengenai keadilan prosedural (*fair equality of opportunity*) yang ia singgung pada prinsip kedua bagian pertama. Melalui prinsip keadilan prosedural, Rawls telah memberikan kontribusi pemahaman yang penting mengenai kemungkinan ketidaksetaraan (*inequality*) dalam ilmu sosial. Dengan gagasan ini Rawls ingin menggarisbawahi faktor kesenjangan status sosial dan kesejahteraan ekonomi yang berimplikasi pada tingkat kemampuan dan talenta yang dimiliki oleh seseorang.
- Kontribusi keenam yang tidak kalah penting dan sangat berpengaruh dalam isu kebijakan publik adalah konsep *difference principle* Rawls. Melalui konsep ini, Rawls menekankan pentingnya aturan sosial yang memberikan perhatian kepada orang-orang miskin. Gagasan ini tentu saja memiliki pengaruh pada kebijakan publik untuk mengurangi kemiskinan.
- Dan yang terakhir adalah perhatiannya pada relasi hal-hal dasar (*primary goods*) dengan kebebasan substantif. Melalui gagasan ini Rawls memberikan pengakuan tak langsung tentang pentingnya kebebasan manusia dalam memberikan mereka kesempatan untuk melakukan apa yang diinginkan untuk kehidupan mereka. Bagi Sen, gagasan ini berkaitan dengan konsep kapabilitas yang nanti akan diuraikan.

2.5. Kritik Sen atas Teori Keadilan Rawls

Meski Sen memiliki hutang yang cukup besar pada Rawls dalam merefleksikan ide keadilan, ia justru mencoba menunjukkan beberapa kelemahan yang ada dalam teori keadilan Rawls. Dalam mengkritik teori keadilan Rawls, penulis membaginya menjadi dua: kritik internal dan kritik eksternal. Yang dimaksud dengan kritik internal adalah kelemahan yang muncul dari logika teori keadilan Rawls sendiri. Dalam kritik internal, penulis banyak mengulas kelemahan prinsip objektivitas dan imparialitas dalam teori yang diinspirasi dari kontrak sosial. Sementara yang dimaksudkan dengan kritik eksternal adalah kelemahan teori keadilan Rawls yang dilihat dari perspektif eksternal, dalam hal ini tentu banyak berangkat dari perspektif Sen sendiri.

2.5.1. Kritik Internal

Berpikir secara objektif dan imparial, dalam pandangan Rawls, menjadi kerangka dasar yang sangat penting dalam melakukan penilaian mengenai yang adil dan

tidak adil.³⁸ Dengan berpikir secara objektif dan imparial berarti bahwa sebuah penilaian tidak memiliki kecenderungan pada parsialitas tertentu. Fase posisi asali (*the original position*) Rawls yang mengharuskan setiap orang berada dalam selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) mengasumsikan adanya kerangka berpikir yang objektif dan imparial. Penilaian yang dihasilkan dari fase posisi asali bukanlah penilaian yang diabdikan pada parsialitas tertentu, karena setiap pihak dalam fase ini tidak mengetahui posisi diri, jenis kelamin, kelas sosial dan identitas lainnya. Dengan kata lain penilaian yang dihasilkan adalah penilaian yang objektif dan imparial. Penilaian yang tidak didasarkan pada prinsip dasar ini akan dianggap sebagai penilaian cacat keadilan atau tidak lagi dianggap sebagai penilaian yang fair.

Namun dalam perspektif Sen, prinsip selubung ketidaktahuan Rawls yang memiliki maksud untuk menjaga objektivitas dan imparialitas sebuah penilaian telah dianggap gagal menangkap nilai kemanusiaan yang lebih luas.³⁹ Mengapa demikian? Dalam kritiknya terhadap konsep imparialitas Rawls, Sen memahami prinsip selubung ketidaktahuan dalam fase posisi asali Rawls dibatasi oleh satu mekanisme kontraktual. Dengan prinsip objektivitas dan imparialitas yang terbatas hanya untuk mereka yang terlibat dalam satu kontrak sosial tertentu berarti penilaian objektif dan imparial yang dihasilkannya sebenarnya juga terbatas pada kelompok tertentu saja. Penilaian objektif dan imparial yang dihasilkan dari satu komunitas yang terikat dalam kontrak tertentu maka hanya mereka yang disebut sebagai warganegara yang memiliki hak untuk melakukan penilaian. Hal yang menjadi pertanyaan kemudian, bukankah sebuah penilaian yang objektif seharusnya melampaui batas-batas kontraktual? Bagi Sen, imparialitas model

³⁸ “The reasoning that is sought in analysing the requirements of justice will incorporate some basic demands of impartiality, which are integral parts of the idea of justice and injustice. At this point there is some merit in summoning the ideas of John Rawls and his analysis of moral and political objectivity, which he presented in his defence of the objectivity of ‘justice as fairness’. Rawls argues: ‘The first essential is that a conception of objectivity must establish a public framework of thought sufficient for the concept of judgement to apply and for conclusions to be reached on the basis of reasons and evidence after discussion and due reflection.’ He goes on to argue: ‘To say that a political conviction is objective is to say that there are reasons, specified by a reasonable and mutually recognizable political conception (satisfying those essentials), sufficient to convince all reasonable persons that it is reasonable’” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 42

³⁹ “Even as the Rawlsian ‘veil of ignorance’ addresses effectively the need to remove the influence of the vested interests and personal slants of the diverse individuals within the focal group, it abstains from invoking the scrutiny of (in Smith’s language) ‘the eyes of the rest of mankind’.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 126

Rawls ini dikategorikan sebagai imparialitas tertutup sehingga penerapan keadilannya pun bersifat parokial (Sen, 2009:126).⁴⁰

Dalam pandangan Sen, dengan prinsip selubung ketidaktahuan yang diandaikan dalam posisi asali, di satu sisi Rawls sebenarnya membuka pintu untuk berpikir secara objektif dan imparial, namun di sisi yang lain ia telah mengunci pencarian objektif karena telah mengisolasi prinsip objektivitas dan imparialitas hanya untuk mereka yang terlibat dalam kontrak.⁴¹ Model imparialitas kontraktual Rawls yang kemudian disebut sebagai imparialitas tertutup ia kontraskan dengan model imparialitas terbuka. Ide dasar yang ada dalam imparialitas terbuka adalah bahwa sebuah pencarian objektif seharusnya tidak dibatasi hanya pada mereka yang terikat dalam kontrak sosial tertentu atau hanya pada mereka yang disebut sebagai warganegara. Perspektif objektif dalam imparialitas terbuka berupaya menjangkau perspektif kemanusiaan yang lebih luas dengan melibatkan mereka yang tidak terikat dalam kontrak sosial tertentu.

Ada tiga hal penting yang perlu dicatat dalam kritik Sen atas model imparialitas tertutup Rawls. Yang pertama, teori imparialitas Rawls terbatas pada mereka yang sudah terikat dalam kontrak sosial tertentu. Dengan kata lain, penilaian imparial Rawls dibatasi hanya untuk mereka yang disebut sebagai warganegara tertentu.⁴² Bagi Sen, penilaian imparial seharusnya dapat melampaui mereka yang berada di luar kontrak atau mereka yang tidak menjadi bagian dari komunitas warganegara tertentu. Yang kedua, mengapa Sen menilai perluasan perspektif imparialitas dan objektivitas sebagai sesuatu yang penting? Dalam pandangannya, sebuah keputusan yang dihasilkan dari komunitas politik tertentu pada dasarnya juga akan memberikan pengaruh bagi komunitas di luar batas komunitas politik tersebut.⁴³ Mengenai alasan ini, Sen

⁴⁰ "With closed impartiality, the procedure of making impartial judgments invokes only the members of the focal group itself. For example, the Rawlsian method of "justice as fairness" uses the device of an "original contract" between the citizens of a given polity." Sen, 2002, "Open and Closed Impartiality" dalam *The Journal of Philosophy*, hlm. 445

⁴¹ "When Rawls says that 'our moral principles and convictions are objective to the extent that they have been arrived at and tested by assuming [a] general standpoint', he is attempting to unlock the door for an open scrutiny, and yet, later on in the same sentence, the door is partially bolted by the procedural form of requiring conformity with the territorially isolated original position: 'and by assessing the arguments for them by the restrictions expressed by the conception of the original position'." Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 127

⁴² "A theory of impartiality that is confined exactly within the borders of a sovereign state proceeds along territorial lines that do, of course, have legal significance but may not have similar political or moral perspicuity." Sen 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 129

⁴³ "And if the institutions and policies of one country influence lives elsewhere, should not the voices of affected people elsewhere count in some way in determining what is just or unjust in the way a society is

memberikan contoh konkret pendudukan Amerika Serikat atas Irak pada tahun 2003 yang hanya didasarkan pada penilaian imparsial dari satu kedaulatan politik negara tertentu pada kenyataannya telah berimplikasi serius pada mereka yang berada di luar kedaulatan negara Amerika Serikat (Sen, 2009:129-130). Yang ketiga karena gagasan imparsialitas tertutup dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab tuntutan keadilan yang objektif maka Sen menawarkan model imparsialitas terbuka yang akan penulis uraikan dalam kritik eksternal.

2.5.2. Kritik Eksternal

Dalam menguraikan kritik eksternal atas teori keadilan Rawls, ada tiga hal yang akan penulis uraikan dalam bagian ini. Yang pertama adalah pembedaan hal-hal dasar (*primary goods*) dan konsep kapabilitas Sen; yang kedua relevansi perilaku aktual dalam ide keadilan; dan yang ketiga alternatif model imparsialitas terbuka (*open impartiality*) bagi model imparsialitas tertutup (*closed impartiality*) Rawls.

2.5.2.1. Hal-hal Dasar dan Kapabilitas

Melalui pendekatan keadilan berbasis kapabilitas, Sen mengkritik pandangan Rawls yang menilai individu hanya dalam pengertian hal-hal dasar (*primary goods*). Bagi Sen, individu tidak cukup bila dinilai hanya dalam kategori hal-hal dasar. Melalui teori kapabilitas ia lebih melihat individu dalam kerangka kebebasan untuk memilih kehidupan yang mereka anggap bernilai. Gagasan dasar yang hendak diajukan oleh Sen adalah soal kebebasan aktual yang direpresentasikan dalam kapabilitas seseorang untuk mencapai kondisi ideal (*functionings*) tertentu (Sen, 1992:81). Untuk menunjukkan kelemahan Rawls, Sen membedakan antara individu yang dilihat dalam kerangka kapabilitas dan yang dilihat dalam kerangka hal-hal dasar. Perbedaan cara pandang ini dijelaskan lewat ilustrasi mengenai orang cacat yang memiliki penghasilan tinggi – yang dalam Pandangan Rawls, penghasilan dilihat sebagai salah satu hal dasar (*primary goods*). Dalam perspektif Sen, penghasilan yang tinggi tidak memiliki makna yang signifikan jika seseorang tidak memiliki kapabilitas karena kecacatannya (Sen, 1992:81; bdk. Sen “Justice: Means versus Freedom”:116). Berdasarkan pertimbangan ini, apa yang disebut sebagai hal-hal dasar sebenarnya bukan sesuatu yang sangat konstitutif

organized, typically with profound effects – direct or indirect – on people in other societies?” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 130

dalam ide kebebasan. Sen lebih melihat hal-hal dasar sebagai sarana saja.⁴⁴ Hal-hal dasar tentu saja penting namun hal yang paling menentukan bagi kebebasan individu adalah bagaimana hal dasar itu menjadi kebebasan aktual yang direpresentasikan dalam gagasan kapabilitas.⁴⁵ Penjelasan lebih lengkap mengenai konsep kapabilitas dapat dilihat dalam bab 4 nanti.

Dalam teori keadilannya, Rawls sudah melakukan koreksi mengenai keadilan distribusi hal-hal dasar (*primary goods*), khususnya terhadap mereka yang masuk dalam kategori berkebutuhan khusus (*special needs*) seperti orang cacat. Itu artinya, dalam distribusi hal-hal dasar, Rawls sudah menyadari bahwa kondisi setiap orang tidaklah sama. Namun, meski Rawls sudah memerhatikan mereka yang berkebutuhan khusus sebagai sesuatu yang penting dipertimbangkan dalam distribusi keadilan, bagi Sen perhatian itu masih dalam capaian yang terbatas. Paling tidak ada dua hal yang menjadi catatan Sen. Pertama koreksi ini terjadi hanya setelah struktur institusional dasar masyarakat sudah diatur melalui prinsip keadilan Rawlsian – bukan pada tahap pembentukan struktur institusional dasar. Yang kedua, perhatian Rawls ini tidak meliputi variasi mereka yang berkebutuhan khusus yang sangat beragam. Intinya, dalam pandangan Sen, Rawls masih belum betul-betul masuk pada realitas kebutuhan khusus (*special needs*) yang betul-betul bervariasi (Sen, 2009:260-261).

Dalam kaitannya dengan kritik Sen terhadap konsep hal-hal dasar (*primary goods*) Rawls, Sen juga mencatat dua hal penting. Yang pertama, Sen menggarisbawahi prinsip keadilan Rawls yang sangat memprioritaskan kebebasan dalam keadilan. Menurut Sen, pengertian kebebasan yang dipahami oleh Rawls sangat terfokus pada kebebasan personal, bahkan prioritas kebebasan personal itu dipahami terlalu ekstrim. Padahal persoalan kelaparan atau pengabaian pengobatan juga terkait dengan persoalan kebebasan yang tidak kalah pentingnya daripada prioritas kebebasan personal. (Sen, 2009:65). Yang kedua, dalam gagasannya mengenai prinsip perbedaan (*difference principle*), Sen menawarkan ide untuk mengkonversi hal-hal dasar (*primary goods*) menjadi kehidupan yang baik (*good living*) yang berkaitan dengan ide tentang kapabilitas. Menurut Sen, dengan konversi ini maka kita akan melihat bahwa perbedaan

⁴⁴ “An important problem arises from the fact that primary goods are not constitutive of freedom as such, but are best seen as means to freedom...” Sen, 1992, *Inequality Reexamined*, hlm. 81

⁴⁵ Dalam hal ini Sen juga mengkritik pandangan Dworkin yang melihat individu dalam kerangka sumber daya (*resource*). Sebagaimana kritiknya terhadap Rawls, Sen lebih melihat sumber daya hanya sebagai sarana seperti hal-hal dasar (*primary goods*) Rawls. Sen, 1992, *Inequality Reexamined*, hlm. 81

kemampuan seseorang atau masyarakat akan berimplikasi pada perbedaan kebijakan riil yang diajukan. Misalnya, untuk orang-orang difabel atau ibu hamil akan diberikan perhatian lebih dibanding orang normal dan tidak hamil. Perhatian yang lebih ini untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang berada dalam lingkungan atau kondisi ‘tidak normal’ agar tetap bisa memaknai dan mengisi arti kebebasan (bdk. Sen, 2009: 65-66).

2.5.2.2.Relevansi Perilaku Aktual

Teori keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)* yang diajukan oleh Rawls bertitik tolak dari pendekatan kontrak sosial yang sudah dibangun oleh Hobbes, Locke dan Rousseau. Dengan pendekatan ini mereka berupaya melahirkan institusi-institusi yang adil (*just institutions*) atas dasar prinsip-prinsip yang akan mengatur institusi tersebut. Menurut Sen, perhatian teori keadilan sebagai *fairness* lebih menitikberatkan pada institusi yang adil (*just institutions*) alih-alih pada masyarakat yang adil (*just societies*). Untuk menunjukkan kecenderungan Rawls ini, Sen mengutip kesimpulan Freeman yang bersama Erin Kelly telah menyunting tulisan-tulisan Rawls (Sen, 2009:67):

“Rawls mengaplikasikan ide mengenai kesepakatan sosial hipotetis untuk memberikan argumen bagi prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip ini bekerja untuk memutuskan keadilan institusi yang menentukan struktur dasar masyarakat. Para individu dan tindakannya adalah adil sejauh sesuai dengan tuntutan institusi yang adil... Bagaimana (institusi-institusi ini) dispesifikkan dan diintegrasikan kedalam sistem sosial secara mendalam akan memengaruhi karakter-karakter masyarakat, hasrat-hasrat dan rencana-rencananya, dan prospek masa depan mereka, dan juga jenis manusia yang mereka cita-citakan. Karena efek mendalam dari institusi-institusi ini terhadap jenis manusia yang ada, Rawls mengatakan bahwa struktur dasar masyarakat adalah tema utama dalam keadilan”⁴⁶

Perhatian teori keadilan Rawls yang membatasi pada upaya melahirkan institusi yang adil menurut Sen adalah teori keadilan dalam arti *niti*. Sementara keadilan yang memiliki perhatian pada institusi sosial dan juga pola perilaku publik atas konsekuensi

⁴⁶ “Rawls applies the idea of hypothetical social agreement to argue for principles of justice. These principles apply in the first instance to decide the justice of the institutions that constitute the basic structure of the society. Individuals and their actions are just insofar as they conform to the demands of just institutions... How [these institutions] are specified and integrated into a social system deeply affects people’s characters, desires and plans, and their future prospects, as well as the kind of persons they aspire to be. Because of the profound effects of these institutions on the kinds of persons we are, Rawls says that the basic structure of society is the primary subject of justice.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 67

sosial dan realisasi yang mereka upayakan, menurut Sen, adalah keadilan yang memakai pendekatan *nyaya*.

Untuk menunjukkan signifikansi keadilan dalam pendekatan *nyaya*, paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan (Sen, 2009:68). *Pertama*, dengan memahami keadilan dalam arti *nyaya* kita tidak mengabaikan realisasi sosial aktual yang diharapkan muncul dari pilihan institusi. Apa yang terjadi pada setiap orang harus menjadi perhatian utama dalam teori keadilan maka karenanya perspektif *nyaya* menjadi penting (Sen, 2009:68). Dengan kata lain, Sen ingin mengatakan bahwa teori keadilan tidak cukup bila hanya mengandalkan peran institusi atau struktur sosial yang sudah dianggap adil. Menurutnya, kita juga perlu memerhatikan bagaimana orang per orang sebagai individu merealisasikan tindakannya.

Kedua, walaupun kita sudah menerima pilihan institusi sosial dasar dan menyetujui beberapa perilaku yang masuk akal (*reasonable behaviour*), menurut Sen hal itu masih menyisakan persoalan besar, apakah pilihan institusi yang sudah dipilih akan segaris dengan perilaku yang masuk akal. Dengan persoalan ini Sen ingin mengatakan bahwa yang perlu diperhatikan adalah adanya kesesuaian antara institusi atau struktur dasar yang adil dan perilaku yang masuk akal sehingga menghasilkan realisasi keadilan yang lebih luas (bdk. Sen, 2009:68). Untuk itu, institusi yang dipilih tidak hanya harus segaris dengan karakter masyarakat (*the nature of society*), tetapi juga bergantung pada perilaku aktual yang dapat diharapkan (Sen, 2009:69)

2.5.2.3. Kontrak Sosial dan Perspektif Global

Salah satu fondasi dasar teori keadilan John Rawls ada dalam teori kontrak sosial. Melalui nalar kontrak yang menurutnya terjadi dalam kondisi non-historis yang disebut posisi asali (*the original position*), Rawls mencoba mencari sebuah pendasaran konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak secara aklamatif. Kontrak dalam posisi asali yang mengandaikan selubung ketidakatahuan (*veil of ignorance*) menjadi dasar yang penting untuk mencapai keadilan dalam arti *fairness*. Namun, dalam pandangan Sen, pendekatan keadilan yang mendasarkan pada nalar kontrak sosial dianggap tidak memadai untuk menyebut diri sebagai penilaian keadilan yang objektif. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kritik internal Sen atas teori keadilan Rawls, kelemahan ide keadilan yang mendasarkan pada kontrak sosial adalah karena penilaian mengenai yang adil dan tidak adil dibatasi hanya untuk mereka yang terikat dalam kontrak saja.

Perspektif mereka yang tidak terikat dalam kontrak kewarganegaraan tertentu tidak bisa diakomodasi dalam ide keadilan yang berdasarkan pada teori kontrak sosial.

Karena kelemahan pendekatan ini, Sen menawarkan model pencarian objektif yang mencoba mengakomodasi mereka yang tidak terlibat dalam kontrak. Model ini diinspirasi oleh teori Adam Smith tentang *impartial spectator*. Dengan model *impartial spectator*, penilaian tentang yang adil dan tidak adil berupaya merangkul mereka yang tidak menjadi bagian dari kontrak sosial tertentu. Sen menyebut model yang diinspirasi dari *impartial spectator* ini sebagai imparzialità terbuka (*open impartiality*), untuk membedakan model Rawls yang dikategorikan sebagai imparzialità tertutup (*closed impartiality*). Paling tidak ada tiga pertimbangan mengapa perspektif imparzialità terbuka yang diinspirasi dari *impartial spectator* ini penting. Yang pertama karena dalam mempertimbangkan yang adil seharusnya tidak hanya didasarkan pada penilaian dari satu komunitas politik tertentu tetapi juga mereka yang berada di luar komunitas politik itu. Yang kedua, alasan mengapa mereka harus dilibatkan adalah karena pilihan tindakan yang diambil dapat dipastikan akan berpengaruh pada mereka yang berada di luar para pengambil keputusan. Karenanya pelibatan mereka yang berada di luar kontrak politik menjadi sebuah keniscayaan. Dan yang ketiga, dengan mempertimbangkan penilaian mereka yang berada di luar, bukanlah sesuatu yang mustahil jika pengalaman mereka yang berada di luar dapat memperkaya perspektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh komunitas politik tertentu.⁴⁷

Gagasan kontrak sosial *a la* Rawlsian yang cenderung membatasi pelibatan pihak atau kelompok lain yang berada di luar kontrak politik tertentu akan sangat sulit untuk mencapai penilaian keadilan yang lebih objektif. Menurut Sen, bila ada upaya untuk menguniversalisasi konsep posisi asali rawlsian sebagai standar global juga akan

⁴⁷ “...assessment of justice demands engagement with the ‘eyes of mankind’, first, because we may variously identify with the others elsewhere and not just with our local community; second, because our choices and actions may affect the lives of others far as well as near; and third, because what they see from their respective perspectives of history and geography may help us to overcome our own parochialism.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 130. Dalam pandangan Sen, selain berupaya mengakomodasi mereka yang berada di luar kontrak sosial tertentu, gagasan yang diinspirasi oleh teori *impartial spectator* Smith ini juga memberi perhatian pada tiga hal penting lainnya. Pertama bahwa gagasan Sen ini menekankan model penilaian komparatif yang melihat sesuatu tidak semata dari perspektif transendental yang paripurna. Yang kedua, pendekatan yang ditawarkan Sen tidak hanya menekankan aspek tuntutan institusi dan aturan tetapi juga aspek realisasi sosial. Dan yang ketiga, karena menekankan model pendekatan komparatif maka model ini memberikan ruang pada ketidaksempurnaan dalam penilaian sosial. Namun meski demikian, pendekatan ini tetap memberikan panduan mengenai masalah keadilan sosial termasuk urgensi mengatasi masalah ketidakadilan yang sangat nyata. Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 70

ada banyak masalah yang dihadapi. Dalam pandangannya, Thomas Pogge adalah salah seorang yang mengupayakan hal ini. Di sudut yang lain, Thomas Nagel cenderung tidak percaya akan kemungkinan keadilan global yang lepas dari lokus institusi atau kedaulatan sebuah negara (Sen, 2009:71).⁴⁸

Namun, di tengah kebuntuan teori keadilan Rawls dalam mengupayakan keadilan global, dalam benak kita tetap ada kebutuhan pertimbangan keadilan yang bersifat global yang melampaui batas-batas negara. Menurut Sen, minimal ada dua pertimbangan mendasar mengenai hal ini. Yang pertama adalah bahwa apa yang terjadi di satu negara dapat dipastikan akan berimplikasi secara global. Keputusan satu negara tertentu dapat dipastikan akan berimplikasi pada negara-negara lain. Yang kedua, setiap negara atau masyarakat memiliki keyakinan partikular yang menuntut pengujian atau pencarian yang lebih global. Apa yang dialami oleh satu negara atau masyarakat tertentu bisa saja terbantu dengan pengalaman yang pernah dimiliki oleh masyarakat dan negara lain (Sen, 2009:71).

2.6.Pendekatan Keadilan Amartya Sen

Catatan dan kritik Sen atas teori keadilan Rawls sudah memberikan petunjuk kepada kita tentang aspek yang dianggap penting dalam refleksi mengenai keadilan namun luput dalam teori keadilan Rawls.⁴⁹ Sen tidak menegasi total capaian refleksi keadilan dari pemikir sebelumnya. Yang ia lakukan adalah menambah dan memperkaya model ide keadilan yang dapat membuat refleksi mengenai keadilan semakin baik dan kaya karena mengakomodasi pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas.

Dalam pandangan Sen, ide mengenai keadilan memerlukan pertimbangan perspektif yang beragam, bukan perspektif yang tunggal. Dengan perspektif yang

⁴⁸ Nagel berpendapat bahwa institusi politik seperti negara-bangsa menjadi lokus utama dari sebuah legitimasi politis dan upaya untuk mencapai keadilan. Menurutnya, ide tentang keadilan global menuntut adanya legitimasi politik tertentu. Dalam pengertian yang terbatas legitimasi itu ada pada kedaulatan negara-bangsa. Jika kita hendak mengajukan konsep keadilan pada level yang lebih global maka perlu ada kedaulatan politik yang juga bersifat global. Uraian lebih dalam mengenai keadilan global Nagel dapat dibaca dalam “*The Problem of Global Justice*”.

⁴⁹ Sen secara ringkas membuat kesimpulan atas beberapa kelemahan yang ada dalam teori keadilan Rawls, yaitu: mengabaikan jawaban komparatif, dengan hanya berkonsentrasi pada upaya mengidentifikasi tuntutan masyarakat adil yang paripurna; hanya memformulasikan keadilan dalam arti institusi keadilan, tidak memerhatikan perspektif realisasi sosial yang lebih luas; mengabaikan pandangan orang yang berada di luar kontrak (di luar batas negara). **Padahal eksistensi mereka memengaruhi keberadaan kita; gagal untuk menyusun satu prosedur yang dapat mengoreksi dan memengaruhi mereka yang berada di luar kontrak; tidak memungkinkan bagi kita untuk memiliki prinsip (keadilan) yang berbeda ketika kita berada dalam fase posisi asali (*the original position*); tidak memberikan tempat bagi mereka yang tidak selalu bertindak rasional dalam proses hidup bersama.** Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 90

beragam diharapkan ada pertukaran pandangan sehingga memungkinkan kita untuk mempertimbangkan pandangan-pandangan lain yang berbeda. Praktik diskusi adalah salah satu model yang kerap disinggung oleh Sen untuk menjelaskan proses ini. Menurutny pemahaman mengenai keadilan bukanlah hasil dari renungan seorang diri. Ketika kita membuat penilaian mengenai sikap atau jenis masyarakat yang tidak adil, maka kita juga perlu mendengar dan memerhatikan pandangan orang lain yang bisa jadi dapat memberikan catatan atau revisi atas kesimpulan yang kita buat. Begitu juga sebaliknya ketika orang lain membuat pertimbangan, maka kita perlu menyatakan pandangan tentang prioritas dan cara berpikir kita.⁵⁰

Sebagai konsekuensi dari keniscayaan berpikir ini, teori keadilan dalam pandangan Sen tidak bersifat monolitik. Ia membuka ruang bagi berbagai pandangan mengenai keadilan untuk berdiskusi dan beradu argumen. Karenanya kecenderungan untuk menganggap bahwa hanya ada satu model teori keadilan kerap digugat oleh Sen. Kecenderungan ini terjadi pada teori keadilan Rawls yang mengasumsikan bahwa agar suatu masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat yang adil (*just society*) maka satu komunitas politik – dengan asumsi komunitas politik manapun – harus mengaplikasikan model teori keadilan yang ia tawarkan. Secara elaboratif, pendekatan yang disebut sebagai model komparatif akan penulis uraikan dalam bab 3.

2.7.Rangkuman

Ada beberapa kesimpulan penting yang dapat diangkat dari bab 2 ini. Yang pertama teori keadilan Rawls yang disebut sebagai teori keadilan institusionalisme transendental dianggap tidak lagi memadai untuk membangun masyarakat yang adil itu sendiri. Menurut Sen, kelemahan itu terletak pada penekanan Rawls yang terlampau besar terhadap lokus institusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil. Sejak awal, teori keadilan Rawls memiliki perhatian besar pada penataan struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Padahal bagi Sen, selain peran institusi, kita juga perlu memerhatikan peran kepelakuan orang per orang dalam hidup bersama. Bagi Sen, peran

⁵⁰ “*Understanding the demand of justice is no more of a solitarist exercise than any other human discipline. When we try to assess how we should behave, and what kind of societies should be understood to be patently unjust, we have reason to listen and pay attention to the views and suggestions of others, which might or might not lead us to revise our own conclusions. We also attempt, frequently enough, to make other pay some attention to our priorities and our ways of thought, and in this advocacy we sometimes succeed, while at other times we fail altogether. Not only are dialogue and communication part of the subject matter of the theory of justice, it is also the case that the nature, robustness and reach of the theories proposed themselves depend on contributions from discussion and discourse.*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 88

individu (*person*) atau kepelakuan (*agency*) juga penting dalam upaya membangun masyarakat yang adil. Karenanya Sen kerap menyindir Rawls bahwa upaya yang ia perjuangkan sebenarnya bukan membangun masyarakat yang adil namun institusi yang adil. Kelemahan berikutnya ada pada asumsi kesempurnaan dalam penataan aturan sosial dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada lepasnya aturan dari para individu yang sudah menyepakati aturan-aturan tersebut dan anggapan bahwa apa yang dihasilkan bersifat final (paripurna).

Yang kedua, dengan menanggapi dan mengkritik pendekatan institusionalisme transendental, Sen menawarkan pendekatan yang dianggap lebih menjawab masalah ketidakadilan dalam masyarakat. Yang pertama, pendekatan keadilan Sen memerhatikan keragaman perspektif dan cara pandang masyarakat. Setiap masyarakat memiliki nilai dan cara pandang yang berbeda sehingga karenanya akan memengaruhi konsep ideal mereka mengenai keadilan. Yang kedua, pendekatan Sen mengafirmasi ketidaksempurnaan sehingga terbuka ruang bagi kita untuk menimbang ulang satu kesepakatan yang sudah dibuat. Tidak ada satu model keadilan yang paripurna sehingga karenanya setiap ide keadilan harus membuka diri untuk dievaluasi dan ditimbang kembali. Yang ketiga, pendekatan keadilan Sen tidak dimaksudkan untuk menghapus ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Yang ia upayakan adalah mengurangi ketidakadilan dan memajukan keadilan, bukan menghapus ketidakadilan.

Dari kesimpulan di atas, penulis akan mencoba masuk pada bagian inti dari tesis ini, yakni upaya Sen untuk menunjukkan ide keadilannya sebagai pendekatan yang dapat mengurangi ketidakadilan dan memajukan keadilan dalam masyarakat. Paling tidak ada dua hal besar mendasar yang saya anggap penting dalam menjawab ketidakmemadain pendekatan institusionalisme transendental. Yang pertama adalah signifikansi penalaran publik (*public reasoning*) sebagai prinsip epistemik dalam mencapai keadilan yang lebih terbuka. Yang kedua konsep Sen mengenai kapabilitas yang terkait dengan peran kebebasan. Bagi Sen kebebasan itu menjadi penting sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang dianggap bernilai (kebebasan dalam arti kesempatan) dan juga sebagai proses di mana orang atau masyarakat tidak dipaksa untuk menentukan hidup yang dianggap bernilai (kebebasan dalam arti proses). Dua pengertian kebebasan ini kemudian diterjemahkan dalam dua konsep penting, yakni kapabilitas dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*). Upaya yang perlu terus didorong agar ketidakadilan

dapat diminimalisasi adalah dengan semakin memperluas ruang kebebasan dalam pengertian di atas. Dua permasalahan ini akan diuraikan dalam bab 3 dan bab 4 berikut.

BAB 3

MEMBANGUN DASAR BAGI PLURALITAS NALAR

“Dalam meraih keadilan, ilusi posisional dapat menjadi rintangan serius yang harus diatasi melalui perluasan basis informasi ketika kita melakukan proses evaluasi...”⁵¹

Amartya Sen, *The Idea of Justice*

3.1. Pendahuluan

Ide keadilan yang mengklaim diri sebagai teori keadilan yang sempurna dan paripurna sehingga karenanya tidak perlu lagi mendengar perspektif keadilan yang lain, dalam pandangan Sen, dianggap sebagai sebuah gagasan yang sulit dipertahankan atas nama keadilan itu sendiri. Ide tentang keadilan bukanlah sebuah ide yang lepas dari diskusi bersama dengan yang lain. Karenanya, Sen sangat menekankan bahwa upaya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat menuntut siapapun untuk mendengar pandangan-pandangan lain bahkan mungkin yang berseberangan sekalipun namun memiliki kepentingan yang sama yakni upaya menegakkan keadilan. Sen tidak berpendapat bahwa dengan cara itu kita bisa sampai pada ide keadilan yang sempurna dan paripurna. Ia hanya mengatakan bahwa dengan memperluas perspektif maka kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik meski tidak sempurna. Dengan asumsi ini maka secara tegas ia menyatakan bahwa upaya yang dapat kita lakukan dalam memajukan keadilan adalah dengan mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat, bukan mewujudkan sebuah masyarakat adil yang paripurna.

Dalam pandangan Sen, upaya memperluas perspektif adalah bagian yang sangat esensial dalam pertimbangan mengenai yang adil dan tidak adil. Dalam pemahaman penulis, praktik perluasan perspektif menjadi upaya konkret pengurangan ketidakadilan karena telah bersikap adil terhadap perspektif yang lain. Karenanya salah satu isu penting yang sangat ditekankan dalam ide keadilan Sen adalah bagaimana memapankan dasar bagi praktik penalaran yang memungkinkan pluralitas nalar dapat berdiri secara setara. Tanpa dasar itu, sebuah nalar cenderung menganggap pandangan lain sebagai tidak lebih baik dari pandangannya sehingga ia kemudian menutup diri dari pandangan

⁵¹ *“In the pursuit of justice, positional illusions can impose serious barriers that have to be overcome through broadening the informational basis of evaluations...”* Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm.169

lain atau cenderung memaksakan konsep keadilannya untuk dipraktikkan oleh pihak lain yang sebenarnya memiliki pandangan berbeda mengenai keadilan. Membangun dasar penalaran publik yang memberi tempat bagi pluralitas nalar akan memungkinkan berbagai pandangan dan perspektif mengenai yang adil berdiri secara setara. Setiap ide ditempatkan sebagai gagasan yang memiliki hak setara untuk berargumen secara terbuka dengan gagasan-gagasan yang lain.

Dalam bab 3 ini penulis akan menguraikan gagasan Sen tentang praktik penalaran publik dan tuntutan untuk bersikap terbuka terhadap pluralitas pandangan. Secara khusus apa yang diuraikan dalam bab ini merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana pluralitas nalar ditanggapi dalam pendekatan komparatif. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama penulis perlu menjelaskan proses penalaran publik yang diajukan oleh Sen sendiri. Dari penelusuran yang penulis lakukan, paling tidak ada empat hal yang perlu dijelaskan dalam praktik penalaran publik. Pertama adalah kegiatan mempublikasikan alasan yang diyakini. Kedua, setelah melakukan publikasi nalar, setiap orang perlu melakukan transendensi dengan cara mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan pihak lain. Ketiga, penulis akan menguraikan gagasan aktivitas perluasan nalar sebagaimana yang ada dalam ide imparialitas terbuka. Yang terakhir adalah pertimbangan hasil komprehensif dari sebuah praktik penalaran publik.

Bagian berikutnya, setelah menjelaskan praktik penalaran publik, penulis merasa perlu menyinggung gagasan yang ada dalam teori pilihan sosial (*social choice theory*/SCT) dalam kaitannya dengan praktik diskusi publik dan pendekatan komparatif. Ada dua hal penting yang dapat dipahami sebagai implikasi dari SCT. Yang pertama adalah penerimaan terhadap pluralitas nalar dan yang kedua prinsip ketidaksempurnaan atau kesementaraan. Dalam bagian pluralitas nalar, penulis akan menjelaskan beberapa pertimbangan yang menuntut kita untuk mengakui adanya pluralitas nalar. Dan pada bagian akhir tulisan akan ditutup dalam sebuah rangkuman.

3.2.Tindakan Penalaran Publik

Membangun sebuah dasar yang memungkinkan pluralitas nalar atau rasionalitas dapat berdiri secara setara adalah salah satu imperatif penting dalam pendekatan komparatif Sen. Setiap nalar diandaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dan berkontribusi untuk memecahkan suatu persoalan. Dalam pandangan Sen, tindakan penalaran publik bertujuan menciptakan ruang yang dengannya keragaman nalar dapat

menemukan panggung untuk berkontestasi secara terbuka. Semakin banyak pandangan dan perspektif yang diakomodasi akan semakin baik sebuah proses penalaran publik. Ilustrasi Sen dalam pengantar buku *The Idea of Justice* tentang tiga orang anak, Bob, Carla dan Anne yang memperebutkan sebuah suling tidak dijawab dalam bentuk afirmasi. Sen nampaknya secara sengaja tidak mengafirmasi salah satu argumen yang disampaikan oleh tiga anak itu. Dalam pandangannya, praktik penalaran publik berperan besar dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Bob, Carla dan Anne.

Dalam uraian Sen mengenai proses penalaran publik, ada tiga tahap penting yang harus dilalui agar sebuah penalaran dapat mencapai level objektivitas etis.⁵² Pada tahap pertama, masing-masing dari tiga anak ini harus mengemukakan alasannya: atas dasar apa Bob, Carla dan Anne merasa berhak atas suling itu? Dalam ilustrasi itu dijelaskan bahwa Bob merasa berhak atas suling itu karena dia adalah anak yang paling miskin di antara mereka bertiga. Asumsi yang menopang argumen Bob adalah prinsip egalitarian. Sementara Carla beralasan bahwa dia adalah pembuat suling itu sehingga ia mengklaim kepemilikan suling yang sedang diperebutkan. Menurut Sen, prinsip yang melatari alasan Carla adalah prinsip libertarian. Yang terakhir, Anne, adalah anak yang paling pandai memainkan alat musik suling. Karena kemampuannya itu, ia merasa berhak untuk memiliki suling tersebut. Menurut Sen, asumsi yang menjadi sandaran argumen Anne adalah prinsip utilitarian-hedonis. Eksposisi alasan dan argumen mengapa Bob, Carla dan Anne mengklaim kepemilikan atas suling itu merupakan tahap pertama dari proses penalaran publik.

Pada tahap kedua, setelah mengemukakan alasan masing-masing, setiap anak harus mendengar baik-baik alasan yang dikemukakan oleh yang lain. Dalam hal ini, Bob harus mendengar argumen dan alasan yang dikemukakan oleh Carla dan Anne. Begitu juga Carla, ia harus mendengar alasan Bob dan Anne. Keharusan yang sama juga ditujukan pada Anne. Setiap orang tidak cukup jika hanya bersandar pada alasannya sendiri. Sikap untuk tidak peduli pada argumen yang lain dapat berakibat pada perilaku tidak adil terhadap hak dan pandangan lain yang juga berkepentingan dengan masalah yang sedang dihadapi. Selain itu, sikap ini juga akan menutup kemungkinan bagi mereka bertiga untuk mendapatkan satu solusi yang lebih komprehensif. Karenanya

⁵² Objektivitas etis lebih dimaksudkan sebagai penalaran yang tidak hanya bersandar pada argumen dari satu posisi saja, tetapi sudah melalui proses penalaran yang mempertimbangkan argumen-argumen yang berbeda. Lih. Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 39-44

untuk mendapatkan satu solusi yang lebih komprehensif dan menghindari perilaku tidak adil terhadap orang lain, Sen mendorong tiga anak ini untuk mendengar pertimbangan dari yang lain.

Sen nampaknya masih belum menganggap cukup dengan aplikasi tahap kedua ini sehingga ia mencoba melangkah lebih jauh dengan menawarkan tahap ketiga. Pada tahap ketiga, setelah saling mendengar pandangan di antara Bob, Carla dan Anne, tiga anak ini juga perlu memperluas jangkauan penalaran di luar mereka. Dalam pandangan Sen, pertimbangan mengenai keadilan tidak cukup dengan hanya mengandalkan pada imparsialitas yang terbatas. Sen menyebut model imparsialitas ini sebagai imparsialitas tertutup atau *closed impartiality*. Karena itu, tiga anak ini harus memperluas penalarannya dengan mengaplikasikan model imparsialitas terbuka (*open impartiality*). Dengan model imparsialitas terbuka, tiga anak ini perlu mendengar pandangan selain mereka bertiga. Alasan Sen, kepemilikan suling itu tidak hanya berimplikasi dan menjadi perhatian mereka bertiga, tetapi juga selain mereka bertiga. Karena itu, Bob, Carla dan Anne harus mendengar pandangan di luar mereka bertiga.

Tiga tahap penalaran publik ini menjadi prosedur penting dalam menganalisis sebuah persoalan, merencanakan sebuah kebijakan dan dalam mengambil keputusan. Bagi Sen, esensi dari proses penalaran publik adalah pelibatan setiap individu atau setiap pihak untuk menyampaikan pandangan, argumen dan juga kepentingannya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Bagi Sen, sebuah keputusan atas solusi yang lahir dari proses penalaran publik yang sudah mempertimbangkan berbagai suara jauh lebih adil dibanding keputusan yang langsung diputuskan dari atas tanpa pernah mendengar suara mereka yang memiliki kepentingan dengan masalah itu. Penilaian mengenai keadilan bukan soal penerapan satu prinsip yang sudah dianggap sempurna dan paripurna tanpa melihat persoalan real yang tengah dihadapi.

Model penalaran publik Sen adalah bagian dari proses pengambilan keputusan yang adil yang menuntut untuk mendengarkan suara-suara lain yang berkepentingan. Dalam hal ini Sen dengan tegas menggarisbawahi bahwa hasil dari penalaran publik komparatif ini pertama-tama tidak bermaksud untuk melahirkan sebuah solusi yang sempurna dan final. Baginya setiap keputusan yang dihasilkan selalu bersifat parsial dan tentatif. Karena itu, setiap saat ia bisa dievaluasi dan dipertimbangkan kembali. Sebuah

keputusan bisa cocok untuk ruang dan waktu tertentu namun tidak menjamin bahwa ia juga dapat diaplikasi pada ruang dan waktu yang lain.

Gagasan dasar yang ingin disampaikan Sen adalah bahwa model penalaran publik merupakan upaya untuk memperkecil dan mengurangi ketidakadilan yang ada dan yang mungkin terjadi. Tiga tahap penalaran publik Sen ini dapat dipahami sebagai koreksi dan tanggapan atas model penalaran publik dalam teori keadilan yang lain. Meski melakukan koreksi terhadap teori-teori keadilan yang ia kategorikan sebagai institusionalisme transendental namun elemen nalar (*reason*), objektivitas dan imparialitas tetap menjadi elemen dasar dalam ide keadilan Sen. Hal yang membedakan Sen dengan pemikir lain nampaknya adalah soal bagaimana Sen mengaplikasikan elemen-elemen dasar ini. Dalam pemahaman penulis, ide keadilan Sen justru mencoba mengaplikasikan elemen-elemen penting bagi teori keadilan ini dalam interpretasi seorang pluralis yang cukup radikal.⁵³

3.2.1. Publikasi Nalar

Dalam pandangan Sen, berpikir secara rasional bukanlah monopoli dari kebudayaan tertentu, dalam hal ini kebudayaan Barat. Kemampuan untuk berpikir secara rasional dan mengemukakan pikiran rasional itu dalam sebuah diskusi yang terbuka juga ada dalam kebudayaan India, Arab dan tradisi masyarakat non-Barat lainnya. Dalam penelusurannya mengenai peradaban besar di masa lalu, Sen berkesimpulan bahwa berpikir secara rasional bukanlah sesuatu yang asing dalam masyarakat Timur, sebagaimana yang ada dalam peradaban India dan Arab. Peran nalar dan penggunaannya secara publik telah menjadi elemen penting dalam membangun

⁵³ Rawls misalnya, berargumen bahwa nalar objektif dan imparial adalah kerangka dasar dalam melakukan penilaian mengenai yang adil. Baginya, elemen ini menjadi dasar dalam pemahaman tentang keadilan sebagai *fairness*. “*The reasoning that is sought in analysing the requirements of justice will incorporate some basic demands of impartiality, which are integral parts of the idea of justice and injustice. At this point there is some merit in summoning the ideas of John Rawls and his analysis of moral and political objectivity, which he presented in his defence of the objectivity of ‘justice as fairness’.* Rawls argues: ‘*The first essential is that a conception of objectivity must establish a public framework of thought sufficient for the concept of judgement to apply and for conclusions to be reached on the basis of reasons and evidence after discussion and due reflection.*’ He goes on to argue: ‘*To say that a political conviction is objective is to say that there are reasons, specified by a reasonable and mutually recognizable political conception (satisfying those essentials), sufficient to convince all reasonable persons that it is reasonable*’”, Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 42. Namun dalam pandangan Sen, prinsip objektivitas dan imparialitas yang diaplikasikan oleh Rawls dan para pemikir yang diinspirasi oleh teori kontrak sosial dianggap memiliki keterbatasan hanya pada mereka yang sudah terikat kontrak saja. Sebagaimana yang akan diuraikan dalam bab ini, Sen justru menuntut upaya perluasan perspektif imparial kepada mereka yang berada di luar kontrak tertentu.

peradaban besar di belahan dunia manapun.⁵⁴ Namun, Sen sangat sadar bahwa setiap kebudayaan memiliki rasionalitasnya sendiri yang tidak bisa dibaca melalui standar rasionalitas kebudayaan tertentu. Contoh yang ia angkat adalah pengertian rasionalitas dalam ekonomi yang dipahami sebagai tindakan yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan diri (*self-interest*). Menurutnya, pengertian mengenai rasionalitas tidak bisa dibatasi hanya pada tindakan yang mengabdikan untuk kepentingan diri. Baginya rasionalitas lebih didefinisikan sebagai pikiran masuk akal yang sudah direnungkan secara kritis dan dapat dikontestasikan secara publik. Secara sederhana dapat dikatakan seperti ini: sebuah tindakan dapat dikatakan rasional jika si pelaku dapat memberikan alasan yang masuk akal mengapa ia bertindak demikian. Dengan definisi ini Sen sebenarnya tengah memberikan satu dasar bagi pluralitas pandangan mengenai yang rasional sehingga setiap kebudayaan yang melewati proses berpikir rasional (dalam pengertian Sen) dapat berdiri secara setara dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain.

Secara eksplisit Sen menolak dengan tegas pembatasan pengertian berpikir secara rasional, atau lebih spesifik lagi teori pilihan rasional hanya dipahami sebagai tindakan maksimalisasi kepentingan diri. Dalam pandangannya, rasionalitas adalah soal pendasaran pilihan yang diambil pada nalar atau alasan yang dapat dipertahankan secara reflektif jika kita teliti lebih kritis. Berpikir secara rasional bukanlah pikiran yang muncul begitu saja tanpa pertimbangan nalar yang dapat dipertahankan. Apa yang disebut dengan pilihan rasional, dalam pandangan Sen, sebenarnya terkait dengan konformitas pilihan yang kita ambil dengan alasan kritis yang melatarinya (bdk. Sen, 2009:194).⁵⁵ Gagasan yang ingin ia sampaikan dalam pemahaman ini adalah bahwa sebuah pilihan dapat dikatakan rasional jika memiliki alasan yang dapat dikemukakan secara publik sehingga penalaran inter-subjektif menjadi mungkin.

Selain mengungkapkan satu cara berpikir argumentatif yang dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikontestasikan secara terbuka, proses penalaran, dalam pandangan

⁵⁴ Dalam penelusurannya mengenai kebudayaan besar non-Barat di masa lalu Sen berkesimpulan bahwa jalan nalar (*path of reason*) atau aturan akal (*the rule of the intellect*) merupakan penentu dalam menilai mengenai yang baik dan yang adil (Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm.39). Dan dalam argumen Sen, setiap manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional dan kemampuan untuk melakukan proses deliberasi publik. bdk. Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 43

⁵⁵ “Rationality of choice, in this view, is primarily a matter of basing our choices – explicitly or by implication – on reasoning that we can reflectively sustain if we subject them to critical scrutiny. The discipline of rational choice, in this view, is foundationally connected with bringing our choices into conformity with critical investigation of the reasons for that choice. The essential demands of rational choice relate to subjecting one’s choices – of actions as well as objectives, values and priorities – to reasoned scrutiny.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 180

Sen, juga mengasumsikan sebuah sikap peduli terhadap pandangan yang berbeda. Proses bernalar bukan hanya soal kemampuan mengemukakan pandangan dengan alasan yang rasional, tetapi juga sikap hormat dan toleran untuk mendengar pandangan dan kebudayaan yang berbeda.⁵⁶ Tanpa kemampuan untuk menghormati dan juga mendengar pandangan yang berbeda, sebuah kontestasi nalar hanya menjadi ajang pertunjukan argumen dan bukan pencarian hal terbaik dari beberapa pertimbangan. Dalam pandangan Sen, proses penalaran menekankan dua hal sekaligus: tujuan untuk memperoleh sebuah pertimbangan yang lebih baik; dan proses saling mendengar yang tidak mengabaikan sikap hormat dan toleran terhadap pandangan yang berbeda.

Bahkan dalam pengertian yang lebih prosedural, Sen sebenarnya tidak hendak memberikan sebuah jaminan bahwa proses penalaran publik akan menghasilkan pengertian yang dipastikan benar. Yang ia tekankan dari proses ini sebenarnya adalah kemampuan untuk mengkontestasikan gagasan secara publik dan kepedulian untuk mendengar pandangan yang berbeda. Dengan proses penalaran semacam ini, sebuah keputusan tidak didasarkan pada satu pandangan tertentu yang kemudian dipakai untuk yang lain tanpa pernah mendengar keinginan dan kepentingan orang lain itu. Dalam pandangan Sen, pertimbangan mengenai yang adil dan tidak adil memiliki kepedulian untuk mendengar suara-suara yang berbeda. Pertimbangan mengenai yang adil dan tidak adil harus didasarkan pada satu proses berpikir objektif yang melampaui satu pandangan tertentu dengan mendengar dan mempertimbangkan pandangan yang lain (Sen, 2009, 40-41).⁵⁷

3.2.2. Objektivitas Inter-Posisional

Penilaian mengenai keadilan mengandaikan satu proses objektif atas berbagai perspektif yang ada. Bertindak secara objektif berarti bahwa sebuah pertimbangan tidak bersandar hanya pada satu perspektif saja. Keyakinan besar pada satu posisi yang dipegang tanpa pernah mendengar perspektif yang lain dipahami sebagai ilusi

⁵⁶ “Reasoning can be concerned with the right way of viewing and treating other people, other cultures, other claims, and with examining different grounds for respect and tolerance. We can also reason about our own mistakes and try to learn not to repeat them...”, Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 46-47

⁵⁷ “It is plausible to think...for choosing the best reasoned procedure, even though there is no guarantee that it would be invariably right, and not even any guarantee that it would be always more right than some other, less reasoned, procedure... The case for reasoned scrutiny lies not in any sure-fire way of getting things exactly right, but on being as objective as we reasonably can. What lies behind the case for relying on reasoning in making ethical judgements are, I would argue, also the demands of objectivity, and they call for a particular discipline of reasoning. The important role given to reasoning in this work relates to the need for objective reasoning in thinking about issues of justice and injustice.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 40-41

objektivitas (*objective illusion*).⁵⁸ Dalam pandangan Sen, tindakan semacam ini dianggap menyia-nyiaikan momen penting dalam menilai mengenai yang adil, yakni melakukan komparasi pandangan dan argumen. Untuk mengatasi ilusi objektif, seseorang harus mampu melampaui perspektifnya dengan mendengar dan mempertimbangkan perspektif yang lain. Tanpa itu, ia akan terjebak pada sudut pandang tertentu dan absen dari pertimbangan-pertimbangan lain. Pertimbangan mengenai keadilan, bukan soal keyakinan pada kebenaran dari perspektif tertentu tetapi lebih pada kemampuan untuk mendengar perspektif yang beragam dan mempertimbangkannya secara kritis.⁵⁹

Salah satu hal terpenting yang harus dilakukan ketika membuat penilaian mengenai yang adil dan tidak adil adalah melakukan kontestasi nalar secara terbuka atau proses penalaran publik. Agar penalaran publik menjadi mungkin, maka harus ada ruang di mana setiap pertimbangan yang berkepentingan mengenai satu hal dapat diakomodasi tanpa dibatasi oleh batasan formal tertentu. Dalam penalaran publik, sangat penting bagi setiap pihak untuk melakukan upaya transendensi nalar dari posisi tertentu. Upaya untuk keluar dari posisi yang selama ini dipegang dan kemudian ada kemauan untuk mendengar dan mempertimbangkan perspektif yang lain menjadi prosedur penting dalam penilaian mengenai ketidakadilan. Sen, menyebut upaya ini sebagai bagian dari sikap objektivitas etis.⁶⁰

Sen tampaknya cukup sadar bahwa tidak mudah bagi siapapun untuk melangkah keluar dari posisi yang selama ini diyakini dan dipeluk dengan erat. Namun sikap yang hanya bertitik tolak pada pandangan yang selama ini diyakini tanpa ada kemauan untuk mendengar pandangan yang lain akan menutup kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Selain itu, dalam pertimbangan mengenai keadilan yang dengan sendirinya akan berimplikasi luas, sebuah posisi yang hanya bersandar pada satu pandangan tertentu akan berakibat pada ketidakadilan bagi yang lain. Kepedulian untuk

⁵⁸ Dalam menjelaskan ilusi objektif (*objective illusion*), Sen memberikan sebuah ilustrasi tentang orang yang berpendapat bahwa ukuran bulan dan matahari adalah sama. Pandangan yang pada awalnya dianggap objektif oleh orang yang meyakini kemudian dikoreksi dengan pandangan yang sudah mempertimbangkan jarak objek dan proyeksi. Kekeliruan pandangan yang meyakini bahwa ukuran bulan dan matahari adalah sama didapat setelah orang tersebut melakukan transendensi pandangannya dan mendengar pandangan yang lain. Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm.162-163

⁵⁹ "...I will take reasoned scrutiny from different perspectives to be an essential part of the demands of objectivity for ethical and political convictions." Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 45

⁶⁰ "The demands of ethical objectivity, it was argued, relate closely to the ability to stand up to open public reasoning, and this, in turn, has close connections with the impartial nature of the proposed positions and the arguments in their support." Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm.122

mendengar dan mempertimbangkan pandangan yang lain dapat mengurangi kemungkinan tindakan tidak adil terhadap yang lain.⁶¹

Untuk mencapai titik yang disebut sebagai adil, Sen sangat menekankan upaya perluasan basis informasi yang akan dievaluasi.⁶² Semakin luas bahan informasi yang didapat akan semakin baik seseorang dalam menilai. Tuntutan untuk mempertimbangkan beragam perspektif mengenai satu hal harus dipahami dalam kerangka tuntutan keadilan komparatif. Pendekatan keadilan komparatif menuntut agar dalam pengambilan keputusan tidak hanya bersandar pada satu pandangan saja, tetapi sudah melakukan perluasan perspektif agar hasil yang dicapai dapat lebih komperhensif.

3.2.3. Imparsialitas Terbuka

Gagasan dasar Imparsialitas terbuka (*open impartiality*) ada dalam upaya perluasan perspektif yang tidak hanya menerima interpretasi dari kelompok yang terbatas. Dengan gagasan ini, Sen sebenarnya tengah mengkritik model imparsialitas Rawls yang membatasi hanya pada mereka yang terlibat dalam satu kontrak sosial tertentu. Bagi Sen, model imparsialitas Rawls dan imparsialitas yang diinspirasi oleh teori kontrak sosial pada umumnya disebut sebagai imparsialitas tertutup (*closed impartiality*). Model imparsialitas tertutup, dalam pandangan Sen, tidak lagi memadai. Menurutnya, daya jangkau keadilan seharusnya tidak dibatasi hanya pada mereka yang disebut sebagai warganegara. Bila kita menerima prinsip kemanusiaan sebagai postulat, maka seharusnya pertimbangan mengenai keadilan dapat melampaui ikatan kewarganegaraan. Ketidakmemadaian konsep imparsialitas tertutup adalah karena hanya membatasi pertimbangan keadilan dari mereka yang masuk dalam kelompok warganegara. Sen ingin mengatasi masalah ini dengan model yang ia sebut imparsialitas terbuka (*open impartiality*). Gagasan mengenai imparsialitas terbuka ini datang dari konsep *impartial spectator* Adam Smith dalam buku *The Theory of Moral Sentiments*. Menurut Smith:⁶³

⁶¹ “The need to transcend the limitations of our positional perspectives is important in moral and political philosophy, and in jurisprudence. Liberation from positional sequestering may not always be easy, but it is a challenge that ethical, political and legal thinking has to take on board.”, Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 155

⁶² “In the pursuit of justice, positional illusions can impose serious barriers that have to be overcome through broadening the informational basis of evaluations...” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 169

⁶³ “We can never survey our own sentiments and motives, we can never form any judgment concerning them; unless we remove ourselves, as it were, from our own natural station, and endeavour to view them as at a certain distance from us. But we can do this in no other way than by endeavouring to view them

Kita tidak pernah bisa mengamati sentimen dan motif kita sendiri, kita tidak pernah bisa membuat satu penilaian atas sentimen dan motif (kita sendiri, pen.); kita bisa melakukan itu jika kita menyingkirkan diri kita sendiri, sebagaimana dia ada, dari tempat alamiah kita, dan berusaha melihatnya dari jarak tertentu. Namun kita dapat melakukan upaya ini hanya melalui mata orang lain, atau sebagai orang lain yang melihat dirinya.

Dengan menggunakan konsep *impartial spectator*, Sen membangun pemahaman bahwa dalam menganalisis sebuah persoalan, satu komunitas tidak bisa mengandalkan hanya pada persepsi orang-orang tertentu yang sudah dibatasi. Penilaian tentang ketidakadilan harus melibatkan partisipan yang lebih dari hanya sekadar mereka yang disebut sebagai warga dari negara tertentu.⁶⁴ Mengapa demikian? Paling tidak ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Sen. Pertama, dengan melibatkan pihak yang lebih luas maka satu komunitas akan mendapat persepsi yang lebih bervariasi daripada jika hanya mengambil dari persepsi yang terbatas. Kedua, karena pilihan yang akan diambil dapat dipastikan akan berpengaruh pada orang lain di luar kelompok itu. Ketiga, barangkali dengan memperhatikan perspektif dari luar akan dapat membantu satu kelompok dalam mengatasi persoalan parokial yang tengah dihadapi.⁶⁵

Peran *impartial spectator*, dalam pandangan Sen, bukan sebagai penengah yang memediasi perbedaan pandangan yang ada. *Impartial spectator* ini lebih didorong untuk menjadi pembanding yang dapat memberikan kontribusi bagi satu kelompok dalam memahami ketidakadilan. Keterlibatan mereka tentu bukan lagi sebagai pengamat yang datang dari luar, namun sudah ditempatkan sebagai orang yang memiliki kapasitas untuk memberikan pendapat tentang sesuatu. Perspektif mereka juga bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam proses pertimbangan.⁶⁶ Dengan demikian, posisi mereka bukanlah posisi sekunder yang tidak terlalu diperhitungkan. Bagi Sen, analisa mengenai keadilan harus melampaui batas-batas kewarganegaraan dengan mencapai level pertimbangan kemanusiaan yang lebih luas.

with the eyes of other people, or as other people are likely to view them.” Smith, 2004, *The Theory of Moral Sentiments*, hlm. 128

⁶⁴ Menurut Sen, gagasan utama dalam konsep *impartial spectator* Smith adalah kebutuhan untuk mempertimbangkan sudut pandang yang lebih luas. bdk. Sen 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 45

⁶⁵ “...assessment of justice demands engagement with the ‘eyes of mankind’, first, because we may variously identify with the others elsewhere and not just with our local community; second, because our choices and actions may affect the lives of others far as well as near; and third, because what they see from their respective perspectives of history and geography may help us to overcome our own parochialism.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 130

⁶⁶ “They come in not as arbitrators but as people whose reading and assessment help us to achieve a less partial understanding of the ethics and justice of a problem, compared with confining attention only to the voices of those who are directly involved.” Sen 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 131

Dalam pemahaman Sen, pelibatan mereka yang disebut sebagai *impartial spectator* adalah juga menjadi bagian dari pencarian kritis dalam proses penalaran publik.⁶⁷

3.2.4. Hasil Komprehensif

Tentang bagaimana sebuah penalaran publik berlangsung, Sen mengangkat ilustrasi yang cukup bagus dari perdebatan antara Arjuna dan Krishna dalam cerita *Bhagavad Gita* tentang rencana perang terhadap para Kurawa – yang telah merebut kerajaan Astina. Arjuna menolak untuk berperang karena akibat yang mengerikan dan pedih dari sebuah peperangan. Kematian, kehilangan dan kehancuran menjadi pertimbangan penolakannya untuk memerangi para Kurawa. Menurut Sen, pertimbangan yang diajukan oleh Arjuna dikategorikan sebagai pertimbangan konsekuensial, yakni pertimbangan yang memerhatikan akibat dari sebuah tindakan. Sementara Krishna mengingatkan Arjuna bahwa ia adalah seorang jenderal yang memiliki tugas untuk menumpas para Kurawa yang telah merebut kerajaan. Krishna tidak memerhatikan akibat yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas tersebut. Pertimbangan Krishna dikategorikan sebagai argumen deontologis, yakni pertimbangan yang menekankan kewajiban, bukan konsekuensi.

Apa yang dilakukan oleh Arjuna dan Krishna adalah sebuah proses penalaran publik pada level pertama, yakni setiap pihak mengemukakan pendapat dan alasannya mengenai sesuatu, dalam hal ini rencana memerangi Kurawa. Namun baik Arjuna dan Krishna tidak bisa hanya bertitik tolak dari pandangan dan pertimbangannya sendiri. Dalam praktik pengambilan keputusan sangatlah naif bila hanya bersandar pada satu argumen. Argumen deontologis Krishna, dalam hal ini, tidak bisa mengabaikan pertimbangan konsekuensi yang disampaikan oleh Arjuna. Hal yang sama, Arjuna juga tidak hanya bertitik tolak dari pertimbangan konsekuensi perang yang mengerikan saja. Ia juga harus mempertimbangkan tugasnya sebagai seorang Jenderal (Sen, 2009:216). Lebih dari itu, dalam praktik komparatif, pendekatan keduanya juga harus diperkaya dengan pertimbangan-pertimbangan baru di luar pertimbangan Arjuna dan Krishna.

Lepas dari fakta epik Ramayana yang pada akhirnya memenangkan argumentasi Krishna, sebenarnya ada langkah yang bisa dilanjutkan setelah keduanya saling mendengar satu sama lain, yakni pertimbangan-pertimbangan eksternal yang dapat memperbaiki kekurangan keduanya. Sen mengartikulasikan kembali argumen Arjuna

⁶⁷ “The Smithian ‘impartial spectator’ is, of course, a device for critical scrutiny and public discussion.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 135

dengan perspektif yang lebih kaya dan yang kemudian menjadi pertimbangan penting dalam realisasi sosial. Ada tiga hal penting yang ia angkat dari argumen Arjuna. Yang pertama perhatiannya pada kehidupan manusia (*the significance of human lives*). Pilihan untuk berperang memiliki konsekuensi yang sangat besar pada kehidupan umat manusia dan dunia (*the relevance of the actual world*). Kematian, kehilangan dan kehancuran adalah implikasi yang sangat nyata dari perang. Sen menyebut pertimbangan ini sebagai proses yang harus diperhatikan ketika sebuah keputusan diambil. Sebuah keputusan selalu berimplikasi pada kehidupan dan kemanusiaan. Yang kedua, Arjuna sangat menekankan aspek tanggung jawab dari pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas dan kewajiban adalah satu hal yang perlu dipertimbangkan, namun akibat yang dilahirkan dari pelaksanaan tugas juga harus dipikirkan secara mendalam. Pandangan deontologis hanya memerhatikan aspek kewajiban dan mengabaikan konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban tersebut. Sen menyebut ini sebagai pertimbangan kepelakuan (*agency*). Dan yang ketiga adalah pertimbangan relasional, di mana orang-orang yang akan diperangi adalah masih bagian dari keluarga Baratayuda. Bagaimanapun sebuah keputusan publik selalu berurusan dengan relasi, baik yang personal maupun impersonal (Sen, 2009:212-214). Beberapa pertimbangan ini menjadi variabel penting dalam pertimbangan realisasi sosial.

Melalui eksplorasi lebih jauh atas argumen Arjuna, Sen sebenarnya tengah menyampaikan pesan bahwa sebuah diskusi pada akhirnya akan sampai pada keputusan. Menurutnya, sebuah keputusan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kewajiban dan konsekuensi yang naif. Dalam mengambil keputusan, ia sangat menggarisbawahi aspek realisasi dari keputusan tersebut. Melalui gagasan tentang *realisasi*, Sen menggarisbawahi pentingnya pertimbangan konsekuensi dalam sebuah keputusan. Hanya saja, dalam realisasi sosial, ia membedakan dengan tegas antara hasil kulminasi (*culmination outcome*) dan hasil komprehensif (*comprehensive outcome*). Biasanya apa yang disebut hasil adalah apa yang muncul dari sebuah keputusan yang diambil.⁶⁸ Pengertian hasil (*outcome*) ini harus dibuat lebih detail, karena hasil kulminasi hanya mendasarkan pada titik akhir sementara hasil komprehensif mempertimbangkan proses

⁶⁸ “*The outcome is meant to be the state of affairs that results from whatever decision variable we are concerned with, such as action or rule or disposition.*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 215

memilih itu sendiri.⁶⁹ Dalam hasil komprehensif seseorang perlu memasukkan seluruh informasi mengenai kepelakuan (*agency*) yang relevan serta relasi personal dan impersonal yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan (Sen, 2009:215)

Dalam uraian mengenai teori keputusan dan pilihan rasional, Sen menjelaskan bahwa dalam pertimbangan hasil komprehensif, seseorang perlu mempertimbangkan tindakan yang akan diambil, pelaku yang terlibat, dan proses yang digunakan. Pertimbangan ini menjadi elemen utama dari realisasi sosial. Secara tegas, dalam realisasi ada tiga hal penting yang perlu dipertimbangkan: proses, kepelakuan dan relasi.⁷⁰ Dalam pelaksanaan sebuah keputusan seseorang harus memperhitungkan bagaimana tindakan itu diambil. Pada level ini, implikasinya terhadap kehidupan dan dunia menjadi pertimbangan utama. Penolakan Arjuna untuk berperang adalah karena memiliki implikasi yang sangat besar bagi kehidupan. Bagi Sen, kehidupan manusia jauh lebih penting daripada hanya sekadar pelaksanaan kewajiban. Pada level kepelakuan, Sen menekankan soal tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas atau kebijakan. Seseorang tidak bisa hanya bersandar pada argumen pelaksanaan kewajiban dan tugas seraya mengabaikan bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban juga menuntut adanya tanggung jawab. Sementara dalam pertimbangan relasi, pelaksanaan keputusan selalu berimplikasi pada relasi personal dan juga impersonal. Bagi Sen, pertimbangan relasi menjadi salah satu pertimbangan penting sebagaimana pertimbangan mengenai kepelakuan (tanggung jawab). Ia mengakui bahwa pertimbangan relasi kerap diabaikan dalam pertimbangan etis, namun menurutnya untuk sampai pada pertimbangan yang lebih luas, implikasi terhadap relasi juga perlu dipertimbangkan lebih jauh dalam gagasan mengenai realisasi sosial (Sen, 2009:211-221).

3.3. Pendekatan Komparatif dan Teori Pilihan Sosial

Teori pilihan sosial (*Social Choice Theory/ SCT*) memiliki perhatian pada prinsip-prinsip yang mendasari pilihan ketika di dalam sebuah kelompok terdapat perbedaan minat atas beberapa pilihan yang tersedia.⁷¹ Dalam arti ini, SCT dapat dilihat

⁶⁹ "In particular, the state of affairs, or the outcome in the context of the choice under examination, can incorporate processes of choice, and not merely the narrowly defined ultimate result." Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 215

⁷⁰ "The idea of social realizations, as has been explained earlier, demands that outcomes be seen in these broader terms, taking note of actions, relations and agencies." Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 217

⁷¹ Di antara mereka yang telah berjasa besar dalam mengembangkan teori pilihan sosial adalah the Marquis de Condorcet (1743-1794) dan Kenneth Arrow (1921-).

sebagai model yang dipakai untuk merefleksikan kaitan pilihan individu dan pilihan sosial.⁷² Secara praktis, SCT sebenarnya banyak berurusan dengan prinsip agregasi pilihan di dalam sebuah diskusi bersama. Pada tingkat yang lebih umum, teori pilihan sosial banyak diaplikasikan dalam pengambilan satu kebijakan yang dilakukan oleh komite tertentu, pengambilan keputusan politik atau kebijakan yang mempertimbangkan ekonomi kesejahteraan (Roberts, 2010:115).

SCT dan praktik diskusi secara terbuka menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan keduanya menjadi penopang bagi pendekatan keadilan komparatif Sen. Dalam pandangan Sen, SCT dan diskusi secara terbuka membantu kita menganalisis pilihan-pilihan yang dapat diambil. Melalui keduanya kita dituntut untuk terlibat secara langsung dengan masalah yang dihadapi dan melihat persoalan-persoalan yang harus diatasi. Keterlibatan secara langsung ini sangat penting mengingat tidak semua masalah yang dihadapi masyarakat bisa diselesaikan dengan perspektif yang cenderung mengeneralisasi. Proses ini menurut Sen sangat berbeda dengan pendekatan transendental yang mengabaikan keragaman masalah dan tidak terlibat dengan masalah yang dihadapi secara langsung. Kecenderungan dalam pendekatan transendental adalah menggeneralisasi persoalan dan dalam menawarkan solusi cenderung melompat pada tawaran atau solusi yang paripurna (Sen, 2009: 96).

Dengan kata lain, ketika menghadapi masalah ketidakadilan dalam masyarakat, pendekatan transendental cenderung menawarkan resep-resep sempurna dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan mengaplikasikan resep-resep tersebut, pendekatan transendental berasumsi bahwa masyarakat yang menghadapi masalah dipastikan akan keluar dari masalah ketidakadilan yang sedang dihadapi. Sebaliknya, pendekatan komparatif Sen lewat SCT mencoba turun ke tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi masalah dan melibatkan mereka dalam proses diskusi mengenai pilihan putusan yang akan diambil. Kebijakan yang diambil dalam pendekatan ini lebih pada upaya mengangkat masyarakat ke tingkat yang lebih adil dari yang sebelumnya.

Sen menepis anggapan bahwa SCT tidak bisa menjadi alat bagi pertimbangan nalar praktis (*practical reason*), dan ia menilai bahwa anggapan tersebut adalah keliru. Anggapan tersebut muncul karena sebagai sebuah teori, SCT sebenarnya berkembang

⁷² “Social choice theory is “concerned with relationships between individuals’ preferences and social choice”” Sen, “Social Choice Theory: A Re-Examination”, dalam *Econometrica*, hlm. 53

sebagai bagian dari teori matematika. Namun Sen menunjukkan bahwa SCT bisa menjadi alat untuk menganalisis masalah nalar praktis (persoalan-persoalan etis dan kebijakan). Menurut SCT melihat secara mendalam dasar rasional dari pertimbangan sosial dan keputusan publik dalam memilih pilihan-pilihan sosial. Yang dihasilkan dari prosedur teori pilihan sosial adalah urutan atau daftar cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat masalah tersebut.⁷³

Sen mengambil contoh penekanan yang dilakukan Condorcet, ahli Matematika berkebangsaan Perancis yang hidup di masa revolusi 1789, terhadap perbaikan pendidikan kaum perempuan. Menurut SCT penekanan perbaikan pendidikan ini memiliki relasi dengan pengakuan akan pentingnya suara kaum perempuan dalam persoalan publik. Peran suara kaum perempuan pada gilirannya akan membuat kita perlu memerhatikan pendidikan untuk mereka dan karenanya akan semakin meningkatkan keadilan dalam masyarakat (bdk. Sen, 2009:111-112). Bagi Sen, hubungan mendasar antara penalaran publik dengan tuntutan terhadap putusan sosial partisipatif sangat penting, tidak hanya membuat demokrasi menjadi lebih efektif tetapi juga menjadi pendasaran konseptual ide tentang keadilan atas tuntutan pilihan sosial dan *fairness* (Sen, 2009:112-113).

Sen menunjukkan bagaimana SCT memiliki relevansi bagi teori keadilan. Paling tidak ada tujuh poin relevansi SCT bagi teori keadilan, khususnya dalam realisasi sosial (Sen, 2009:106-111). Yang pertama, SCT berfokus pada model komparatif, bukan transendental. Dalam pandangan Sen, SCT memberikan beberapa pertimbangan komparatif untuk memecahkan satu persoalan yang sedang dibahas. SCT memberikan kerangka nalar praktis dari setiap pertimbangan yang ditawarkan. Bagi Sen, penilaian mengenai keadilan adalah soal pilihan keputusan atas masalah yang dihadapi, bukan lompatan pada satu spekulasi mengenai masyarakat adil yang paripurna. Yang kedua, SCT memberikan pengakuan terhadap pluralitas nalar dan tidak bisa menghindar dari realitas nalar yang plural tersebut. Menurut Sen, teori pilihan sosial juga memberikan ruang bagi pluralitas nalar yang saling bertentangan satu sama lain. Konsekuensi dari pengakuan ini bisa jadi akan membawa kita pada kebuntuan (*deadlock*). Namun yang

⁷³ “As an evaluative discipline, social choice theory is deeply concerned with the rational basis of social judgements and public decision in choosing between social alternatives. The outcomes of the social choice procedure take the form of ranking different states of affair from a ‘social point of view’, in the light of the assessment of the people involved.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 95

paling penting dari proses ini adalah bahwa tidak ada satu prinsip nalar yang merasa dinegasi dalam merespon satu persoalan yang dihadapi bersama (Sen, 2009:106).

Yang ketiga, SCT selalu memberi ruang dan menuntut pengujian kembali atas sesuatu yang pernah dihasilkan. Satu pilihan yang pernah diambil mungkin tidak akan menjadi pilihan lagi untuk masa yang akan datang. Karena hal ini, teori pilihan sosial selalu memberikan kemungkinan untuk mengevaluasi pilihan yang pernah diambil. Dengan demikian tidak ada pilihan yang konstan atas satu masalah yang berlaku universal di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, SCT juga memberi ruang bagi resolusi parsial. Dalam pandangan Sen, teori keadilan seharusnya memberi ruang bagi ketidaksempurnaan, baik dalam arti asertif (*assertive*) maupun tentatif (*tentative*). Dalam arti asertif, pilihan atas satu masalah memang diasumsikan sulit untuk bisa sampai pada pilihan adil yang paripurna, sementara dalam arti tentatif, satu pilihan selalu berarti bahwa pilihan itu baik untuk saat itu, sambil kita terus memperbaiki model pilihan tersebut hingga menjadi lebih baik (Sen, 2009:107-108).

Yang kelima SCT memberikan tempat bagi keragaman interpretasi dan pandangan. Menurut Sen, struktur formal teori pilihan sosial yang dipandu oleh beberapa aksioma, antara prioritas individu dan konklusi sosial, harus terbuka pada interpretasi yang beragam. Bahkan pandangan satu orang yang didasari pada kepentingannya sendiri bisa jadi akan memberi inspirasi sebuah diskusi, apalagi seseorang yang membawa kepentingan kelompoknya. Kerangka yang ada dalam SCT menurut Sen memberi kemungkinan kepada kita untuk menerima ragam pandangan dan pemahaman yang didasari oleh ragam alasan, perspektif dan prioritas. Yang keenam, SCT menekankan proses penalaran yang tepat. Hal terpenting dalam teori pilihan sosial adalah memberikan alasan dari setiap pandangan atau pendapat yang diberikan. Alasan yang diberi bisa menjadi kontribusi penting dalam mempertimbangkan pilihan keputusan yang diambil. Setiap pandangan selalu menyiratkan satu nilai tertentu yang perlu dieksplisitkan. Menurut Sen, teori pilihan sosial memiliki kemampuan untuk mendengar penalaran dan alasan dari sesuatu (Sen, 2009:108-110).

Dan yang ketujuh SCT memberikan panduan dalam proses penalaran publik yang dilakukan. Menurut Sen, meski teori pilihan sosial banyak digunakan oleh ahli matematika, namun ia memiliki peran besar dalam memandu penalaran publik. Dalam SCT, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pandangan secara setara dan juga keharusan untuk toleran dan hormat terhadap pandangan dan hak orang lain. Setelah

kita mendengar beragam pandangan atas satu masalah, terbuka kemungkinan bagi kita untuk mempertimbangkan pandangan yang sudah kita yakini selama ini. Dengan demikian melalui SCT terjadi pertukaran ide yang berlangsung secara setara dan saling menghormati (Sen, 2009:110-111).

Dari tujuh relevansi teori pilihan sosial bagi pertimbangan keadilan komparatif pada level realisasi sosial, paling tidak ada dua gagasan utama yang dapat dieksplorasi lebih jauh yakni prinsip pluralitas dan ketidaksempurnaan. Yang dimaksud dengan prinsip pluralitas adalah penerimaan dan pencarian keragaman, sementara prinsip ketidaksempurnaan adalah penerimaan bahwa hasil yang dicapai selalu bersifat tentatif dan kemudian mendorong satu komunitas pengambil kebijakan untuk selalu mengevaluasi hasil yang sudah dicapai dan memperkayanya dengan informasi-informasi yang lebih luas.

3.4. Prinsip Pluralitas dalam Pendekatan Komparatif

Ide mengenai keadilan, menurut Sen, memerlukan pertimbangan dari perspektif yang beragam, bukan perspektif yang tunggal. Dengan perspektif yang beragam diharapkan ada pertukaran gagasan sehingga memungkinkan kita untuk mempertimbangkan pandangan-pandangan lain yang berbeda. Model praktik diskusi yang menggunakan proses penalaran publik sebagaimana yang sudah diuraikan di atas menjadi langkah penting yang harus dilalui ketika menganalisis masalah ketidakadilan. Dalam pandangan Sen, pemahaman kita mengenai keadilan bukanlah hasil renungan kita seorang diri. Ketika kita membuat penilaian mengenai sikap atau jenis masyarakat yang tidak adil, kita perlu mendengar dan memerhatikan pandangan lain yang bisa jadi dapat memberikan catatan atau revisi atas kesimpulan yang kita buat. Begitu juga sebaliknya ketika seseorang membuat pertimbangan mengenai ketidakadilan, kita juga perlu menyampaikan pandangan tentang prioritas dan cara berpikir kita.⁷⁴

Sebagai konsekuensi dari keniscayaan berpikir ini, teori keadilan dalam pandangan Sen tidak bersifat monolitik. Ia membuka ruang bagi berbagai pandangan

⁷⁴ “*Understanding the demand of justice is no more of a solitarist exercise than any other human discipline. When we try to assess how we should behave, and what kind of societies should be understood to be patently unjust, we have reason to listen and pay attention to the views and suggestions of others, which might or might not lead us to revise our own conclusions. We also attempt, frequently enough, to make other pay some attention to our priorities and our ways of thought, and in this advocacy we sometimes succeed, while at other times we fail altogether. Not only are dialogue and communication part of the subject matter of the theory of justice, it is also the case that the nature, robustness and reach of the theories proposed themselves depend on contributions from discussion and discourse.*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 88

mengenai keadilan untuk dikontestasikan. Karenanya kecenderungan untuk menganggap bahwa hanya ada satu teori keadilan dianggap tidak lagi memadai. Dalam pemahaman Sen, kecenderungan ini terjadi pada teori keadilan Rawls yang mengasumsikan bahwa agar suatu masyarakat dapat disebut adil (*just society*) maka para anggotanya harus mengaplikasikan teori keadilan yang ia tawarkan. Teori keadilan Rawls tentu saja penting namun belum cukup untuk menjawab masalah ketidakadilan. Karenanya diperlukan komparasi teori keadilan agar kelemahan teori Rawls dapat diatasi oleh teori yang lain. Aplikasi yang hanya mendasarkan pada teori keadilan Rawls akan mengabaikan metode komparatif yang oleh Sen dianggap sebagai sesuatu yang absen dalam teori keadilan Rawls, dan tentu saja pada teori-teori keadilan lain yang bercorak institusionalis transendental (bdk. Sen, 2009:90).

Gagasan dasar dari prinsip pluralitas dalam pendekatan komparatif Sen adalah keterbukaan dan pencarian aktif pada pandangan yang berbeda. Pertimbangan dan analisis mengenai keadilan tidak lagi cukup bila hanya mengandalkan satu model teori tertentu. Terlalu naif bagi seorang analis atau pengambil kebijakan bila hanya mengandalkan satu model teori untuk memecahkan persoalan ketidakadilan yang sangat kompleks. Karena itu, agar tidak jatuh dalam kepicikan, Sen menawarkan model komparatif yang mendorong seseorang untuk memperluas perspektif atas satu masalah. Perluasan perspektif dan sudut pandang ini ditopang oleh prinsip pluralitas yang mengakui adanya banyak model dalam membaca realitas. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pertimbangan pluralitas yang disinggung oleh Sen. Beberapa model pluralitas ini saling terhubung satu sama lain dan memiliki ikatan yang erat sehingga tidak bisa dipisahkan. Paling tidak ada empat prinsip pluralitas yang perlu dipertimbangkan dan menjadi indikator kuat tentang signifikansi kerangka berpikir pluralis dalam pendekatan komparatif. Empat pertimbangan pluralitas yang penulis simpulkan dari beberapa literatur yang ditulis oleh Sen adalah: pluralitas informasi; pluralitas posisi; pluralitas rasionalitas; dan pluralitas nalar imparsial.

3.4.1. Pluralitas Informasi

Setiap prinsip moral selalu mengandaikan informasi yang menopang prinsip itu sendiri. Dengan informasi itu, satu prinsip moral akan melakukan tindakan universalisasi atas setiap persoalan yang ada.⁷⁵ Menurut Sen, setiap variabel informasi

⁷⁵ Yang dimaksud dengan informasi di sini adalah elemen dasar yang kemudian menjadi pertimbangan utama dari sebuah prinsip moral. Dalam pandangan utilitarian misalnya, informasi yang menjadi

yang dipakai dalam satu prinsip moral sebenarnya, diakui atau tidak diakui, secara implisit mengandung keterbatasan (*informational constraint*). Keterbatasan itu terjadi akibat tindakan universalisasi itu sendiri: satu prinsip moral dipakai untuk membaca semua persoalan. Padahal setiap persoalan perlu didekati dengan cara yang berbeda-beda. Dengan melakukan tindakan universalisasi prinsip moral tertentu untuk semua persoalan, seseorang sebenarnya telah melakukan penelusuran non-komparatif (*invariance requirement*), yakni dengan hanya bersandar pada perspektif informasi prinsip moral bersangkutan (Sen, “*Well-being, Agency and Freedom*” [WAF],169-170). Bagi Sen, model penelusuran ini telah mengabaikan tahapan penting untuk mencapai objektivitas inter-posisional karena telah menutup suara dan pandangan yang berbeda-beda.

Dalam “*Well-Being, Agency and Freedom*”, Sen memberikan contoh kasus pada prinsip moral utilitarian. Menurutnya, dalam prinsip moral utilitarian, mereka hanya mempertimbangkan konsekuensi tindakan (*act consequentialism*), manfaat (*welfarism*) dan penjumlahan total (*sum ranking*), dan tidak mempertimbangan informasi di luar itu (Sen, WAF, 175). Masalahnya, menurut Sen setiap tempat dan setiap zaman memiliki masalah yang berbeda-beda yang tidak cukup dilihat dengan hanya satu perspektif tunggal. Sen sendiri mengutip pengakuan Henry Sidgwick atas keterbatasan informasi (*informational constraint*): “jika sebuah panduan cocok (atau keliru) untuk saya tidak berarti juga cocok (atau keliru) untuk orang lain, ia harus mempertimbangkan perbedaan yang ada di antara dua kasus tersebut, selain fakta bahwa saya dan dia adalah dua orang yang berbeda”.⁷⁶

Dalam kesimpulan Sen, model pendekatan yang dipakai dalam utilitarianisme masuk dalam kategori monisme. Sementara model pendekatan yang ingin ia ajukan adalah pluralisme: pluralisme prinsip dan juga pluralisme informasi. Dengan pendekatan ini, satu prinsip moral seharusnya tidak menyandarkan diri hanya pada variabel informasi yang ada di dalamnya. Sebuah pendekatan harus mempertimbangkan variabel-variabel lain yang bisa jadi akan memberikan alternatif solusi yang lebih baik. Bagaimana variabel-variabel informasi itu diakomodasi, selain melalui penalaran

pertimbangan utamanya adalah aspek kegunaan (*utility*) sementara dalam pemikiran Dworkin adalah aspek sumberdaya (*resource*).

⁷⁶ “...if a kind of conduct that is right (or wrong) for me is not right (or wrong) for some one else, it must be on the ground of some difference between the two cases, other than the fact that I and he are different persons.” Sen, 1985, “*Well-Being, Agency and Freedom*” dalam *The Journal of Philosophy*, hlm. 170-171

argumentatif, Sen juga menyebut peran penting intuisi. Dengan intuisi, diharapkan dapat membantu menjembatani keragaman variabel yang ada (bdk. Sen, WAF, 176).

3.4.2. Pluralitas Posisi

Dalam menunjukkan pluralitas pandangan dan perspektif, Sen juga menggarisbawahi perihal peran posisi. Posisi di mana kita berdiri akan sangat menentukan cara pandang kita terhadap sesuatu. Manusia selalu berdiri pada posisi tertentu yang berbeda satu sama lain. Objek yang sama akan dilihat secara berbeda bergantung di mana posisi mereka berdiri.⁷⁷ Pandangan dan keyakinan yang kita pegang selama ini, tidak lepas dari posisi kita dalam satu masyarakat dengan kebudayaan dan tradisi tertentu. Dalam merespon satu kasus yang sama bisa jadi akan sangat berbeda dengan respon dari cara pandang orang lain yang berasal dari masyarakat dan tradisi yang berbeda.

Hal yang sangat digarisbawahi dalam ide mengenai posisi adalah klaim objektivitas atas satu pandangan dari sudut pandang tertentu yang sebenarnya akan menemukan kekeliruannya setelah diuji secara objektif. Sen menyebut kecenderungan ini sebagai ilusi objektif (*objective illusion*).⁷⁸ Dalam ilustrasi Sen, orang yang beranggapan bahwa ukuran bulan dan matahari memiliki ukuran yang kurang lebih sama karena dilihat dari bumi dipahami sebagai pandangan yang objektif dari posisinya. Namun, posisi yang dianggap objektif itu kemudian ditantang dan dikoreksi ketika ia membuka diri pada cara pandang yang mempertimbangkan jarak objek dan proyeksi. Pada momen itu ia akan menemukan kekeliruan pandangannya bahwa ternyata ukuran matahari dan bulan sangat berbeda. Kekeliruan atas kepercayaan yang sebelumnya kita anggap objektif inilah yang disebut ilusi objektif. Ilustrasi kasus ini tentu bisa terjadi dalam banyak kasus yang lain (Sen, 2009:162-163).

Apa yang perlu dilakukan untuk mencapai titik objektivitas adalah dengan berupaya melampaui posisi di mana kita berdiri dan melihat sebagaimana orang lain melihat. Pertimbangan yang hanya bertitik tolak dari pandangan sendiri dan mengklaim kebenarannya sendiri dapat jatuh pada jebakan ilusi objektif. Keterbukaan pada pandangan dan perspektif yang lain akan membantu mengoreksi kekeliruan yang ada

⁷⁷ “Different persons can occupy the same position and confirm the same observation; and the same person can occupy different positions and make dissimilar observations.”, Sen 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 157

⁷⁸ “An objective illusion, thus interpreted, is a positionally objective belief that is, in fact, mistaken in terms of transpositional scrutiny.”, Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 163

dalam pandangan kita. Bukan hanya itu, pertukaran perspektif juga bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk berkontribusi dan menjadi pertimbangan bagi perspektif yang lain. Pertukaran perspektif bukanlah hal yang mudah karena menuntut kemampuan untuk mendengar dan keterbukaan untuk mengoreksi apa yang kita peluk selama ini, dalam hal apapun.⁷⁹

Isu mengenai posisi, menurut Sen, memiliki relasi yang erat dengan formulasi mengenai keadilan. Formulasi mengenai yang adil terkait dengan upaya kita untuk sampai pada posisi pengetahuan lebih matang dan lebih objektif. Untuk sampai pada titik itu, kita tidak cukup bertopang pada pandangan yang kita miliki. Dalam pandangan Sen, kita harus berupaya melihat dan mendengar pandangan-pandangan yang lain, bahkan yang paling bertolak belakang sekalipun sehingga dengan cara ini kita bisa sampai pada pandangan yang jauh lebih baik dan lebih objektif. Melalui cara ini kita juga bisa sampai pada penilaian yang lebih adil dibanding sebelumnya. Dengan demikian, perluasan perspektif dan cakrawala dalam melihat sesuatu memiliki andil besar dalam pertimbangan mengenai yang adil dan tidak adil.⁸⁰

Bagi Sen, teori keadilan tidak hanya berurusan dengan upaya kita mencari satu prinsip paripurna yang tidak mengakar pada realitas konkret kehidupan manusia. Penekanan Sen pada pendekatan komparatif lebih banyak ditopang oleh pandangan bahwa keadilan lebih pada upaya memperluas cakrawala informasi sehingga dengan demikian kita bisa membandingkan dan menghasilkan satu kesimpulan tentatif yang lebih baik dibanding yang sebelumnya.⁸¹

3.4.3. Pluralitas Rasionalitas

Setiap kebudayaan pada dasarnya memiliki rasionalitasnya sendiri yang kadang tidak mungkin bisa digeneralisasi dalam standar tertentu. Definisi mengenai tindakan atau pilihan rasional misalnya tidak selalu terkait dengan kepentingan diri yang

⁷⁹ “*The need to transcend the limitations of our positional perspectives is important in moral and political philosophy, and in jurisprudence. Liberation from positional sequestering may not always be easy, but it is a challenge that ethical, political and legal thinking has to take on board.*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 155

⁸⁰ “*In the pursuit of justice, positional illusions can impose serious barriers that have to be overcome through broadening the informational basis of evaluations...*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 169

⁸¹ “*...we may reasonably search for comparatives, and not for the utopian objective of transcendence. Comparative broadening is part of the persistent interest in innovative epistemological, ethical and political work, and it has yielded a great many rewards in intellectual history of the world.*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 170

menyusup di dalamnya.⁸² Untuk menunjukkan pluralitas cara berpikir rasional, Sen mencoba masuk lewat kritiknya terhadap konsep kepentingan diri.⁸³ Ada pandangan kuat, khususnya dalam ekonomi bahwa yang disebut sebagai tindakan rasional adalah sejauh ia diabdikan untuk kepentingan diri (*self interest*).⁸⁴ Tindakan dan pilihan yang tidak didasarkan pada pemenuhan kepentingan diri akan dianggap sebagai tindakan dan pilihan yang tidak rasional. Apa yang hendak Sen tunjukkan adalah bahwa tidak ada keharusan untuk mengaitkan tindakan rasional dengan kepentingan diri. Untuk menggugurkan asumsi umum dalam ekonomi ini, Sen menjelaskan dua kategori tindakan dalam hubungannya dengan konsep kepentingan diri: pertama adalah simpati dan kedua adalah komitmen.

Dalam artikel yang pernah ditulis pada tahun 1977, "*Rational Fool: A Critique of The Foundations of Economic Theory*", Sen menguraikan konsep simpati dan komitmen sebagai bagian dari fondasi perilaku dalam melihat yang lain. Menurutnya tindakan simpati merujuk pada kondisi bahagia dikarenakan oleh kondisi yang dialami orang lain.⁸⁵ Sementara komitmen lebih dilihat sebagai tindakan merangkul yang lain ke dalam satu situasi yang lebih baik, tindakan itu bisa didasari oleh simpati atau tidak

⁸² Kritik Sen terhadap konsep rasionalitas yang dalam ekonomi hanya dipahami sebagai tindakan yang diabdikan pada kepentingan diri juga lebih didasari pada ide kebebasan yang menurutnya akan membuka ruang bagi pluralitas nalar yang dapat memotivasi sebuah tindakan. Dalam *Freedom and Rationality* Sen memahami konsep tentang kebebasan dan rasionalitas sebagai dua konsep yang memiliki hubungan timbal balik (resiprokal). Ide kebebasan tidak bisa dinilai tanpa mengaitkan dengan kondisi di mana setiap orang boleh memilih sesuatu yang ia punya alasan untuk memilih hal itu. Di satu sisi, ide kebebasan bergantung pada penilaian rasional untuk memilih pilihan yang mungkin saja berbeda. Dalam pandangan Sen, rasionalitas yang dipahami sebagai pencarian rasional (*reasoned scrutiny*) menjadi sesuatu yang sangat sentral dalam menilai mengenai kebebasan. Pada sisi yang lain, ide mengenai rasionalitas juga bergantung dengan adanya kebebasan. Ketergantungan itu bukan hanya karena signifikansi dari kebebasan untuk memilih tetapi juga karena konsep rasionalitas harus mengakomodasi perbedaan nalar yang dapat memotivasi sebuah pilihan. Lih. Sen, 2002, *Freedom and Rationality*, hlm. 5-6.

⁸³ Kritik dan evaluasi Sen atas pengertian konsep pilihan rasional yang hanya dibatasi pada pemusatan kepentingan diri banyak diulas dalam "Rational Fools: A Critique of the behavioral Foundations of Economic Theory" dan juga dalam "The Formulation of Rational Choice". Selain dua artikel itu, catatan terhadap pandangan tersebut juga bisa dibaca dalam buku Sen yang berjudul *On Ethics and Economics* khususnya pada halaman 12-28. Dalam buku itu dijelaskan bahwa perilaku rasional di satu sisi dapat dipahami sebagai konsistensi internal terhadap sebuah pilihan, di sisi yang lain ia juga bisa dipahami sebagai tindakan yang dapat memaksimalkan kepentingan dirinya.

⁸⁴ Sejauhmana sebuah tindakan telah didasarkan pada pilihan rasional? Dari perspektif ekonomi, juga dalam politik dan hukum, sebuah tindakan telah didasarkan pada dasar pilihan rasional jika dan hanya jika pilihan tersebut telah mempertimbangkan implikasinya pada kepentingan dirinya (...*people choose rationally if and only if they intelligently pursue their self-interest, and nothing else.*) Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm.179.

⁸⁵ "*Sympathy (including antipathy when it is negative) refers to 'one person's welfare being affected by the position of others' (for example, a person can feel depressed at the sight of misery of others)*", Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 188.

didasari oleh simpati.⁸⁶ Jika seseorang merasa tidak enak karena melihat para korban tsunami di Jepang atau Aceh misalnya, itu disebut sebagai sikap simpati. Sementara jika seseorang melihat tragedi tsunami dan mengetahui bahwa para korban tsunami itu membutuhkan banyak bantuan sehingga ia tergerak untuk melakukan tindakan membantu, Sen menyebut tindakan ini sebagai komitmen.⁸⁷

Menurut Sen, tindakan simpati dan juga antipati masih menempatkan diri sebagai lokus utama. Ungkapan “Saya bahagia karena Anda bahagia” dan “Saya sedih karena Anda sedih” menunjukkan posisi utama diri dalam tindakan simpati. Tindakan yang membuat orang lain bahagia yang karenanya akan berimplikasi pada kebahagiaan diri kita tidak bisa dikatakan sebagai tindakan yang lepas dari kepentingan diri. Karenanya, tindakan simpati oleh Sen masih dilihat sebagai tindakan yang terkait dengan prinsip kepentingan diri (*self interest*). Namun dalam sebuah tindakan yang didasarkan pada komitmen, ia tidak lagi menempatkan diri sebagai lokus utama. Orang lain lah yang menjadi pertimbangan dalam tindakan komitmen. Tindakan menolong orang yang tertabrak kendaraan di jalan di mana pada saat yang sama sebenarnya kita harus segera ke kantor dianggap sebagai tindakan komitmen yang mempertimbangkan orang lain sebagai lokus, bukan diri kita. Karenanya pada tindakan komitmen, kita tidak lagi menemukan konsep kepentingan diri (Sen, 2009:188-189).

Pertanyaannya adalah jika tindakan komitmen tidak lagi terkait dengan konsep kepentingan diri, apakah tindakan itu dianggap sebagai tindakan irasional? Bagi Sen, tentu saja tindakan yang didasarkan pada komitmen adalah sebuah tindakan yang rasional meski tidak diabdikan untuk kepentingan diri. Dalam model teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh Gary Becker, konsep penalaran yang lebih luas memungkinkan kita untuk menempatkan tindakan komitmen sebagai tindakan yang rasional. Hanya saja rasionalitas motivasinya tentu tidak didasarkan pada kepentingan diri sendiri, tetapi bisa jadi di luar kepentingan dirinya. Contoh yang sama dapat dilihat dalam pernyataan “tidak peduli apa yang terjadi pada saya, yang terpenting saya harus menolongnya” atau “saya rela mengorbankan diri saya untuk kemerdekaan negeri ini”.

⁸⁶ “... ‘commitment’ is concerned with breaking the tight link between individual welfare (with or without sympathy) and the choice of action (for example, being committed to help remove some misery even though one personally does not suffer from it).” Sen, 2009, *The Idea of justice*, hlm. 189

⁸⁷ “If the knowledge of torture of others makes you sick, it is a case of sympathy; if it does not make you feel personally worse off, but you think it is wrong and you are ready to do something to stop it, it is a case of commitment.” Sen, 1977, “Rational Fool: A Critique of The Behavioral Foundations of Economic Theory” dalam, *Philosophy and Public Affairs*, hlm. 326

Pernyataan-pernyataan sejenis ini adalah contoh komitmen seseorang pada sesuatu di luar dirinya yang tidak berimplikasi langsung pada kepentingannya sendiri (bdk. Sen, 2009:189-190).

Apa yang ingin digarisbawahi oleh Sen dari ilustrasi simpati dan komitmen adalah bahwa sebuah tindakan yang oleh sebagian orang dianggap “tidak rasional” sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip rasionalitas hanya karena tidak mendasarkan pada kepentingan dirinya.⁸⁸ Hal yang absen dalam tuduhan bahwa sebuah tindakan disebut irasional adalah tidak adanya penelusuran lebih dalam pada tindakan memilih yang dilakukan oleh satu komunitas atau orang tertentu. Dalam merespon sesuatu, setiap orang atau setiap komunitas bisa mendasarkan pada penalaran yang berbeda-beda.⁸⁹ Dalam hal ini Sen menekankan bahwa pada faktanya orang dapat menalar pilihannya dan juga pilihan orang lain.⁹⁰ Sen mencoba melihat konsep pilihan rasional dengan kembali pada pengertian dasar pilihan rasional itu sendiri. Menurutnya, tindakan memilih dapat disebut rasional sejauh orang tersebut dapat memberikan pendasaran rasional atau penalaran kritis atas pilihan yang diambil. Hal mendasar yang ingin ditekankan oleh Sen adalah aspek konformitas pilihan dengan penalaran kritis.⁹¹ Rasionalitas, dalam pandangan Sen, terbuka bagi tindakan yang mengabdikan pada kepentingan diri dan juga non kepentingan diri.⁹²

3.4.4. Pluralitas Nalar Imparsial

Sebagaimana Rawls, Sen juga tetap menganggap penting peran rasionalitas, objektivitas dan imparsialitas. Hanya saja, yang membedakan Sen dari Rawls adalah perspektif non-monolitik pada hal-hal yang ia sebut sebagai tuntutan keadilan ini. Bagi Sen, prinsip imparsial tidak dipahami dalam arti tunggal sebagaimana yang dipahami oleh Rawls dalam teori keadilannya. Prinsip imparsial yang dipahami pada fase posisi asali (*the original position*) Rawls bercorak seragam sehingga tidak memungkinkan

⁸⁸ “*There is nothing contrary to reason in our willingness to do things that are not entirely self-serving,*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 191

⁸⁹ “*People’s ability to consider and respond to different types of reasoning (some of which may be well known while others not so) is often invoked in this work.*”, Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 178

⁹⁰ “*What is more important for the purpose of the present exploration is the fact that people are, by and large, able to reason and scrutinize their own decisions and those of others.*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 178

⁹¹ “*Rationality of choice, in this view, is primarily a matter of basing our choices – explicitly or by implication – on reasoning that we can reflectively sustain if we subject them to critical scrutiny... The essential demands of rational choice relate to subjecting one’s choice – of actions as well as objectives, values and priorities – to reasoned scrutiny.*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm.180

⁹² “*Rationality as a characteristic of choice behaviour rules out neither the dedicated altruist, nor the reasoned seeker of personal gain.*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 194-195

lahirnya pandangan yang berbeda satu sama lain. Karena perspektif imparisial Rawls bersifat monolitik maka formula distribusi keadilannya kemudian mengarah pada kelompok paling miskin, bukan dalam formula utilitarian yang mengarah pada penjumlahan manfaat dari semua. Apa yang dihasilkan dari posisi Rawls adalah karena ketunggalan karakter nalar imparisial. Sementara yang ingin ditekankan oleh Sen adalah bahwa kita perlu menerima adanya pluralitas nalar imparisial (bdk. Sen 2009:196-199).

Dalam melakukan penilaian atas masalah-masalah sosial, seseorang dituntut untuk mempertimbangkan pandangan-pandangan yang beragam dari yang lain.⁹³ Pencarian terhadap keragaman perspektif tidak hanya dibatasi pada mereka yang termasuk bagian dari kelompok tertentu, tetapi juga melampaui batas-batas kelompok. Pembatasan perspektif hanya pada mereka yang menjadi bagian dari kelompok tertentu akan menutup kemungkinan untuk memperoleh pertimbangan dan pengalaman yang barangkali dapat memberikan kontribusi besar bagi persoalan yang tengah dihadapi.

Dalam mengajukan signifikansi pluralitas nalar imparisial, Sen mengutip pandangan Thomas Scanlon yang mengatakan bahwa sebuah pertimbangan bisa datang dari siapa saja dan dari mana saja. Pandangan dan perspektif dari berbagai sumber ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sehingga pandangan yang beragam ini menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja.⁹⁴ Menurut Sen, konsep Scanlon ini memberikan pendasaran yang lebih inklusif terhadap seluruh individu atau komunitas untuk memberikan pandangannya dalam merumuskan satu konsep keadilan. Sebuah rumusan tidak datang dari prinsip imparisial yang tunggal dan tidak juga dari komunitas yang dibatasi oleh konsep kewarganegaraan tertentu misalnya. Keputusan yang akan diambil oleh satu bangsa tidak hanya berimplikasi pada bangsa bersangkutan saja sehingga karenanya pelibatan mereka yang berada di luar kewarganegaraan bangsa tersebut menjadi salah satu tuntutan dalam pendekatan keadilan komparatif.⁹⁵

⁹³ “*In the social context, involving fairness to other people, there would be some necessity to go beyond the requirements of rationality in terms of permissive self-scrutiny, and to consider the demands of ‘reasonable conduct’ toward others. In that more demanding context, we must pay serious attention to the perspectives and concerns of others, as they would have a role in the scrutiny to which our decisions and choices can be sensibly subjected.*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 197

⁹⁴ “*...the arguments can come from anyone in that society or elsewhere who can give specific grounds for thinking that the decisions to be made could or could not be ‘reasonably rejected’.*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 199

⁹⁵ “*There is also an inclusional broadening in the Scanlonian approach since the persons whose interests are affected need not all come from only one given society or nation or polity, as in the Rawlsian ‘people by people’ pursuit of justice.*”, Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 199

Tuntutan untuk memerhatikan perspektif yang lain lebih ditujukan untuk menghindari ilusi objektif dalam satu pandangan tertentu. Karena itu, kehadiran nalar imparisial yang lebih terbuka menjadi sesuatu yang niscaya dalam pendekatan komparatif Sen. Setiap gagasan mengenai keadilan memiliki hak yang setara untuk berkontestasi dalam ruang penalaran publik yang terbuka. Dalam pandangan Sen, tidak mungkin bagi kita untuk menutup diri dari pandangan lain mengenai keadilan seraya mengklaim bahwa hanya ada satu konsep keadilan yang paripurna dan sempurna.⁹⁶

Sebagaimana dalam penerimaan prinsip pluralitas rasionalitas, Sen juga menunjukkan adanya nalar imparisial di luar model kontrak sosial. Dalam pandangannya, asumsi dasar dalam membuat satu kontrak sosial adalah prinsip saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak (*mutual benefit of cooperation*). Kemauan untuk menyepakati kontrak adalah karena setiap pihak akan memperoleh keuntungan dari perjanjian itu. Selain itu, relasi antar-pihak yang terlibat dalam kontrak bersifat simetris atau sebanding. Persoalannya bagi Sen, tidak semua orang selalu mendasarkan tindakannya pada adanya nilai keuntungan bagi dirinya. Dan tidak semua orang melakukan satu tindakan yang membawa kebaikan karena relasi yang simetris. Bisa saja seseorang melakukan satu tindakan bukan karena ada tuntutan kontrak yang akan menguntungkan dirinya dan memiliki relasi yang tidak simetris. Sen mengambil ilustrasi Buddha dalam *Sutta-Nipata* tentang seorang ibu yang merawat anaknya. Pelayanan yang diberikan seorang ibu kepada anaknya tidak didorong oleh hasrat pada manfaat kontrak kerjasama. Selain itu, relasi ibu dengan anaknya bersifat asimetris di mana ibu memiliki kemampuan yang lebih besar dibanding anaknya (bdk. Sen, 2009:205-206). Apa yang ingin ditunjukkan oleh Sen melalui ilustrasi ini adalah bahwa nalar imparisial tidaklah bersifat tunggal sebagaimana yang diasumsikan dalam selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) dari posisi asali (*the original position*).

Terhadap prinsip pluralitas Sen yang sudah diuraikan ada sebuah pertanyaan yang diajukan: bukankah pendekatan pluralitas ini pada akhirnya juga akan membawa kita untuk sampai pada kesimpulan yang merangkum seluruh pertimbangan, dan karenanya akan tetap jatuh pada pendekatan monisme? Menurut Sen, betapapun pada akhirnya kita harus sampai pada satu kesimpulan, pendekatan ini tetap disebut pluralis karena sudah mempertimbangkan dan membandingkan variabel yang ada pada saat

⁹⁶ "We have different types of competing reasons of justice, and it may be impossible to reject them all with the exception of just one set of complementary principles that cohere nicely and entirely with each other." Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 201

itu.⁹⁷ Dan kesimpulan yang dihasilkan selalu bersifat tentatif karena bisa dikoreksi di kemudian hari atau karena ada temuan baru dari tempat yang berbeda.

3.5. Ketidaksempurnaan Terbuka

Melalui pendekatan komparatif, masalah dipecahkan dengan beberapa kemungkinan solusi. Yang menjadi pertanyaan, apakah di antara solusi yang ditawarkan ada satu solusi yang bersifat ideal dan sempurna? Jika ya, maka pendekatan komparatif sebenarnya terbuka pada model jawaban yang diajukan pendekatan transendental. Namun dalam pandangan Sen, dua pendekatan ini mengajukan tawaran yang berbeda satu sama lain. Pendekatan transendental, menurut Sen, hanya menawarkan resep ideal dan tidak mampu merespon persoalan-persoalan partikular yang ada dalam masyarakat (bdk. Sen, 2009:98-100).⁹⁸ Sementara pendekatan komparatif justru mendorong kita untuk masuk pada persoalan yang dihadapi masyarakat dengan melihat dan menawarkan solusi yang bersifat kini dan di sini (*now and here*). Dengan model itu, solusi yang menggunakan pendekatan komparatif bisa jadi tidak berfungsi bila digunakan di tempat lain atau diaplikasikan di lain waktu.

Selain itu, model urutan pilihan kebijakan yang dihasilkan dari pendekatan komparatif tidak mengidentifikasi model transendental sebagai pilihan kebijakan terbaik. Negasi ini lebih dikarenakan ketidaksempurnaan dalam pendekatan transendental dianggap sebagai kesalahan atau cacat. Padahal bagi Sen, ketidaksempurnaan dalam keadilan sosial adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak (Sen, 2009:102-103).⁹⁹ Bahkan bagi Sen sendiri, teori Rawls mengenai keadilan, betapapun ada asumsi total dan paripurna di dalamnya, sebenarnya tetap mengandung ketidaksempurnaan. Misalnya meski kesepakatan antar-kelompok dalam posisi asali sudah mengandaikan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), ketidaksempurnaan tetap bisa terjadi dan muncul dari proses tersebut (Sen, 2009:104).¹⁰⁰ Namun meski

⁹⁷ "...informational monism is a completely different issue and is not required for an integrated, complete structure. Indeed, if integration is brought about by a combining principle "umpiring" together various demands based on various informational bases, it would have to be information-pluralist." Sen, 1985, "Well-being, Agency and Freedom", dalam *The Journal of Philosophy*, hlm. 178

⁹⁸ "A no-nonsense transcendental theory can serve, in this sense, as something like the grand revolutionary's 'one-shot handbook'. But that marvelously radical handbook would not be much invoked in the actual debates in justice in which we are ever engaged." Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 100

⁹⁹ "In the 'totalist' approach that characterizes the standard theories of justice, including Rawls's, incompleteness tend to appear as a failure, or at least as a sign of the unfinished nature of the exercise." Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm.103

¹⁰⁰ "The Acceptability of evaluative incompleteness is indeed a central subject in social choice theory in general, and it is relevant to theories of justice as well, even though Rawlsian 'justice as fairness' and

pendekatan komparatif tidak bisa lepas dari ketidaksempurnaan, tujuan utamanya untuk mengurangi ketidakadilan dan memperluas keadilan tetap dimungkinkan, betapapun tidak mencapai yang paripurna sebagaimana yang diupayakan oleh pendekatan transendental (Sen, 2009:105).

Namun, meski Sen mengakui bahwa hasil dari pendekatan komparatif ini tidak sempurna, ia membedakan dua jenis ketidaksempurnaan: ketidaksempurnaan terbuka (*open incompleteness*) dan ketidaksempurnaan tertutup (*closed incompleteness*). Yang dimaksud dengan ketidaksempurnaan terbuka adalah satu solusi yang bersifat tentatif namun masih dapat diperluas dengan informasi-informasi yang dapat melampaui ketidaksempurnaan hasil yang dicapai.¹⁰¹ Sementara ketidaksempurnaan tertutup adalah satu solusi yang pada dasarnya selalu tidak sempurna namun tetap tidak membuka ruang kemungkinan untuk mempertimbangkan informasi atau pandangan lain yang dapat mengoreksi ketidaksempurnaan solusi tersebut.¹⁰²

3.6.Rangkuman

Gagasan dasar dalam bab 3 ini adalah tentang signifikansi perluasan perspektif dan upaya memaparkan sebuah dasar yang memungkinkan pluralitas nalar dapat berdiri secara setara. Tentu saja upaya untuk membangun dasar bagi pluralitas nalar tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi satu nalar tertentu agar dapat berdiri secara setara dengan nalar yang lain seraya menutup diri dari pandangan nalar yang lain. Justru hal yang juga sangat ditekankan oleh Sen adalah kemampuan untuk membuka diri pada pandangan-pandangan lain yang berbeda. Dengan penegasan ini, Sen sebenarnya tengah melakukan sebuah terobosan di mana di satu sisi ia memberikan justifikasi bagi setiap nalar untuk berdiri secara setara dengan nalar-nalar yang lain, pada sisi yang lain ia juga menuntut setiap nalar untuk mau mendengar dan mempertimbangkan suara-suara yang lain. Ada dua gerakan yang dia dorong sekaligus, pertama hak untuk mempublikasikan

other such theories firmly assert that a full agreement will definitely emerge in the original position and in other such formats.” Sen, 2009, The Idea of Justice, hlm. 105

¹⁰¹ “...exemplified by a partial ordering that can still be extended, e.g. by more information ...or by the use of some other supplementary principle ... or by moving toward the resolution of ‘moral struggle’ (as in the case of conflicts of principles). The partial ordering stay, as it were, ‘ready’ to be extended.” Sen, 1985, “Well-Being, Agency and Freedom”, dalam *The Journal of Philosophy*, hlm. 179-180

¹⁰² “In contrast, for ‘closed’ incompleteness, the absence of incompleteness is assertive and there is no room for extending the partial order. In stating that x and y cannot be ranked vis a vis each other in terms of moral goodness, a substantive and definite moral assertion is being made. Though the demands of practical choice may force us to choose one or the other, there is – in this view – no additional moral criterion that can be used to rank the unranked pairs in terms of moral goodness.” Sen, 1985, “Well-Being, Agency and Freedom” dalam *The Journal of Philosophy*, hlm. 180

nalar secara setara (gerak keluar) dan kedua tuntutan agar setiap nalar mau mendengarkan pandangan-pandangan lain yang berbeda (gerak kedalam).

Dalam pandangan penulis, praktik penalaran publik sebagaimana yang dipahami oleh Sen bisa dikategorikan sebagai prinsip epistemik berdimensi etis dari ide keadilan. Mengapa penulis menyebutnya sebagai prinsip epistemik adalah karena apa yang disebut keadilan, dalam pandangan Sen, bukanlah sesuatu yang dihasilkan dari refleksi diri seorang filsuf yang darinya kemudian setiap orang atau komunitas dari dunia yang lain hanya tinggal mengaplikasikan apa yang sudah dihasilkan. Dalam pandangan Sen, apa yang dihasilkan oleh seorang filsuf mengenai keadilan tentu saja penting, namun ide keadilan baginya lebih dimaknai sebagai ide yang selalu harus dikontestasikan dengan pandangan-pandangan lain dan juga harus bersinggungan langsung dengan realitas yang hendak diatasi. Lantas mengapa ia juga disebut sebagai prinsip epistemik yang memiliki dimensi etis adalah karena di dalamnya terdapat tuntutan moral untuk selalu memperluas perspektif dan pandangan yang dimiliki. Salah satu esensi dari ide keadilan Sen berkaitan langsung dengan upaya memperluas perspektif dan memperkaya pertimbangan yang ada dengan pandangan yang datang dari luar.

Selanjutnya, setelah menguraikan bab 3 ini, penulis akan masuk pada pertanyaan mendasar dalam ide keadilan Sen, yakni isi dari ide keadilan dalam arti *nyaya*. Dalam pandangan Sen, teori keadilan bukan hanya berurusan dengan perkara penataan institusi sebagaimana yang dipegang oleh pemikir semisal Rawls, Dworkin atau Nozick yang olehnya dikategorikan sebagai teori keadilan dalam perspektif *niti*. Sen memahami ide keadilan dalam arti luas yang berupaya melampaui keterbatasan institusi dengan masuk pada proses realisasi kehidupan itu sendiri. Sen menyebut ide keadilannya sebagai ide keadilan dalam perspektif *nyaya*. Pertanyaannya kemudian, jika dalam ide keadilan dengan perspektif *nyaya* sangat memerhatikan proses kehidupan, lantas masalah apakah yang sangat dilindungi dalam kehidupan yang dipahami oleh Amartya Sen?

BAB 4
PERLUASAN KEBEBASAN
KESEJAHTERAAN DAN KEPELAKUAN

“Dalam memahami kodrat kehidupan manusia, kita memiliki alasan untuk tertarik tidak hanya pada hal-hal yang telah berhasil kita capai, tetapi juga pada kebebasan yang secara aktual kita dapat memilih di antara beragam jenis kehidupan.”¹⁰³

Amartya Sen, *The Idea of Justice*

4.1.Pendahuluan

Gagasan dasar yang ditekankan dalam pendekatan keadilan *nyaya* adalah tentang ide keadilan yang tidak hanya berbicara soal penataan sebuah institusi atau pencarian bentuk institusi yang adil (*just institution*). Lebih dari itu, bagi Sen, ide mengenai keadilan sebenarnya berurusan langsung dengan realisasi kehidupan manusia secara luas. Penataan institusi dan aturan tentu saja memiliki peran penting, namun sebuah institusi tetap memiliki keterbatasan dalam mengatasi masalah ketidakadilan yang begitu kompleks.¹⁰⁴ Pendekatan keadilan yang berurusan langsung dengan realisasi kehidupan manusia secara luas pertama-tama tidak bertujuan untuk melahirkan sebuah dunia yang adil secara paripurna. Karenanya pemberantasan ketidakadilan secara total tidak menjadi misi utama dalam ide keadilan yang diajukan Sen. Mengapa ia berpendapat demikian? Ide tentang keadilan pada dasarnya bukan sebuah ide yang tunggal. Setiap individu dan setiap masyarakat memiliki pandangan dan argumen mengenai keadilan.¹⁰⁵ Dalam menghadapi kenyataan ini, ia tidak mendesak kita untuk mencari sesuatu yang disebut sebagai ide keadilan, tapi bagaimana sebuah keputusan sudah didasarkan pada upaya mengurangi ketidakadilan. Memberikan ruang bagi setiap

¹⁰³ “In noting the nature of human lives, we have reason to be interested not only in the various things we succeed in doing, but also in the freedoms that we actually have to choose between different kinds of lives.”, Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 18

¹⁰⁴ “Institutions and rules are, of course, very important in influencing what happens, and they are part and parcel of the actual world as well, but the realized actuality goes well beyond the organizational picture, and includes the lives that people manage – or do not manage – to live.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 18

¹⁰⁵ Hal ini dapat dilihat dalam ilustrasi Sen mengenai tiga orang anak, Bob, Carla dan Anne yang memperebutkan satu suling. Masing-masing mengajukan argumen yang dianggap sebagai adil. Sen tidak berpretensi untuk menunjukkan mana yang adil dari ketiganya. Ia cenderung melihat bahwa proses penalaran publik yang mereka lakukan adalah salah satu langkah penting dalam upaya mengurangi ketidakadilan.

pihak untuk menyampaikan ide tentang keadilan adalah salah satu langkah penting dalam upaya mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat.¹⁰⁶

Ide keadilan dalam arti *nyaya* mencoba melampaui keterbatasan model keadilan institusional atau keadilan dalam arti *niti*. Dalam pandangan Sen, keadilan dalam arti *nyaya* memiliki perhatian besar pada bagaimana kehidupan berlangsung.¹⁰⁷ Perspektif keadilan yang memiliki perhatian pada proses kehidupan dalam arti luas menempatkan masalah kebebasan sebagai isu sentral dalam proyek mengurangi ketidakadilan. Semakin besar kebebasan dinikmati, semakin besar pula keadilan yang dicapai. Luas dan sempitnya ruang kebebasan memiliki korelasi yang sangat erat dengan nasib keadilan yang dapat dinikmati. Karenanya, ide tentang perluasan kebebasan menjadi isu yang sangat penting dalam upaya mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat.

Sen memahami kebebasan bukan hanya sebagai kemampuan untuk memilih sesuatu secara bebas tanpa paksaan, tetapi juga sebagai kemampuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bebas dari deprivasi kapabilitas. Dengan pengertian ini, bebas dari kemiskinan, bebas dari penyakit dan bebas dari kelaparan memiliki resonansi yang sama dengan bebas dari perbudakan, bebas dari pemerintahan tiran dan bebas dari diskriminasi etnis.¹⁰⁸ Hidup dalam kemiskinan dan hidup dalam pemerintahan otoriter sama-sama dianggap sebagai hidup dalam ketidakbebasan. Jika ketidakbebasan dalam pengertian ini dianggap sebagai akar ketidakadilan maka realisasi dari proyek pengurangan kemiskinan juga dianggap senafas dengan agenda perluasan kebebasan. Dengan demikian, dalam pandangan Sen, isu mengenai kebebasan terkait dengan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan (*kapabilitas/well-being freedom*) dan kebebasan untuk menentukan hidup yang dianggap baik (*agency freedom*).

Dalam pandangan Sen, institusi tentu saja memiliki kontribusi besar dalam proyek pengurangan ketidakadilan dalam arti ini. Sistem pemerintahan yang demokratis dan pengembangan kebijakan yang memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan

¹⁰⁶ Proses ini dapat dilihat dalam bab 3 tentang tindakan penalaran publik yang memberi ruang bagi pluralitas nalar.

¹⁰⁷ "Justice is ultimately connected with the way people's lives go, and not merely with the nature of the institutions surrounding them." Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm.x

¹⁰⁸ Dalam otobiografinya, Sen menceritakan kisah seorang muslim yang bernama Kader Mia yang mati terbunuh akibat dari konflik antara Hindu dan Muslim di masa itu. Kader Mia, seorang buruh miskin yang pada hari itu harus keluar rumah dan melewati daerah yang sedang berkonflik untuk masuk kerja karena tidak memiliki apapun yang bisa dimakan. Dalam pandangan Sen, kemiskinan atau ketidakbebasan ekonomi yang dialami Kader Mia telah membawanya pada kematian yang di masa itu kebetulan juga sedang terjadi konflik identitas antara Hindu dan Muslim. "Amartya Sen - Autobiography". *Nobelprize.org*. 29 Apr 2011 http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998/sen-autobio.html

termasuk dalam kontribusi signifikan yang dapat diberikan oleh institusi dalam memperluas kebebasan. Namun, institusi tentu juga bukan satu-satunya variabel yang dapat diajukan, karena pelaku tindakan juga memiliki peran yang besar dalam memperluas kebebasan. Perluasan kebebasan, baik dalam arti kebebasan untuk mencapai kesejahteraan tertentu atau kebebasan untuk menentukan sesuatu yang dianggap baik dapat dilakukan oleh institusi dan juga oleh para pribadi (*person*).

Dalam bab empat ini akan dibahas apa yang disebut sebagai isi atau materi dari keadilan dalam arti *nyaya*, yakni persoalan kebebasan. Ide keadilan dalam arti *nyaya* yang berurusan dengan realisasi kehidupan menempatkan persoalan kebebasan sebagai pokok bahasan yang cukup sentral. Ada dua gagasan besar mengenai kebebasan yang diuraikan dalam bab ini, pertama kebebasan sebagai kapabilitas atau kebebasan untuk mencapai kesejahteraan tertentu (*well-being freedom*), dan kedua kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) atau kebebasan untuk menentukan apa yang dianggap baik.

4.2.Sentralitas Kehidupan dan Kebebasan

Dalam kisah Siddhartha Gautama, Sen menceritakan bagaimana Gautama muda – yang kemudian dikenal sebagai Sang Budha – keluar dari istana untuk mencari pencerahan. Gautama yang hidup serba cukup di lingkungan istana kerap bertanya mengenai hal-hal yang ia anggap aneh. Mengapa ada orang miskin, sakit, tua dan mati. Bagi Sen, apa yang dialami oleh Gautama sebenarnya adalah keresahan mengenai deprivasi dan ketidakamanan hidup manusia (Sen, 2009:225). Setiap saat hidup manusia selalu berada dalam ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Ancaman juga bisa berupa sesuatu yang niscaya, misalnya menjadi tua, atau sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, misalnya kecelakaan. Realitas mengenai ketidakamanan hidup dalam arti luas menjadi titik tolak yang sangat penting dalam ide keadilan dalam arti *nyaya*.

Di abad modern, deprivasi dan kesejahteraan hidup diukur dengan berbagai model di antaranya adalah dengan mengukur produk domestik bruto/*gross domestic product* (PDB/GDP) atau pendapatan nasional bruto/*gross national product* (PNB/GNP). Alat ukur yang pada umumnya dibuat oleh para ahli ekonomi ini adalah salah satu upaya untuk menakar kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Kesejahteraan menjadi variabel penting untuk melihat apakah manusia berada dalam hidup yang aman atau tidak. Pada umumnya, tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat dapat dilihat dari pendapatan yang diterima. Dalam pandangan Sen, elemen

penting yang juga terkait dengan masalah kesejahteraan adalah kebebasan. Menjadi sejahtera berarti bahwa masyarakat terbebas dari kematian prematur yang untuk mencapainya tidak hanya ditopang oleh pendapatan yang cukup tetapi juga oleh organisasi sosial yang baik seperti adanya sistem perlindungan kesehatan, pendidikan, harmoni sosial yang baik dan seterusnya. Kebebasan dalam arti ini memberikan kontribusi penting bagi makna kesejahteraan umat manusia. (Sen, bdk. 225-227)

Dalam *Development as Freedom*, Sen menggarisbawahi bahwa peran GNP tentu saja penting sejauh ia memiliki peran dalam mengurangi ketidakbebasan yang dialami masyarakat. Ada banyak variabel penting selain GDP atau GNP yang dapat berkontribusi mengurangi ketidakbebasan masyarakat, misalnya relasi kelas dalam struktur sosial dan adanya kebebasan politik. Variabel-variabel ini memiliki arti penting dalam menopang perluasan kebebasan manusia. Dengan pemahaman ini ia hendak menegaskan bahwa proses pembangunan dapat dilihat sebagai proses perluasan kebebasan.¹⁰⁹ Pembangunan semestinya bukan hanya perkara peningkatan pendapatan belaka tetapi lebih dipahami sebagai proyek pengatasan akar-akar ketidakbebasan. Dan apa yang disebut sebagai akar ketidakbebasan tentu bukan hanya kemiskinan dan fasilitas publik yang buruk, tetapi juga pemerintahan tiran, deprivasi sosial dan tindakan intoleransi.¹¹⁰

Sen, sebagai seorang ekonom, tentu saja mencatat dengan baik mengapa dalam konsep kesejahteraan banyak orang terkonsentrasi pada uang atau penghasilan. Menurutnya hal ini tidak lepas dari pandangan bahwa uang berperan dalam memperluas kebebasan mereka untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Namun persoalannya, uang bukanlah satu-satunya sarana yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan. Uang hanya salah satu variabel yang bisa dipakai untuk mencapai kebebasan. Tentu masih ada variabel lain yang bisa digunakan untuk mencapai kebebasan. Jika nasib hidup manusia terkait erat dengan persoalan kebebasan, maka agenda pembangunan seharusnya tidak diarahkan untuk memperbesar pendapatan saja, tetapi lebih pada upaya memperluas dan

¹⁰⁹ “*Development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedom that people enjoy.*” Sen, 1999, *Development as Freedom*, hlm. 3

¹¹⁰ “*Development requires the removal of major sources of unfreedom: poverty as well as tyranny, poor economic opportunities as well as systematic social deprivation, neglect of public facilities as well as intolerance or overactivity of repressive state.*” Sen, 1999, *Development as Freedom*, hlm. 3

memperbesar kebebasan dan menghapus ketidakbebasan dalam masyarakat (bdk. Sen, 1999:14).¹¹¹

Sentralitas kehidupan yang sangat digarisbawahi dalam keadilan *nyaya* juga mengasumsikan nilai yang dibawa oleh setiap orang. Setiap manusia memiliki nilai yang dengannya mereka akan mengisi dan mengarahkan hidupnya. Nilai yang diyakini melandasi setiap pilihan hidup yang dituju dan diperjuangkan. Sen memberikan tempat yang istimewa pada hak setiap orang atau komunitas untuk mencapai apa yang diyakininya sebagai sesuatu yang bernilai. Dalam konsep kapabilitas yang akan diuraikan dalam bab ini, setiap orang memiliki kebebasan untuk mencapai apa yang dianggap bernilai oleh dirinya.¹¹² Dalam pandangan Sen, salah satu esensi dari kehidupan agar setiap orang dapat semakin memperluas kebebasan untuk mencapai apa yang dianggap bernilai di satu sisi, dan memperluas kebebasan untuk menentukan kehidupan yang ia inginkan di sisi yang lain. Uraian mengenai perluasan dua kebebasan ini akan diuraikan panjang lebar dalam konsep kapabilitas (*well-being freedom*) dan kebebasan kepelakuan (*agency freedom*).

4.3. Dua Pengertian Kebebasan

Perhatian Sen pada kehidupan tidak hanya menekankan soal ketercukupan kesejahteraan yang dapat dinikmati. Baginya, kehidupan yang dilakoni juga harus memerhatikan aspek kebebasan untuk menentukan cara hidup itu sendiri. Kebebasan untuk menentukan dan memilih kehidupan yang dianggap baik oleh setiap individu atau komunitas menjadi bagian yang integral dalam hidup.¹¹³ Ada dua alasan yang membuat kebebasan menjadi penting: (1) dengan kebebasan yang lebih besar maka akan terbuka kesempatan yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang dianggap bernilai – kebebasan dimaknai sebagai kesempatan (*opportunity*);¹¹⁴ dan (2) kebebasan menjadi sesuatu yang penting sebagai proses itu sendiri, di mana seseorang tidak dipaksa dalam

¹¹¹ “An adequate conception of development must go much beyond the accumulation of wealth and the growth of gross national product or other income-related variables. Without ignoring the importance of economic growth, we must look well beyond it.” Sen, 1999, *Development as Freedom*, hlm. 14

¹¹² “The ‘capability set’ thus stands for the actual freedom of choice a person has over alternative lives that he or she can lead.” Sen, 1990, “Justice: Means versus Freedom”, dalam *Philosophy and Public Affairs*, hlm. 114

¹¹³ “Indeed, the freedom to determine the nature of our lives is one of the valued aspects of living that we have reason to treasure. The recognition that freedom is important can also broaden the concerns and commitments we have.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 227

¹¹⁴ “First, more freedom gives us more opportunity to pursue our objectives – those things that we value.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 228

menentukan hidupnya.¹¹⁵ Kebebasan dalam pengertian yang pertama terkait dengan kesempatan seseorang mencapai kehidupan yang ia kehendaki. Sementara pengertian kebebasan yang kedua terkait dengan kemampuan seseorang menentukan satu tujuan yang dianggap bernilai. Secara konseptual, pengertian pertama akan banyak diperhatikan dalam konsep kapabilitas sedangkan yang kedua dalam konsep kepelakuan atau *agency* (bdk. Comim, dll. 2008:4).

Untuk menjelaskan perbedaan pengertian kebebasan dari aspek kesempatan dan proses, Sen membuat ilustrasi lewat tiga skenario berikut. Dalam skenario 1, katakan saja, si A berencana pada hari Minggu ini untuk tinggal di rumah, tidak kemana-mana. Dalam kenyataannya, pada hari Minggu yang telah direncanakan ia berhasil mewujudkan rencananya untuk tinggal di rumah, tidak ke mana-mana. Pada skenario 2, ia sudah berencana seperti dalam skenario 1, namun karena ada keharusan eksternal, si A harus keluar rumah sehingga ia tidak bisa mewujudkan rencana untuk tinggal di rumah pada hari Minggu ini. Sementara dalam skenario 3, si A sudah berencana seperti dalam skenario 1, dan kebetulan ia diharuskan oleh sesuatu di luar dirinya untuk tinggal di rumah. Tentu pada hari Minggu ini ia bisa tinggal di rumah. Namun persoalannya ia tidak bisa mengambil pilihan yang lain, karena tinggal di rumah pada hari Minggu ini merupakan keharusan.¹¹⁶

Pada skenario 1, si A memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ia mau dan ia anggap baik, dan ia berhasil mewujudkan rencananya itu. Pada skenario 2, si A tidak memiliki kebebasan karena ada keharusan yang datang dari luar sehingga ia tidak bisa mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Sementara pada skenario 3, ia kebetulan memperoleh apa yang ia inginkan meski tidak bisa memilih pilihan yang lain. Dalam

¹¹⁵ “*Second, we may attach importance to the process of choice itself.*” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 228

¹¹⁶ Dalam contoh yang dekat dengan kita misalnya di zaman Orde Baru, setelah ekonomi Indonesia terpuruk di masa Orde Lama, masyarakat Indonesia pada umumnya berupaya untuk keluar dari krisis dan meraih kesejahteraan ekonomi. Namun untuk mencapai kesejahteraan itu, banyak aspek kebebasan – dalam arti proses – yang ditutup oleh pemerintah Orde Baru. Misalnya masyarakat tidak bisa menerima informasi yang terbuka dari media dan mereka tidak boleh berbicara secara bebas di publik. Bahkan dengan jargon trilogi pembangunan, untuk mencapai kesejahteraan maka harus ada stabilisasi keamanan yang berarti bahwa masyarakat tidak boleh berbicara dan berpolitik secara bebas. Dalam ilustrasi ini, yang ditekankan hanya aspek kesejahteraan dengan kebebasan yang minus. Kita juga bisa melihat hal sebaliknya, di mana ada kebebasan namun tidak ada kesempatan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Misalnya di zaman reformasi yang memberi ruang kebebasan berbicara, berpolitik secara terbuka dan juga membeli apa yang mereka mau, pemerintah menyesuaikan harga BBM dengan harga pasar – kebijakan ini terjadi pada tahun 2005. Dengan kebijakan ini, meski masyarakat diberi kebebasan untuk berbicara, berpolitik dan membeli apa yang mereka kehendaki, namun kesempatan untuk mencapai itu tidak ada, karena pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi untuk mencapai kebebasan itu.

perspektif kebebasan Sen, bila dilihat dari kerangka “hasil kulminasi” (*culmination outcome*), tidak didapati masalah dalam skenario 3 karena si A justru memperoleh apa yang ia inginkan. Namun bila dilihat dari kerangka “hasil komprehensif” (*comprehensive outcome*), akan muncul persoalan kebebasan dalam skenario 3. Capaian si A untuk tinggal di rumah ternyata ditentukan oleh keharusan yang datang dari luar sehingga ia tidak bisa memilih pilihan yang lain (Sen, 2009:228-230). Bagi Sen, sebuah capaian jangan hanya dilihat dari titik akhir (*culmination outcome*), namun juga perlu diperhatikan bagaimana capaian itu diperoleh (*comprehensive outcome*).

Perhatian Sen pada hasil komprehensif tentu saja didasarkan pada signifikansi arti kebebasan. Kebebasan untuk memilih hidup yang dianggap baik dapat membuka kesempatan pada kesejahteraan, namun lebih dari itu, dengan adanya kebebasan untuk memilih, seseorang sudah menegaskan dimensi dasar kemanusiaannya, yakni kebebasan itu sendiri.¹¹⁷ Relasi kebebasan dengan kesejahteraan akan diuraikan lebih jauh dalam konsep kapabilitas. Dalam pandangannya, kapabilitas dimaknai sebagai kebebasan untuk mencapai sesuatu yang dianggap baik (*well-being freedom*). Sementara relasi kebebasan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan apa yang dianggap baik akan diuraikan dalam konsep mengenai kepelakuan (*agency freedom*). Dua gagasan kebebasan ini (*well-being freedom* dan *agency freedom*) adalah dua aspek penting yang perlu diperhatikan pada saat seseorang melakukan pertimbangan moral.

Dalam melihat gagasan kesejahteraan (*well-being*) dan kepelakuan (*agency*), Sen membedakan perspektif kebebasan (*freedom*) dengan capaian (*achievement*). Dengan klasifikasi ini maka ada empat kategori yang perlu dibedakan antara perspektif kebebasan dan capaian dalam melihat kesejahteraan dan kepelakuan, yakni: *well-being achievements* dan *agency achievements* di satu sisi, serta *well-being freedom* dan *agency freedom* di sisi yang lain. Secara distingtif, masing-masing konsep dapat dilihat melalui tabel. 1 (Crocker dan Robeyns, 2010:62).

¹¹⁷ “The freedom to choose our lives can make a significant contribution to our well-being, but going beyond the perspective of wellbeing, the freedom itself may be seen as important.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 18

Tabel. 1.

	Kesejahteraan (Well-being)	Kepelakuan (Agency)
Capaian (Achievement)	Capaian Kesejahteraan (Well-being achievement)/ (functionings)	Capaian Kepelakuan (Agency achievement)
Kebebasan (Freedom)	Kebebasan untuk Mencapai Kesejahteraan (Well-being freedom) / (capability)	Kebebasan kepelakuan (Agency freedom)

Yang dimaksud dengan *well-being achievement* adalah capaian kesejahteraan aktual atau yang secara konseptual kemudian disebut *functionings*, sementara *agency achievement* adalah realisasi tujuan atau nilai yang oleh pelaku dianggap layak untuk dicapai.¹¹⁸ Keduanya sama-sama capaian, hanya saja yang pertama capaian dari segi kesejahteraan dan yang kedua adalah capaian dari sebuah keputusan cita-cita dan harapan. Pada sisi yang lain, *well-being freedom* dimaknai sebagai kebebasan untuk mencapai sesuatu yang konstitutif bagi kesejahteraan seseorang atau yang oleh Sen disebut kapabilitas, sedangkan *agency freedom* adalah kebebasan untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai oleh sang aktor (Sen, 1992:56-57).¹¹⁹ Dalam kaitannya dengan penilaian dan pertimbangan mengenai keadilan, Sen memberikan perhatian besar pada dua yang terakhir, yakni *well-being freedom* dan *agency freedom*.

4.4.Kebebasan sebagai Kapabilitas¹²⁰

Ada dua gagasan dasar yang dikandung dalam konsep kapabilitas yakni kesejahteraan (*well-being*) dan kebebasan (*freedom*). Signifikansi kesejahteraan tentu saja terkait dengan kemampuan seseorang untuk mempertahankan dan menjaga kehidupan. Dalam menguraikan aspek kesejahteraan, Sen membedakan dua hal: pertama adalah kondisi kesejahteraan aktual itu sendiri dan kedua terkait dengan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan yang dianggap bernilai.

¹¹⁸ "...the realization of goals and values she has reasons to pursue." Sen, 1992, *Inequality Reexamined*, hlm. 56

¹¹⁹ "Well-being freedom is freedom of a rather particular type. It concentrates on a person's capability to have various functioning vectors and to enjoy the corresponding well-being achievements." Sen, 1985, "Well-being, Agency and Freedom" dalam *The Journal of Philosophy*, hlm. 203

¹²⁰ Selain Sen, ada pemikir lain yang juga rekan Sen sendiri, yakni Martha C. Nussbaum yang menggunakan pendekatan kapabilitas untuk membaca masalah ketidakadilan sosial. Melalui pendekatan kapabilitas, Nussbaum mencoba menganalisis masalah ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang menurutnya dimulai dari ketidaksetaraan lingkungan sosial dan politik. Elaborasi lebih dalam mengenai pemikiran Nussbaum dapat dilihat dalam *Women and Human Development: The Capabilities Approach* dan "Capabilities and Social Justice".

Posisi seseorang dalam sebuah tata sosial dapat dinilai dalam dua perspektif (1) capaian aktual, dan (2) kebebasan untuk mencapai. Capaian berfokus pada sesuatu yang ingin kita gapai, dan kebebasan (berfokus, Pen.) pada kesempatan real untuk mencapai sesuatu yang kita anggap bernilai.¹²¹

Yang dimaksud capaian kesejahteraan aktual misalnya kecukupan nutrisi, jaminan kesehatan, bebas dari kematian prematur, hingga kesejahteraan yang lebih kompleks seperti kondisi bahagia, kehormatan dan keterlibatan dalam komunitas. Sen menyebut pengertian pertama ini sebagai *well-being achievement* atau *functionings*. Pengertian dasar dari konsep *functionings* adalah bagaimana dimensi kesejahteraan seseorang dapat “berfungsi” secara baik dalam arti yang luas. Keberfungsian kesejahteraan itu dapat dimaknai dalam arti tindakan/aktivitas (*doing*) dan juga kondisi (*being*). Bisa membaca, menulis dan melihat misalnya dapat dikategorikan sebagai keberfungsian dalam arti tindakan atau aktivitas. Sementara kecukupan akan nutrisi, bebas dari malaria, kesehatan dan kebahagiaan dapat dilihat sebagai keberfungsian dalam arti kondisi (bdk. *Well-Being, Agency and Freedom*, 1985:197-198).¹²²

Kesejahteraan dalam pengertian yang kedua terkait dengan kebebasan dan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan yang dianggap bernilai (*well-being freedom/kapabilitas*). Sen memahami pengertian kesejahteraan kedua ini sebagai kesempatan real (*real opportunity*). Jika seseorang menganggap gelar sarjana sebagai sesuatu yang bernilai sehingga ia mencita-citakan itu, maka pertanyaannya apakah ada kesempatan (*opportunity*) yang mendukung terwujudnya harapannya itu? Misalnya, apakah ada perguruan tinggi yang menjadi tempat dia belajar, apakah ada sumber bacaan untuk studinya, apakah ada waktu belajar, apakah ia punya uang atau ada beasiswa yang membiayai kuliahnya untuk memperoleh gelar sarjana dan apakah semua informasi yang terkait dengan kesempatannya untuk masuk perguruan tinggi sampai padanya. Barangkali masih ada variabel lain yang perlu diperhatikan agar ia bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Variabel-variabel ini tidak hanya dilihat sebagai

¹²¹ “A person’s position in a social arrangement can be judged in two different perspectives, viz. (1) the actual achievement, and (2) the freedom to achieve. Achievement is concerned with what we manage to accomplish, and the freedom with the real opportunity that we have to accomplish with what we value.” Sen, 1992, hlm. 31 Bandingkan juga dalam kutipan berikut: “For one thing, it would seem to disrupt the neat structure of (1) functionings achieved being related to the achievement of well-being, and (2) the capability to function being related to the freedom to achieve well-being.” Sen, 1992, *Inequality Reexamined*, hlm. 50

¹²² “The primary feature of well-being can be seen in terms of how a person can “function”, taking that term in a very broad sense. I shall refer to various doings and beings that come in to this assessment as functionings. These could be activities (like eating or reading or seeing), or state of existence or being, e.g., being well nourished, being free from malaria, not being ashamed by the poverty of one’s clothing or shoes. I shall refer to the set of functionings a person actually achieved as the functionings vector...” Sen, 1985, “Well-being, Agency and Freedom”, dalam *The Journal of Philosophy*, hlm. 197-198

sarana, tapi apakah ia mewujudkan menjadi sebuah kesempatan yang mendukung harapannya.

Dalam pandangan Sen, bisa saja dua orang yang memiliki harapan yang sama, misalnya harapan untuk menjadi seorang sarjana dan memiliki sarana yang sama pula, tetapi kesamaan ini belum tentu berimplikasi bahwa keduanya memiliki kapabilitas yang sama. Bagi Sen, untuk melakukan pertimbangan moral terhadap masyarakat, hal penting yang perlu diperhatikan adalah seluas apa kapabilitas yang mereka miliki. Variabel yang harus diukur tentu bukan hanya berapa pendapatan yang mereka miliki atau berapa banyak sarana yang tersedia. Meski semua itu penting, namun melalui pendekatan kapabilitas, hal yang juga perlu dilihat adalah sejauhmana semua itu berhasil dikonversi menjadi kesempatan untuk mencapai sebuah harapan atau cita-cita.

Dalam bagian berikut ada empat hal yang akan diuraikan berkaitan dengan ide kebebasan sebagai kapabilitas. Yang pertama adalah penjelasan mengenai ide kebebasan sebagai kapabilitas yang dipahami sebagai kebebasan untuk mencapai apa yang dianggap bernilai. Dalam uraian ini juga disinggung soal variabel-variabel yang memungkinkan seseorang mencapai apa yang dianggap bernilai serta relevansi dari konsep kapabilitas. Yang kedua akan diuraikan soal relasi kebebasan dan kemiskinan. Dalam pandangan Sen, kemiskinan lebih dimaknai sebagai deprivasi kapabilitas. Dengan pengertian ini maka kemiskinan bisa menjadi masalah penting dalam kebebasan, karena menjadi miskin berarti seseorang kurang memiliki kebebasan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Yang ketiga akan disinggung apakah kebebasan mengandaikan kontrol secara langsung yang dengannya kita dapat mengabaikan faktor eksternal. Dan yang keempat adalah soal pengandaian penerimaan pluralisme di dalam ide kapabilitas.

4.4.1. Kebebasan untuk Mencapai

Sebagaimana sudah dinyatakan, konsep kapabilitas adalah gagasan yang terkait dengan kebebasan seseorang untuk mencapai sesuatu yang dianggap baik dan bernilai.¹²³ Dalam ilustrasi di atas, keputusan seseorang bercita-cita untuk mencapai

¹²³ “*Capability is, thus a set vectors of functionings, reflecting the person’s freedom to lead one type of life or another.*” Sen, 1992, hlm. 40, lihat juga, “*Capability is primarily a reflection of the freedom to achieve valuable functionings. It concentrates directly on freedom as such rather than on the means to achieve freedom, and it identifies the real alternatives we have. In this sense it can be read as a reflection of substantive freedom.*” Sen, 1992, *Inequality Reexamined*, hlm. 49. Bdk. “...*the capability of person corresponds to the freedom of that a person has to lead one kind of life or another.*” Nussbaum (bersama Amartya Sen), 1993, *The Quality of Life*, hlm. 3

sesuatu yang dianggap bernilai adalah satu momen penting bagi kebebasan. Pada momen keputusan untuk mencapai sesuatu, setiap orang bebas untuk menentukan pilihan yang dianggap baik dan bernilai bagi hidupnya. Namun, selain dimensi kebebasan sebagai keputusan untuk memilih, ada dimensi kebebasan yang juga penting bagi kebebasan itu sendiri, yakni kebebasan dalam arti kesempatan untuk mencapai apa yang dianggap bernilai.¹²⁴ Ketersediaan kesempatan real (*real opportunity*) untuk mencapai harapan yang dicita-citakan juga merupakan dimensi yang tidak bisa dipisahkan dari ide mengenai kebebasan. Adanya kesempatan untuk mencapai apa yang dicita-citakan adalah dimensi yang harus diandaikan agar kebebasan menjadi mungkin. Sen menyebut ketersediaan kesempatan real untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan ini sebagai kapabilitas.

Dalam pandangan Sen, variabel yang memungkinkan seseorang mewujudkan cita-citanya tidak bisa dilihat secara tunggal (monisme). Misalnya, untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai, uang bukan satu-satunya variabel yang memungkinkan seseorang mencapai cita-citanya. Selain itu, variabel setiap orang dan setiap masyarakat dari ruang dan waktu tertentu tidak bisa digeneralisasi untuk orang dan masyarakat dari ruang dan waktu yang lain. Beberapa variabel besar yang perlu diperhatikan dalam melihat seberapa luas kesempatan seseorang mengubah apa yang dimiliki menjadi sesuatu yang dicita-citakan adalah faktor heterogenitas personal, faktor alam dan lingkungan, dan faktor relasi sosial. Status kesempatan setiap orang tidak bisa digeneralisasi karena bisa saja dua orang tinggal di tempat yang sama memiliki kesempatan yang berbeda. Esensi dari pendekatan keadilan komparatif adalah sejauhmana sebuah penilaian selalu didasarkan pada realitas yang terjadi di lapangan, bukan penerapan satu prinsip umum yang datang dari luar terhadap satu masyarakat tertentu dengan mengabaikan realitas masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, ide keadilan yang menjadikan pendekatan kapabilitas sebagai pertimbangan penting akan mengharuskan kita untuk memerhatikan aspek pluralitas kesempatan dalam masyarakat. Pertimbangan dasarnya tentu saja karena setiap orang atau masyarakat memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengkonversi sarana yang ada menjadi kesempatan real untuk mencapai cita-citanya. Menurut Crocker dan

¹²⁴ Pengertian kebebasan macam ini dapat dipahami sebagai kebebasan positif dalam arti umum – kebebasan untuk melakukan ini dan menjadi itu. “*This has the effect of taking note of the positive freedom in a general sense (the freedom “to do this” or “to be that”) that a person has.*” Sen, 1985, “Well being, Agency and Freedom” dalam *The Journal of Philosophy*, hlm. 201

Robeyns, paling tidak ada dua alasan mengapa pendekatan kapabilitas yang memerhatikan aspek pluralitas ini menjadi penting, khususnya di dalam pengembangan kebijakan publik. Yang pertama, pendekatan kapabilitas menuntut kita untuk menelusuri informasi-informasi yang perlu diperhatikan jika hendak membuat penilaian sebaik apa kehidupan seseorang atau masyarakat. Dengan memahami kapabilitas yang dimiliki seseorang maka kita akan dapat menilai sejauhmana kualitas hidupnya. Yang kedua, dalam cara pandang yang lebih luas, konsep kapabilitas dianggap sebagai pendekatan yang lebih evaluatif dan memberikan peran yang lebih besar pada pelaku tindakan atau aktor (Crocker dan Robeyns, 2010:60-61).

Pendekatan ini juga menjadi alternatif bagi pendekatan ukur kesejahteraan moneter dan *cost-benefit*. Dalam pendekatan moneter, kesejahteraan seseorang atau masyarakat biasanya hanya diukur dengan tingkat pendapatan yang diterima. Sementara dalam pendekatan *cost-benefit* seseorang akan mengkalkulasi untung rugi dari sebuah kebijakan yang diambil, khususnya dari aspek manfaat atau kegunaan (*utility*) saja. Sementara melalui pendekatan kapabilitas, kita perlu melihat banyak aspek yang memungkinkan seseorang atau masyarakat mampu untuk hidup secara baik dan sejahtera. Pendekatan ini cenderung menolak ukuran kesejahteraan pada satu variabel tertentu. Karena itu, kita dituntut untuk mempertimbangkan pluralitas variabel dalam membuat penilaian mengenai kemampuan seseorang atau masyarakat agar bisa bertahan hidup melewati ambang batas kesejahteraan (Crocker dan Robeyns, 2010: 60-61).

Dalam pandangan Sen, konsep kapabilitas dalam arti kesempatan real (*real opportunity*) berfokus pada kehidupan manusia secara luas, bukan dalam arti kemampuan ekonomi saja. Dengan konsep kapabilitas ia berupaya menggeser perhatian kita mengenai kesejahteraan yang hanya terpusat pada alat atau sarana ke level *opportunity* atau kesempatan.¹²⁵ Dengan pemahaman ini, persoalannya kemudian bukan berapa banyak kekayaan material yang dimiliki dan berapa pendapatan yang diterima, namun sejauhmana sesuatu yang dimiliki dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Pada titik ini Sen telah menggarisbawahi

¹²⁵ “The capability approach focuses on human life, and not just on some detached objects of convenience, such as incomes or commodities that a person may possess, which are often taken, especially in economic analysis, to be the main criteria of human success. Indeed, it propose a serious departure from concentrating on the means of living to the actual opportunities of living.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 233

pandangan Rawls mengenai hal-hal dasar (*primary goods*) yang menurutnya hanya terkonsentrasi pada sarana saja (Sen, 2009:233).

Sen memberikan pertimbangan penting mengapa ia lebih mengarahkan pandangannya pada konsep kapabilitas dibanding capaian dan sarana belaka melalui tiga ilustrasi yang sekaligus juga menjadi alasan mengapa pendekatan ini menjadi sangat relevan. Yang *pertama*, melalui pendekatan kapabilitas kita bisa memahami status kesempatan real dua orang yang kebetulan memiliki capaian (*achievement*) yang sama. Sejauhmana keduanya mampu mengubah capaian (*achievement*) menjadi sesuatu yang dicita-citakan akan menjelaskan mana yang lebih baik dari dua orang tersebut. Melalui metode ini kita bisa memperoleh pemahaman bahwa dua orang yang memiliki capaian yang sama belum tentu memiliki kapabilitas yang sama. Yang *kedua*, pendekatan kapabilitas juga menjadi relevan pada kasus imigran di satu negara yang cenderung memilih budaya leluhurnya sebagai cara hidup. Pendekatan kapabilitas yang memberikan kebebasan pada setiap orang untuk memilih tujuan hidup yang dianggap baik akan memecahkan masalah keharusan untuk hidup dalam pola yang ditentukan oleh negara di mana mereka tinggal saat itu. Dan yang *ketiga*, pendekatan kapabilitas tentu sangat relevan dalam memandu arah kebijakan publik. Pendekatan kapabilitas akan membantu para pengambil kebijakan publik untuk melihat siapa yang paling membutuhkan bantuan. Ukurannya tentu saja bukan pada seberapa besar capaian yang dimiliki namun seberapa luas kebebasan dan kesempatan yang dimiliki untuk mencapai satu tujuan yang dicita-citakan (Sen, 2009: 235-238).

4.4.2. Kebebasan dari Deprivasi

Realitas kemiskinan adalah salah satu isu mendasar dalam ide keadilan dan menjadi problem penting dalam ide kebebasan. Untuk melihat relasi kemiskinan, keadilan dan kebebasan, kita perlu melihat bagaimana Sen memahami kemiskinan. Pada umumnya kemiskinan didefinisikan sebagai orang yang hidup dengan pendapatan rendah (*low income*). Bank Dunia mendefinisikan batas kemiskinan absolut pada orang yang memperoleh pendapatan di bawah dua dolar perhari. Namun secara substantif, Sen memahami realitas kemiskinan sebagai persoalan deprivasi kapabilitas, bukan semata karena rendahnya pendapatan yang diterima (bdk. Morris, 2010:6). Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk mengkonversi pendapatan dan hal-hal dasar (*primary goods*) yang lain menjadi kehidupan yang baik (*good living*) dan

menjadi kebebasan yang dianggap bernilai.¹²⁶ Hubungan antara sumberdaya dan kemiskinan sangat ditentukan oleh karakteristik masyarakat itu sendiri dan lingkungan di mana mereka tinggal. Paling tidak ada empat hal yang menurut Sen cukup menentukan kemampuan masyarakat mengkonversi pendapatan menjadi kehidupan yang mereka kehendaki.

Yang pertama adalah soal *heterogenitas personal*. Setiap orang memiliki karakteristik fisik yang berbeda-beda, mulai dari umur, jenis kelamin, level ketidakberdayaan (*disability*), kecenderungan pada penyakit dan seterusnya. Perbedaan ini membuat mereka memiliki kebutuhan yang juga berbeda-beda. Misalnya, orang tua yang kerap terserang penyakit tentu membutuhkan pendapatan lebih besar dari pada orang muda yang sehat. Begitu juga seorang perempuan yang sedang hamil memerlukan asupan nutrisi yang lebih banyak dibanding perempuan yang tidak hamil. Gagasan dasar yang ingin disampaikan oleh Sen dalam heterogenitas personal ini adalah bahwa kita tidak bisa menggeneralisasi setiap manusia dalam standar yang sama (Sen, 2009:255).

Faktor penentu yang kedua adalah perbedaan alam dan lingkungan di mana mereka tinggal. Bagaimana pendapatan dapat dikonversi menjadi kualitas hidup yang dikehendaki bergantung pada lingkungan yang ditinggali oleh satu masyarakat. Alam dan lingkungan yang memiliki ancaman terhadap gempa dan banjir misalnya memiliki tantangan yang berbeda dibanding daerah yang relatif aman dari keduanya. Biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang tinggal di alam yang memiliki ancaman bencana jauh lebih besar dibanding daerah yang aman dari ancaman itu. Perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan proses konversi sumberdaya yang dimiliki menjadi kesejahteraan dan kualitas hidup yang dicita-citakan (Sen, 2009:255).

Hal ketiga dan keempat yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kemampuan seseorang mengkonversi sumberdaya menjadi kehidupan yang diharapkan adalah perbedaan lingkungan sosial dan pola perilaku relasi yang berkembang dalam masyarakat. Adanya jaminan kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat kriminalitas dan kekerasan adalah faktor-faktor sosial yang perlu diperhatikan ketika menilai kemampuan dan kesempatan masyarakat dalam mencapai apa yang dianggap bernilai. Sementara yang dimaksud dengan pola relasi yang berkembang dalam komunitas

¹²⁶ “...different people can have quite different opportunities for converting income and other primary goods into characteristics of good living and into the kind of freedom valued in human life.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 254

misalnya adalah kebiasaan untuk bisa tampil tidak memalukan, seseorang harus menggunakan standar pakaian yang lebih tinggi sehingga karenanya dibutuhkan dana yang lebih besar dibanding masyarakat yang tidak menggunakan standar tinggi dalam soal pakaian yang tidak memalukan. Pola relasi semacam ini, dalam pandangan Sen juga turut memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengkonversi sumberdaya yang dimiliki menjadi kehidupan yang dikehendaki (Sen, 2009:255-256).

Apa yang ingin Sen sampaikan dalam uraian mengenai faktor-faktor penentu proses konversi adalah bahwa setiap manusia tidak bisa dilihat dalam kategori dan standar yang sama. Dalam kaitannya dengan definisi kemiskinan sebagai deprivasi kapabilitas yang perlu mempertimbangkan pluralitas setiap manusia, Sen menggarisbawahi kasus yang ia sebut sebagai ketidakberuntungan berlapis. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting untuk memahami persoalan kemiskinan dan dalam merumuskan model kebijakan publik. Contoh dari kasus ketidakberuntungan berlapis ini adalah orang cacat, orang tua dan orang sakit yang karena ketidakberdayaannya itu mereka menjadi kelompok masyarakat yang memperoleh pendapatan rendah. Padahal, menurut Sen, kelompok orang seperti ini justru sedang membutuhkan dana yang besar untuk mengkonversi pendapatannya itu menjadi kehidupan yang layak (Sen, 2009:256).

Relevansi ketidakberdayaan (*disability*) dalam kaitannya dengan masalah deprivasi kerap dipandang sebelah mata. Bagi Sen, kenyataan ini menjadi pertimbangan penting bagi setiap pengambil kebijakan untuk memberikan perhatian besar pada masalah kapabilitas. Manusia dengan kekurangan mental dan fisik tidak hanya membuatnya terdeprivasi tetapi juga menjadi orang yang kerap tidak diperhatikan.¹²⁷ Pemahaman kita mengenai tuntutan moral dan politis dari masalah ketidakberdayaan (*disability*) sangatlah penting bukan hanya karena hal tersebut terkait dengan dimensi kemanusiaan kita, namun karena banyak konsekuensi tragis yang diakibatkan oleh situasi tersebut sebenarnya dapat kita kurangi secara substansial melalui bantuan dan intervensi yang terukur. Kebijakan yang dapat dilakukan cukup banyak mulai dari

¹²⁷ “People with physical or mental disability are not only among the most deprived human beings in the world, they are also, frequently enough, the most neglected.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm.258

perbaikan efek dari ketidakberdayaan hingga program yang dapat mencegah perkembangan kondisi tidak berdaya.¹²⁸

Dalam pemahaman Sen, jika kita memaknai tuntutan keadilan sebagai upaya untuk menghapus ketidakadilan yang nyata daripada upaya untuk mencari masyarakat adil yang paripurna, maka pencegahan dan pengurangan ketidakberdayaan (*disability*) mesti menjadi upaya sentral dalam memajukan keadilan.¹²⁹ Dengan mencegah dan mengurangi ketidakberdayaan yang dialami oleh seseorang atau masyarakat maka sebenarnya kita tengah mengatasi problem ketidakbebasan yang menghambat. Secara fundamental Sen memberikan sebuah perspektif baru mengenai kebebasan yang tidak melulu dimaknai sebagai kebebasan personal. Bagi Sen, bebas dari kemiskinan, kelaparan atau malaria adalah juga persoalan yang tidak bisa diabaikan, karena kebebasan dalam arti ini turut memungkinkan kita untuk meraih kebebasan yang lebih luas.

4.4.3. Kapabilitas dan Kontrol Langsung

Sen melihat persoalan kebebasan dalam kaitannya dengan pilihan (seseorang atau komunitas) yang dianggap baik dalam relasi yang cukup kompleks. Bagaimana sesuatu diraih berlangsung dalam cara yang bermacam-macam. Paling tidak ia menyinggung apa yang ia sebut sebagai kontrol secara langsung (*direct control*). Namun masalahnya tidak semua hal yang kita capai dilakukan melalui kontrol langsung dari individu. Ada banyak capaian pilihan yang mengandaikan faktor eksternal. Pada level ini, sesuatu yang kita anggap baik tidak lagi ditentukan oleh kontrol atau pilihan langsung dari pelaku tindakan, tetapi mengandaikan banyak faktor eksternal yang juga sangat menentukan (Sen, 2009:301-302).

Jika kebebasan tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan yang dilakukan atas kendali oleh dirinya sendiri, sejauhmana faktor eksternal memungkinkan kebebasan seseorang? Bagi Sen, dalam dunia yang cukup kompleks, sangat sulit bagi siapapun

¹²⁸ “An understanding of the moral and political demands of disability is important not only because it is such a widespread and impairing feature of humanity, but also because many of the tragic consequences of disability can actually be substantially overcome with determined societal help and imaginative intervention. Policies to deal with disability can have a large domain, including the amelioration of the effects of handicap, on the one hand, and programmes to prevent the development of the disability, on the other.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 259

¹²⁹ “If the demands of justice have to give priority to the removal of manifest injustice, rather than concentrating on the long-distance search for the perfectly just society, then the prevention and alleviation of disability cannot but be fairly central in the enterprise of advancing justice.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 259

untuk menjamin kebebasan untuk mencapai sesuatu bila hanya mengandalkan kontrol langsung secara personal. Karenanya, faktor eksternal menjadi sesuatu yang juga perlu diandaikan bagi kebebasan seseorang untuk mencapai cita-citanya. Implikasi dari pemahaman ini, konsep kebebasan perlu dipahami dalam relasi yang cukup kompleks, bukan semata kebebasan dalam arti kontrol langsung (*direct control*). Melalui kompleksitas masalah kebebasan, Sen mencoba merespon kritik mazhab republikan, khususnya seperti yang diwakili oleh Philip Pettit. Dalam pandangannya, kebebasan bukan hanya sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu, tetapi juga tuntutan bahwa orang lain tidak boleh mengeliminasi kemampuan ini (Sen, 2009:305).¹³⁰

Secara khusus, Pettit mengkritik konsep kapabilitas melalui pendekatan teori republikan. Jika kebebasan sebagai kapabilitas mengandaikan pihak lain, maka sebenarnya kita tidak bisa disebut sebagai bebas. Ia memberikan ilustrasi jika kita diberi kesempatan untuk memilih A atau B, dan di dalam memilih apa yang kita anggap baik ternyata kita bergantung pada faktor eksternal yang mendukung maka sebenarnya kita tidak betul-betul bebas. Sen tidak menolak pemahaman ini, bahkan ia cenderung menempatkan paham kebebasan republikan Pettit sebagai salah satu paham penting mengenai kebebasan. Ia hanya menolak anggapan bahwa pandangan ini secara otomatis menghapus perspektif kebebasan sebagai kapabilitas. Bagi Sen, dua paham kebebasan ini tetap mungkin dan mendapat tempat dalam teori mengenai kebebasan (Sen, 2009:305-306).

Perbedaan paham kebebasan ini dapat dilihat pada ilustrasi kasus dengan tiga skenario yang dibuat oleh Sen mengenai kondisi orang yang cacat. Dalam skenario yang pertama, orang cacat ini berencana keluar rumah untuk tujuan tertentu namun sayangnya tidak ada yang menolong sehingga ia tidak bisa keluar rumah. Dalam skenario yang kedua, orang cacat ini ditolong oleh sistem pengaman sosial (*social security system*) yang dibuat oleh pemerintah, atau ada orang yang secara sukarela mau membantunya keluar rumah untuk mencapai tujuannya. Sementara dalam skenario yang ketiga, kita andaikan bahwa orang cacat ini memiliki banyak uang sehingga ia dapat menggaji seorang asisten yang dapat mengantarkannya kemana saja ia mau (Sen, 2009:306).

¹³⁰ “...liberty is defined not just in terms of what a person is able to do in a certain sphere, but also includes the demand that others could not have eliminated that ability of this person even if they wanted to do so.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 305

Dari tiga ilustrasi kasus di atas, baik melalui pemahaman republikan Pettit atau pendekatan kapabilitas Sen, orang cacat dalam ilustrasi kasus pertama dapat dikatakan tidak bebas karena ia tidak bisa memenuhi keinginannya. Sementara pada ilustrasi kasus kedua dan ketiga, dalam pendekatan kapabilitas, orang cacat itu memiliki kebebasan meski dengan cara yang berbeda, yang pertama dibantu oleh sistem pengaman sosial (*social security system*) dan yang kedua dibantu oleh kemampuan finansial yang memadai. Sedangkan bila dilihat dari pendekatan republikan, dalam skenario kedua sebenarnya masuk dalam kategori tidak bebas. Hanya skenario ketiga yang dapat dikategorikan sebagai kebebasan. Dalam kasus kedua, dalam pandangan Pettit, meski orang cacat itu dapat melakukan apa yang dikehendaki namun ia bergantung pada sistem pengaman sosial atau orang yang mau membantu secara sukarela (Sen, 2009:306-307).

Teori kebebasan republikan seperti yang dipahami Pettit membatasi pemahaman kebebasan sebagai kemampuan yang beritik tolak pada individu. Kemampuan itu tidak mesti kemampuan fisik tetapi bisa juga kemampuan finansial. Teori ini cenderung menempatkan faktor eksternal yang memungkinkan kemampuan seseorang sebagai wujud dari ketidakbebasan personal. Ini berbeda dengan Sen yang memahami kebebasan sebagai kapabilitas. Dengan pendekatan ini, kemampuan seseorang tidak hanya dibatasi pada kemampuan personal atau finansial, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti solidaritas sosial yang memungkinkan orang lain mau membantu secara sukarela, atau adanya kebijakan publik dalam bentuk sistem pengaman sosial sehingga dapat membantu orang cacat untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan sendiri. Sen mencatat bahwa pemahaman semacam ini absen dalam banyak teori mengenai keadilan (Sen, 2009:307).

Meski demikian, dalam pandangan Sen, bila kita berkomitmen dengan pendekatan keadilan komparatif, paham kebebasan republikan harus kita tempatkan sebagai paham yang perlu dipertimbangkan. Bahkan bukan hanya itu, tentu masih ada banyak paham kebebasan di luar pendekatan kapabilitas dan republikan. Sen memahami keragaman paham kebebasan yang ada bersifat komplementer di mana yang satu dapat melengkapi kekurangan yang lain, dan bukan menegasi (Sen, 2009:309).¹³¹

¹³¹ “When it comes to distinct concepts, a thousand may be difficult to manage, but there should be no great difficulty in being able to see several different aspects of freedom as being complementary rather than competitive.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 309

4.4.4. Kapabilitas dan Pluralitas

Menurut Sen ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam teori kapabilitas. Yang pertama adalah perhatiannya terhadap informasi (*informational focus*).¹³² Pada saat yang sama, perhatian terhadap informasi juga harus memperhatikan hal kedua, yakni bahwa perspektif kapabilitas harus menerima pluralitas kehidupan individu dan masyarakat.¹³³ Dalam perhatiannya terhadap informasi dan pluralitas, paling tidak ada tiga faktor penting yang perlu diperhatikan dalam memahami kemampuan seseorang atau masyarakat dalam mengkonversi sesuatu menjadi sesuatu yang diinginkan. Yang pertama adalah faktor personal, kedua faktor sosial, dan ketiga faktor lingkungan.¹³⁴ Dengan memerhatikan tiga faktor ini, pendekatan kapabilitas harus menerima realitas keragaman manusia (*human diversity*). Setiap masyarakat atau manusia memiliki keunikan personal, sosial dan alam yang tidak bisa digeneralisasi begitu saja. (bdk. Crocker dan Robeyns, 2010:67-68; lih. Sen, 2009:255-256).¹³⁵

Aspek pluralitas informasi menjadi sesuatu yang sangat terkait dalam pendekatan keadilan berbasis kapabilitas. Bagaimana relasi pluralitas informasi ini terjalin dengan ide keadilan? Sen menjelaskan bahwa pada umumnya penilaian kita mengenai keadilan selalu didasarkan pada informasi dari standar yang kita pakai. Jika kita menggunakan standar utilitarisme maka kita cenderung berfokus pada aspek manfaat atau kegunaan saja dan kerap mengabaikan aspek yang lain, misalnya hak atau kebebasan (Sen, 1992:73). Ia menyebut kecenderungan ini sebagai pendasaran pada informasi tunggal atau monisme. Apa yang ingin ia tekankan dalam ide keadilan adalah bahwa perspektif yang digali seharusnya tidak terfokus pada satu standar tertentu.

¹³² “First, the capability approach points to an informational focus in judging and comparing overall individual advantages...” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 232

¹³³ “...the capability perspective is inescapably concerned with a plurality of different features of our lives and concerns.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 233

¹³⁴ Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dalam sub kebebasan dari deprivasi, yang dimaksudkan dengan faktor personal misalnya soal kesehatan, kecukupan gizi, jenis kelamin, kondisi fisik, kepintaran dan hal lain yang merujuk pada aspek personal. Sementara faktor sosial adalah struktur sosial yang melingkupi seseorang seperti masalah kasta, pandangan mengenai gender, hirarki sosial, kebijakan publik dan hal lain lebih merujuk pada moda eksternal yang bersifat sosial. Sedangkan faktor lingkungan adalah kondisi alam yang ditinggali, seperti alam tropis, dingin, padang gurun, rawan bencana dan hal lain yang lebih merujuk pada kondisi alam sekitar.

¹³⁵ Perhatian besar Sen terhadap informasi dan pluralitas juga dapat dilihat dalam “Well-Being, Agency and Freedom”, ketika menyinggung soal perbedaan variabel setiap orang dalam mengkonversi status yang ada menjadi sesuatu yang dituju. Misalnya, konsumsi makanan untuk mencapai level kecukupan nutrisi akan bergantung pada kondisi setiap orang. Paling tidak beberapa hal yang perlu dilihat adalah: level metabolisme, ukuran badan, umur, jenis kelamin, level aktivitas, kondisi alam, penyakit, akses terhadap layanan obat, dan lain-lain. lih. Sen, 1985, “Well-being, Agency and Freedom” dalam *The Journal of Philosophy*, hlm. 198

Dalam pandangannya, kita harus menggali dan mempertimbangkan informasi-informasi lain sehingga penilaian yang dihasilkan akan lebih baik daripada penilaian yang hanya mempertimbangkan informasi dari satu standar tertentu.¹³⁶ Penekanan Sen terhadap metode yang pluralistik telah diuraikan panjang lebar dalam bagian mengenai metode pendekatan komparatif.

Keterkaitan konsep kapabilitas dan pluralitas juga disinggung dalam uraian Sen mengenai kesetaraan (*equality*). Sen memahami konsep kesetaraan sebagai kesetaraan dari sesuatu yang bukan hanya satu. Baginya, pemahaman mengenai kesetaraan tidak dipahami sebagai kesetaraan dalam politik, ekonomi atau kebebasan saja.¹³⁷ Ia cenderung skeptis terhadap gagasan kesetaraan yang hanya mengandalkan satu elemen tertentu saja (bdk. Sen, 2009:295-297). Selain itu, Sen juga menilai bahwa konsep kesetaraan bukan satu-satunya nilai yang perlu diperhatikan dalam teori keadilan. Karenanya ide mengenai kesetaraan kapabilitas bukanlah ide yang didorong dalam upaya membangun masyarakat yang adil. Yang perlu didorong adalah upaya untuk terus memperluas kapabilitas segala hal. Dengan upaya ini diharapkan kita dapat semakin memperluas keadilan dalam masyarakat.¹³⁸

4.5.Kebebasan Kepelakuan

Setelah menjelaskan pengertian kebebasan untuk mencapai jenis *functionings* yang relevan dengan kesejahteraan yang dicita-citakan, kita kemudian masuk pada pengertian kebebasan dalam menentukan pilihan yang dianggap bernilai. Sen menyebut aspek ini sebagai kebebasan kepelakuan atau *agency freedom*. Dalam *The Dewey Lecture*, ia menegaskan bahwa konsep kapabilitas (*well-being freedom*) dan kepelakuan (*agency freedom*) adalah dua konsep penting yang harus diperhatikan ketika seseorang melakukan satu penilaian moral (Sen, *Well-Being, Agency and Freedom [WAF]*, 1985:169). Dua konsep ini dipahami sebagai dua sisi yang saling bergantung pada diri manusia (Sen, 1992:56). Dengan penegasan akan pentingnya aspek kebebasan dalam arti kesempatan untuk mencapai apa yang dianggap bernilai dan kebebasan untuk

¹³⁶ “The substantive content of theories of justice have, thus, included widely different informational bases and also quite divergent uses of the respective information.” Sen, 1992, *Inequality Reexamined*, hlm. 74

¹³⁷ “The central issue here concerns the multiple dimensions in which equality matters, which is not reducible to equality in one space only, be that economic advantage, resources, utilities, achieved quality of life or capabilities.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 297

¹³⁸ “...an institution or a policy may well be defended not on the grounds that it enhances capability equality, but for the reason that it expands the capabilities of all...” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 298

menentukan sesuatu yang dianggap baik, Sen menolak pandangan yang menilai tindakan manusia hanya didasari pada upaya mencari kesejahteraan belaka.

Meski dua konsep kebebasan ini bersifat saling mengandaikan, tentu ada garis pembeda di antara dua konsep ini. Dalam pemahaman Sen, kebebasan dalam arti kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) memiliki makna yang lebih luas daripada konsep kebebasan dalam arti *well-being freedom* yang didasarkan pada aspek kesejahteraan (kebebasan sebagai kapabilitas). Kebebasan kepelakuan didefinisikan sebagai kebebasan seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu yang dianggap baik dan bernilai olehnya.¹³⁹ Ide mengenai kepelakuan tidak bisa dipahami tanpa mengaitkannya dengan gagasan mengenai tujuan, kesetiaan, kewajiban dan ide mengenai yang baik. Jika kebebasan dalam *well-being freedom* hanya terbatas pada kebebasan untuk mencapai sesuatu yang partikular dari kesejahteraan, kebebasan kepelakuan memiliki aspek yang lebih luas, yang tidak diikat hanya oleh satu tujuan melainkan bisa dengan banyak tujuan (Sen, WAF, 1985:203-204).

Ide mengenai kepelakuan dianggap sebagai sesuatu yang penting paling tidak karena tiga pertimbangan. Pertama, karena pada dirinya ia memang penting (pertimbangan intrinsik). Kebebasan kepelakuan sebagai proses di mana seseorang dapat menentukan masa depannya sendiri secara bebas adalah sesuatu yang pada dirinya sangat bernilai bagi hidup setiap manusia. Yang kedua karena pertimbangan instrumental. Dengan adanya kebebasan kepelakuan, seseorang dapat menjadikannya sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang dianggap baik. Dalam hal ini, aspek kesejahteraan bisa saja menjadi salah satu tujuan yang dianggap bernilai. Dan yang ketiga, kebebasan kepelakuan dianggap penting karena memiliki peran dalam membentuk dan memilih tujuan yang dianggap bernilai secara bebas. Sen menyebut pertimbangan ini sebagai pertimbangan konstruktif (Crocker dan Robeyns, 2010:83-84).

Dalam tiga bagian berikut akan diuraikan tiga hal yang berkaitan dengan konsep kebebasan kepelakuan. Yang pertama adalah hubungan ide kepelakuan dan kontrol. Pertanyaan mendasar yang ada dalam bagian ini adalah sejauhmana seseorang memiliki kemampuan untuk mengontrol cita-cita yang dianggap bernilai? Jawaban Sen, kemampuan seseorang untuk mengontrol cita-citanya, selain ditentukan oleh

¹³⁹ “A person's ‘agency freedom’ refers to what the person is free to do and achieve in pursuit of whatever goals or values he or she regards as important.” Sen, 1985, “Well-being, Agency and Freedom” dalam *The Journal of Philosophy*, hlm. 203

kesungguhan sang aktor, juga banyak ditentukan oleh masalah eksternal seperti kemiskinan dan kelaparan. Pandangan ini membawa Sen untuk berpendapat bahwa kebebasan seseorang dapat meluas dan juga dapat menyusut. Masalah kemiskinan, kelaparan, penyakit (malaria misalnya) adalah masalah yang terkait langsung dengan nasib keluasaan kebebasan. Pada bagian yang kedua penulis mengulas hubungan kebebasan dan kesejahteraan. Apakah advokasi terhadap kebebasan selalu berkorelasi dengan kesejahteraan? Jawaban Sen, meski pada umumnya kesejahteraan menjadi salah satu elemen yang dianggap bernilai dan hendak dikejar dalam hidup, namun hal itu tidak selalu terjadi demikian. Dan yang ketiga akan diuraikan relasi ide kepelakuan dengan gagasan tanggung jawab. Ide kepelakuan yang mengandaikan adanya kebebasan untuk mencapai apa yang dianggap bernilai juga menuntut prinsip tanggung jawab. Ide mengenai tanggung jawab, menurut Sen, datang dari adanya kewajiban yang menuntut pada seseorang. Dan penilaian tentang adanya kewajiban didasari oleh daya efektif (*effective power*) yang dimiliki oleh seseorang.

4.5.1. Kepelakuan dan Kontrol

Teori kepelakuan terkait dengan kemampuan seseorang dalam memutuskan tujuan atau pilihan yang dianggap bernilai. Dalam menganalisis tujuan yang dianggap bernilai ini, ada dua hal yang harus dibedakan. Yang pertama adalah capaian tujuan yang tidak memerhatikan peran pelaku tindakan dalam proses pencapaian itu. Sementara yang kedua adalah capaian tujuan yang perlu melihat partisipasi pelaku tindakan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.¹⁴⁰ Dalam perspektif yang pertama, aspek yang dilihat hanya sisi realisasi capaian harapan tanpa memerhatikan peran pelaku tindakan dalam merealisasikan harapan tersebut. Apa yang dicita-citakan sebagai ideal tertentu bisa saja terwujud menjadi kenyataan tanpa ada partisipasi langsung dari aktor yang mencita-citakan hal itu. Sementara dalam perspektif yang kedua partisipasi pelaku tindakan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Sebagai ilustrasi, jika saya memiliki harapan bahwa jalan-jalan di Jakarta tidak mengalami kemacetan dan ternyata harapan saya kemudian tercapai, maka terwujudnya harapan saya ini dapat dilihat dalam dua perspektif di atas. Dari perspektif pertama, terwujudnya jalan-jalan di Jakarta yang bebas dari kemacetan dapat dilihat sebagai

¹⁴⁰ “1. *The occurrence of those things that one values and one aims at achieving*, 2. *The occurrence of such things brought about by one’s own efforts*.” Sen, 1992, *Inequality Reexamined*, hlm. 57

capaian yang cocok dengan harapan saya tanpa memerhatikan partisipasi saya sebagai orang yang berharap demikian. Bisa saja terwujudnya harapan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tepat dalam menangani lalu lintas di Jakarta. Namun dari perspektif yang kedua, perlu diperhatikan sejauhmana partisipasi saya dalam mewujudkan harapan itu. Hal apa saja yang sudah saya lakukan untuk memberikan kontribusi mewujudkan Jakarta yang bebas dari kemacetan? Dari dua perspektif yang berbeda ini, Sen kemudian membedakan apa yang disebut dengan sukses yang terealisasi tanpa memerhatikan peran pelaku tindakan (*realized agency success*) dan sukses yang perlu melihat peran pelaku tindakan di dalamnya (*instrumental agency success*). Distingsi sukses kepelakuan ini (*agency success*) bertujuan untuk melihat sejauhmana peran pelaku tindakan dalam mewujudkan cita-cita yang diidealkan. Pada yang pertama kita tidak memerhatikan apakah seseorang berperan atau tidak, namun pada yang kedua kita justru harus memerhatikan sejauhmana seseorang berperan dalam mewujudkan harapannya itu. Menurut Sen, gagasan penting yang terkait dengan konsep *instrumental agency success* adalah ide mengenai “kontrol”. Yang dimaksud dengan kontrol adalah kemampuan untuk mengontrol terwujudnya sebuah harapan. Pertanyaan mendasar dalam gagasan kontrol adalah sejauhmana seseorang memiliki kemampuan untuk mengontrol pilihan dan tujuannya? (Sen, 1992:57-58).

Dalam pandangan Sen, kemampuan seseorang untuk mengontrol tujuan yang dicita-citakan tidak hanya ditentukan oleh diri sang aktor secara internal. Faktor eksternal di luar diri sang aktor turut memengaruhi kemampuan dalam mengontrol terwujudnya sebuah harapan. Dengan demikian, keluasan kemampuan untuk mengontrol banyak ditentukan dari relasi internal dan eksternal seseorang. Sebagai contoh, seorang kepala keluarga yang ingin menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan menuntutnya untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan, misalnya menambah jam kerja agar penghasilan yang didapat menjadi bertambah, melakukan penghematan pengeluaran, atau meminta istrinya untuk membuat usaha sampingan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh keluarga itu adalah satu hal yang dapat dipikirkan dan dapat direncanakan oleh keluarga tersebut. Namun persoalan kemiskinan yang terjadi ditempatnya adalah sesuatu yang sepenuhnya tidak menjadi bagian dari kontrol yang ia miliki. Masalah kemiskinan yang terjadi di tempatnya terkait dengan kebijakan publik yang menjadi otoritas pemerintah setempat. Sebagai warga ia tentu bisa memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah kemiskinan yang tengah dihadapi,

namun itu tidak sepenuhnya berada dalam kontrol yang ia miliki. Apa yang ingin dikatakan Sen adalah bahwa keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam menangani kemiskinan di tempat itu pada gilirannya juga akan memengaruhi keluasan kebebasan para individu dalam mengontrol cita-citanya untuk mengatasi kemiskinan (bdk. Sen, 1992:64-65).¹⁴¹

Kebijakan publik yang menjadi otoritas pemerintah memang berada di luar konsep *instrumental agency success*, namun kemampuan seseorang untuk mengontrol harapannya akan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar diri para individu tersebut. Menurut Sen, dalam menilai masalah kebebasan kita harus melihat fakta-fakta yang menghambat kebebasan dan memerhatikan kondisi macam apa yang perlu diciptakan agar kebebasan tidak lagi terhambat.¹⁴² Kebijakan publik yang berhasil mengatasi masalah yang tidak dikehendaki, misalnya kemiskinan, kelaparan atau epidemik, akan memberikan pengaruh pada keluasan kebebasan real setiap orang. Dengan demikian, gagasan mengenai kebebasan untuk mencapai sesuatu banyak ditentukan oleh relasi faktor internal dan eksternal yang ada. Dalam pandangan Sen, model analisis semacam ini banyak membantu kita dalam memahami masalah kebebasan dan ketidaksetaraan kebebasan pada setiap orang (Sen, 1992:66).

Signifikansi faktor eksternal dalam menentukan keluasan kebebasan seseorang membawa Sen pada kesimpulan bahwa masalah seperti kemiskinan, kelaparan dan penyakit adalah masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan kebebasan seseorang. Kebebasan seseorang untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai, apakah meluas atau menyusut, akan banyak ditentukan oleh sejauhmana masalah kemiskinan, kelaparan dan penyebaran penyakit berhasil diatasi. Jika kelaparan berhasil diatasi oleh sebuah kebijakan publik yang tepat, maka ketiadaan kelaparan akan semakin memperluas kebebasan seseorang untuk memilih kehidupan yang dianggap

¹⁴¹ Dalam menjelaskan ide mengenai kontrol, Sen membedakan apa yang disebut daya efektif (*effective power*) dan kontrol prosedural (*procedural control*). Daya efektif terkait dengan kemampuan seseorang untuk mewujudkan cita-citanya. Sementara kontrol prosedural terkait dengan kemampuannya untuk mengontrol pilihannya. Sebagai sebuah ilustrasi, jika hari ini saya sudah berencana untuk berangkat kerja, maka badan saya yang sehat dan tersedianya kendaraan untuk berangkat adalah bagian dari daya efektif yang dapat memungkinkan saya untuk berangkat bekerja. Namun ketika saya hendak berangkat ternyata anak saya yang kecil tiba-tiba demam adalah contoh kejadian yang sepenuhnya tidak bisa saya kontrol dalam kaitannya dengan rencana saya. Apa yang ingin dikatakan Sen mengenai kontrol adalah bahwa gagasan mengenai kontrol bukanlah sesuatu yang sepenuhnya berada di tangan agen. bdk., Sen, 1985, "Well-being, Agency and Freedom" dalam *The Journal of Philosophy*, hlm. 208-212

¹⁴² "In assessing the freedom that we enjoy and examining how unequal we are in that respect, the informational basis of the evaluation has to take into account our counterfactual choices (what we would choose) and their relation to what is made to happen." Sen, 1992, *Inequality Reexamined*, hlm. 66

baik. Dengan pengandaian ini maka kebebasan untuk memilih kehidupan yang dianggap baik banyak bergantung pada faktor eksternal yang memungkinkan seseorang mampu mengontrol tujuan yang ingin diraih. Menurut Sen, dalam merefleksikan gagasan kebebasan sangat sedikit pemikir yang memerhatikan pengertian kebebasan dalam arti kontrol atas proses aktual memilih dan kebebasan dari deprivasi. Pengertian kebebasan dari kelaparan atau kebebasan dari penyakit malaria banyak dianggap sebagai pengertian yang tidak cocok atau tidak memiliki hubungan dengan ide kebebasan (Sen, 1992:67).

4.5.2. Kebebasan versus Kesejahteraan

Apakah kebebasan selalu berkorelasi dengan kesejahteraan? Dan apakah kesejahteraan selalu berimplikasi pada kebahagiaan? Pada umumnya, ketika seseorang memutuskan pilihan yang dianggap bernilai, aspek kesejahteraan adalah salah satu elemen penting yang masuk dalam pertimbangan.¹⁴³ Namun hal itu tentu tidak selalu berlaku.¹⁴⁴ Sebagai contoh, keputusan seorang dokter yang memilih pergi ke daerah miskin yang tertimpa bencana untuk menolong para korban dapat dianggap sebagai pilihan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kesejahtraannya. Di satu sisi ia sudah menegaskan kebebasan kepelakuannya untuk memilih menolong para korban bencana. Di sisi yang lain, pilihan itu tidak berimplikasi pada peningkatan kesejahtraannya. Yang terjadi bisa sebaliknya, dokter itu akan menghabiskan waktu untuk menolong para korban dan bahkan memiliki risiko terkena penyakit yang sedang mewabah di daerah tersebut. Orientasi kebebasan seseorang dalam memilih sesuatu yang dianggap bernilai tidak selalu diarahkan pada pilihan yang berimplikasi pada peningkatan kesejahtraannya.

Kemungkinan terjadinya gerak yang kontradiktif antara gerak yang didorong oleh motif kesejahteraan (*well-being freedom*) dengan gerak yang didorong oleh kebebasan (*agency freedom*) adalah karena perbedaan wilayah operasi dua konsep ini. Kebebasan dalam kapabilitas (*well-being freedom*) terkait dengan penilaian mengenai kesejahteraan seseorang (*advantage*), sementara kebebasan dalam *agency freedom*

¹⁴³ "It is possible to argue that in an important sense the agency aspect of a person is more comprehensive than the well-being aspect. A person's goals will, in the case of 'normal' people, include *inter alia* the pursuit of their own well-being." Sen, 1992, *Inequality Reexamined*, hlm. 69

¹⁴⁴ "...increased freedom may itself contribute to the achievement of well-being, since choosing and deciding may be valuable part of living well. But notwithstanding all this, there can be a conflict between the achievement of well-being, on the one hand, and freedom in either form." Sen, 1992, *Inequality Reexamined*, hlm. 62

terkait dengan penilaian mengenai yang baik dan juga tanggung jawab yang didasari pada daya efektif yang dimiliki.¹⁴⁵ Dalam menjelaskan perbedaan wilayah operasi dua konsep ini, ada sebuah ilustrasi yang diharapkan dapat membantu. Bayangkan jika Anda sedang bersantai di tepi pantai di sore hari yang hangat, menikmati makanan dan minuman yang lezat serta ditemani oleh sang kekasih. Namun tiba-tiba Anda melihat seorang anak yang tengah tenggelam di lepas pantai dan meminta tolong. Dalam kalkulasi yang Anda perhitungkan, Anda bisa menolong dan menyelamatkan anak tersebut. Atas dasar kalkulasi itu, Anda mengambil keputusan untuk menolong karena rasa tanggung jawab dan daya efektif yang Anda miliki. Pada momen ini, Anda tengah mengambil satu keputusan yang didasarkan pada kebebasan kepelakuan. Keputusan Anda untuk menolong tentu akan mengurangi kenyamanan dan kesenangan yang tengah Anda nikmati saat itu. Itu artinya aspek kesejahteraan (*well-being*) Anda akan semakin menyusut. Namun pada saat yang sama, keputusan untuk menolong bisa memperluas *agency freedom* Anda, karena Anda sudah mengambil keputusan yang didasarkan pada kebebasan untuk memilih apa yang Anda anggap baik dan berdasarkan pada daya efektif yang Anda miliki (Sen, WAF, 1985:206-207).¹⁴⁶

Kemudian, apakah kesejahteraan selalu berimplikasi pada kebahagiaan? Menurut Sen, di dalam ekonomi seakan ada asumsi bahwa praktik berekonomi terkait dengan upaya membuat hidup seseorang semakin baik dan sejahtera. Tujuan pada kehidupan yang baik dan sejahtera ini dianggap sebagai simbol dari apa yang disebut sebagai kondisi bahagia (*happiness*). Karena asumsi ini, sebuah kebijakan publik kerap diarahkan untuk tujuan tersebut. Pengembangan kebijakan publik, khususnya kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh satu otoritas tertentu pada umumnya diarahkan pada peningkatan pendapatan, karena pendapatan yang tinggi identik dengan kehidupan yang baik, sejahtera dan bahagia. Namun yang menjadi persoalan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam data empiris, peningkatan kemakmuran dan pendapatan seseorang

¹⁴⁵ "...it can be said that the well-being aspect of a person is important in assessing a person's advantage, whereas the agency aspect is important in assessing what a person can do in line with his or her conception of the good." Sen, 1985, "Well-being, Agency and Freedom" dalam *The Journal of Philosophy*, hlm. 206. Dan: "Freedom in general and agency freedom in particular are parts of an effective power that a person has..." Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 271

¹⁴⁶ "Since agency freedom includes inter alia the freedom to pursue your own well-being, it can, of course, also be said that in that respect your agency freedom too would have been adversely affected." Sen, 1985, "Well-being, Agency and Freedom" dalam *The Journal of Philosophy*, hlm. 207

tidak serta merta berkorelasi dengan kondisi hidup yang bahagia.¹⁴⁷ Sen melihat bahwa relasi antara pendapatan dan kebahagiaan sangatlah kompleks daripada yang kita bayangkan.

4.5.3. Kepelakuan dan Tanggung Jawab

Menurut Crocker dan Robeyns, seseorang atau kelompok dapat dikatakan sudah menjadi pelaku bila menerapkan empat hal berikut. Pertama adalah prinsip *self-determination*. Dengan prinsip ini, seseorang atau kelompok memutuskan sendiri apa yang menjadi tujuannya tanpa ada paksaan dari pihak luar. Paksaan eksternal untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki dapat dianggap sebagai sejenis kekerasan terhadap prinsip kepelakuan. Yang kedua, pilihan yang diambil sudah didasarkan pada nalar atau rasio (*reason orientation* dan *deliberation*). Dengan kata lain, pilihan yang diambil bukan karena paksaan tradisi atau dogma, melainkan hasil dari proses deliberasi rasional yang berlangsung secara sehat. Dalam proses deliberasi itu, seseorang juga memiliki kesempatan untuk mempertanyakan dan mengevaluasi nilai atau norma yang sudah ada. Yang ketiga adalah dimensi tindakan (*action*). Sebuah keputusan pilihan tidak bermakna bagi konsep kepelakuan jika keputusan itu hanya berhenti pada momen keputusan. Momen keputusan rasional juga mengandaikan adanya tindakan nyata berdasarkan putusan dan pilihan yang sudah diambil. Dan dimensi kepelakuan yang keempat, tindakan yang dilakukan seorang pelaku memberikan pengaruh signifikan terhadap perluasan kebebasan. Semakin luas kebebasan yang diciptakan semakin besar pula kemampuan manusia untuk menentukan hidupnya (Crocker dan Robeyns, 2010:80-82).

Selain empat hal di atas yang menjadi pengandaian dalam ide kepelakuan, Sen juga menyinggung gagasan mengenai daya efektif (*effective power*) pada diri setiap orang. Dengan daya efektif yang dimiliki, setiap orang dituntut untuk bertanggungjawab melakukan sesuatu yang bisa memperluas kebebasan.¹⁴⁸ Yang dimaksud dengan daya efektif adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis menuntutnya untuk membagi

¹⁴⁷ "There is considerable empirical evidence that even as people in many parts of the world have become richer, with much more income to spend in real terms than ever before, they have not felt particularly happier than before." Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 272

¹⁴⁸ "Freedom in general and agency freedom in particular are parts of an effective power that a person has, and it would be a mistake to see capability, linked with these ideas of freedom, only as a notion of human advantage: it is also a central concern in understanding our obligations." Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 271

kemampuan tersebut ketika ia berada di satu daerah di mana terdapat banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bisa membaca dan menulis. Tuntutan untuk berbagi kemampuan, dalam pandangan Sen, tidak perlu menunggu bahwa ia harus diangkat menjadi guru oleh pemerintah setempat terlebih dahulu. Tuntutan itu datang karena ia memiliki daya efektif untuk melakukan perubahan dan membuat kebebasan warga sekitar dapat semakin meluas. Penerimaan adanya tuntutan kewajiban berimplikasi terhadap pandangan bahwa pelaku tindakan yang dipahami adalah pelaku yang memiliki tanggung jawab moral.¹⁴⁹ Dan tuntutan tanggung jawab untuk melakukan satu kewajiban tertentu datang dari kehadiran daya efektif untuk melakukan kewajiban itu.¹⁵⁰

Dalam menguraikan ide tentang kewajiban, Sen membedakan dua macam tuntutan kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban yang sempurna atau kewajiban langsung (*perfect obligation*), sedangkan yang kedua adalah kewajiban tak sempurna atau kewajiban tidak langsung (*imperfect obligation*).¹⁵¹ Terhadap para pengemis di jalan-jalan, meski kita bukan saudara atau kerabat mereka dan juga bukan pejabat yang mengurus masalah-masalah publik, sebenarnya tetap menuntut kita untuk bertanggung jawab dan membantu mereka keluar dari ketidakbebasan yang tengah dialami. Tuntutan untuk bertanggungjawab kepada mereka memang tidak didasarkan pada ide kewajiban langsung (*perfect obligation*), melainkan pada tuntutan kewajiban tidak langsung (*imperfect obligation*). Menurut Sen, tuntutan untuk bertanggung jawab kepada mereka yang tidak menjadi tanggung jawab kita secara langsung adalah karena adanya daya efektif yang kita miliki. Hal yang menjadi dasar bagi tuntutan untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu sebenarnya bukan karena ikatan kontraktual tertentu, melainkan karena

¹⁴⁹ “The importance of the agency aspect, in general, relates to the view of persons as responsible agents. Persons must enter the moral accounting by others not only as people whose well-being demands concern, but also as people whose responsible agency must be recognized.” Sen, 1985, “Well-being, Agency and Freedom” dalam *The Journal of Philosophy*, hlm. 204

¹⁵⁰ Sen mengkritik perspektif kontrak sosial yang memahami kewajiban sejauh ada justifikasi kontrak yang sudah dibuat. Bagi Sen, kewajiban hadir karena adanya kemampuan atau daya untuk melakukan sesuatu. Lih. Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 205-207

¹⁵¹ Untuk menjelaskan perbedaan kewajiban ini, Sen mengambil sebuah ilustrasi yang diinspirasi dari kejadian nyata pada tahun 1964 di Queens, New York. Seorang wanita bernama Catherine (Kitty) Genovese secara berulang-ulang dianiaya oleh seseorang dan disaksikan oleh orang lain lewat apartemen tempat mereka tinggal. Namun sayang, teriakan minta tolongnya diabaikan oleh orang-orang yang menyaksikan. Dari kejadian ini ada tiga hal mesti dibedakan namun saling terhubung satu sama lain: 1. Kebebasan perempuan tersebut untuk tidak disakiti telah dirusak; (2) kewajiban si penganiaya untuk tidak menganiaya dan membunuh juga sudah dirusak dan (3) kewajiban orang-orang yang menyaksikan untuk menolong orang yang mengalami penganiayaan juga sudah dirusak. Menurut Sen yang pertama adalah isu primer, yang kedua pelanggaran terhadap kewajiban langsung dan yang ketiga pelanggaran terhadap kewajiban tak langsung. Sen 2009, *The Idea of Justice*, hal. 374

kita memiliki daya efektif (*effective power*) untuk melakukan perubahan dalam memperluas kebebasan.¹⁵²

4.6.Rangkuman

Ide keadilan dalam arti *nyaya* menempatkan kehidupan dan kebebasan sebagai tema yang cukup sentral. Kehidupan yang dipahami oleh Sen adalah hidup yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek kesejahteraan saja, tetapi juga perlindungan terhadap nilai-nilai yang dianut oleh manusia itu sendiri. Kehidupan dan nilai yang dianut menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Setiap kehidupan memiliki konsep mengenai nilai yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dalam pandangan Sen, kehidupan dipahami sebagai sesuatu yang bersifat plural pada dirinya. Dan jika kebebasan juga dianggap sebagai sesuatu yang sentral maka seharusnya kita perlu memahami kebebasan sebagai hak setiap orang atau komunitas untuk mencapai apa yang dianggap bernilai dalam hidupnya. Dengan pemahaman ini, perlindungan terhadap nilai yang dipeluk oleh satu kehidupan tertentu menjadi bagian dari pemenuhan hak kebebasan bagi semua.

Sen memahami kebebasan dalam dua pengertian: yang pertama kebebasan dalam arti kesempatan (*opportunity*) dan kebebasan dalam arti proses. Kebebasan yang pertama disebut sebagai kapabilitas (*well-being freedom*), sementara kebebasan yang kedua dipahami sebagai kebebasan kepelakuan (*agency freedom*). Dalam pengertian yang pertama, kebebasan dipahami sebagai bebas untuk mencapai apa yang dianggap bernilai, bebas dari kemiskinan, bebas dari penyakit, bebas dari kelaparan dan kebebasan lain yang terkait dengan aspek kesejahteraan. Sementara pengertian yang kedua berarti bahwa apa yang dianggap ideal dan bernilai oleh seseorang tidak dideterminasi oleh kekuatan tertentu. Itu artinya, pilihan seseorang terhadap sesuatu berangkat dari pilihannya sendiri yang dilakukan secara bebas tanpa paksaan. Dua pengertian kebebasan ini saling terkait karena kemampuan seseorang untuk bebas

¹⁵² “The basic general obligation here must be to consider seriously what one can reasonably do to help the realization of another person’s freedom, taking note of its importance and influenceability, and of one’s own circumstances and likely effectiveness.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 372-373. “The recognition of human rights is not an insistence that everyone rises to help prevent any violation of any human right no matter where it occurs. It is, rather, an acknowledgement that if one is in a position to do something effective in preventing the violation of such a right, then one does have a good reason to do just that – a reason that must be taken into account in deciding what should be done.” Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 373

menentukan apa yang dianggap bernilai dalam hidupnya banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk bebas dari kemiskinan, kelaparan dan penyakit.

Dua pengertian kebebasan ini terkait erat dengan ide mengenai keadilan, yaitu semakin luas kebebasan seseorang atau komunitas baik dalam arti kapabilitas maupun kepelakuan semakin berkurang pula ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat. Sebaliknya jika kebebasan itu semakin menyusut, maka masalah ketidakadilan akan semakin membesar. Dalam pandangan Sen, setiap tindakan baik yang bersifat individual maupun kolektif, perseorangan atau institusi seharusnya diarahkan pada upaya memperluas kebebasan dalam pengertian kesejahteraan dan juga kepelakuan. Karena setiap perluasan kebebasan yang dicapai akan berimplikasi pada perluasan keadilan yang dapat dinikmati.

BAB 5

PRINSIP EPISTEMIK DAN TUNTUTAN ETIS KEADILAN

5.1. Pendahuluan

Ada tiga bagian yang akan diulas dalam bab 5 ini. Yang pertama adalah ulasan atas bab 3 tentang tuntutan untuk memperluas cakrawala nalar. Yang kedua, ulasan atas bab 4 tentang sentralitas kebebasan dalam ide keadilan *nyaya*. Dan yang ketiga adalah tanggapan penulis atas ide keadilan Sen. Dalam bab 3, sudah diuraikan gagasan yang sangat mendasar dalam ide keadilan Amartya Sen soal pluralitas nalar dan tuntutan untuk selalu memperluas perspektif. Gagasan ini menjadi sangat sentral jika kita membaca buku *The Idea of Justice* dan beberapa karya Sen yang lain – sebagaimana yang sudah ditunjukkan di dalam bab 3. Kesimpulan yang diperoleh dari uraian yang ada dalam bab 3 adalah sebuah rumusan mengenai prinsip epistemik keadilan Amartya Sen. Yang dimaksud dengan rumusan epistemik keadilan adalah bahwa apa disebut sebagai adil dan tidak adil, dalam pandangan Sen, tidak dimonopoli oleh satu perspektif yang berangkat dari kelompok atau orang tertentu saja. Rumusan tentang adil dan tidak adil selalu menuntut proses diskusi bersama di antara berbagai perspektif yang ada. Selain prinsip epistemik, dalam bab 3 juga tersirat sebuah tuntutan etis keadilan yang selalu menuntut setiap pihak untuk memperluas perspektif. Pertimbangan yang menuntut untuk memperluas perspektif adalah karena pandangan apapun pada dasarnya selalu tidak sempurna dan bersifat tentatif sehingga harus mendengarkan perspektif lain. Karena ide keadilan tidak bisa didasarkan hanya pada satu pandangan dan adanya tuntutan untuk memperluas perspektif – sebagai implikasi – maka ide dasar yang ada dalam bab 3 adalah soal prinsip epistemik yang memiliki dimensi etis.

Sementara pada bab 4 telah diuraikan hal yang juga sangat mendasar dalam ide keadilan Amartya Sen, yakni tentang proteksi terhadap kebebasan. Ada dua pengertian kebebasan yang diajukan oleh Sen, yakni kebebasan dalam arti proses dan kebebasan dalam arti kesempatan. Pengertian yang pertama diuraikan panjang lebar dalam sub-bab mengenai kebebasan kepelakuan (*agency freedom*) dan pengertian yang kedua dalam konsep kapabilitas (kebebasan kesejahteraan/*well-being freedom*). Melalui dua pengertian kebebasan ini diperoleh pemahaman bahwa masalah kebebasan menjadi sangat mendasar dalam upaya mengurangi ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang dituntut oleh Sen adalah upaya perluasan kebebasan baik dalam arti

kepelakuan maupun kesejahteraan. Tuntutan terhadap perluasan kebebasan memiliki korelasi pada upaya pengurangan ketidakadilan. Melalui pemahaman ini, penulis mencoba merumuskan sebuah tuntutan etis dari bab 4 (dan juga bab 3) dalam sebuah imperatif yang berbunyi “bertindaklah dengan nalar terbuka, yang sedemikian rupa sehingga dapat memperluas kebebasan kepelakuan dan kebebasan kesejahteraan!”.

Dan yang terakhir, setelah merumuskan dua hal mendasar mengenai prinsip epistemik dan tuntutan etis keadilan Amartya Sen – yang menjadi tema penelitian tesis ini, selanjutnya akan diuraikan beberapa catatan atas gagasan dasar yang diajukan oleh Sen. Ide yang ingin penulis garisbawahi dan komentari dalam teori keadilan Amartya Sen adalah soal kebebasan dan pandangan mengenai yang baik (*concept of the good*). Bagian tanggapan ini akan dibagi menjadi dua bagian: yang pertama soal batas-batas kebebasan partikularitas nilai dan yang kedua soal konsep mengenai yang baik dan objektivitas nilai. Setelah menguraikan tanggapan, bab ini akan ditutup dengan sebuah rangkuman.

5.2. Penalaran Publik Sebagai Prinsip Epistemik

Pada umumnya, teori-teori besar mengenai keadilan lahir dari satu proses refleksi seorang filsuf tentang hidup yang tidak adil. Perlakuan diskriminatif, ketidakpastian hidup, kemiskinan dan kediktatoran adalah beberapa hal yang kerap menjadi inspirasi sehingga mendorong seorang filsuf untuk merumuskan ide mengenai keadilan. Mereka tidak hanya mendiagnosis mengapa kenestapaan hidup itu terjadi, tetapi juga membuat sebuah rumusan yang mampu menutup katup tindakan tidak adil. Rumusan-rumusan yang dihasilkan oleh para filsuf besar yang pernah ada tentu saja sangat penting, namun rumusan itu tidak harus dibakukan menjadi bingkai keadilan yang berlaku untuk semua di manapun dan kapanpun. Paling tidak ada beberapa alasan mengapa kita harus memperlakukan rumusan yang dihasilkan oleh para pemikir besar itu dengan cara demikian. Pertama, karena masalah yang dihadapi dari waktu ke waktu semakin kompleks. Kedua, karena kita juga dihadapkan pada perspektif mengenai keadilan yang sangat beragam. Ketiga, lebih dalam dari alasan dua yang pertama, karena adanya tuntutan untuk memperluas perspektif keadilan yang tidak didasarkan hanya pada satu pandangan tertentu. Keempat, tuntutan untuk memperluas perspektif didasari oleh prinsip hak dan kebebasan setiap orang atau komunitas untuk didengar pendapatnya.

Paling tidak karena alasan-alasan itu Sen mencoba menawarkan ide keadilan melalui pendekatan diskursus terbuka – proses yang berlangsung dalam praktik penalaran publik. Ide keadilan yang diyakini oleh seseorang atau komunitas tertentu harus dikontestasikan dengan ide keadilan yang dipegang oleh pihak lain. Menganggap ide keadilan yang diyakini sebagai benar dan bersifat universal sehingga karena itu harus diaplikasikan oleh semua umat manusia di manapun dan kapanpun adalah sejenis kekerasan yang menjadi problematis bagi ide keadilan itu sendiri. Pemaksaan gagasan oleh satu komunitas terhadap komunitas lain yang memiliki watak dan sejarah yang berbeda dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil. Setiap gagasan seharusnya dapat berdiri setara dalam menyampaikan pandangan dan harus ada kemauan untuk mendengar pandangan yang disampaikan oleh pihak lain. Tanpa diskursus terbuka semacam ini, setiap pihak cenderung memaksakan apa yang diyakini sebagai adil tanpa mempertimbangkan ide keadilan pihak lain. Atau jika tidak demikian, mereka cenderung menutup diri seraya mengatakan “apa yang kamu anggap benar adalah benar bagimu, dan apa yang aku anggap benar adalah benar bagiku”, tanpa pernah mau menguji validitas keyakinannya.¹⁵³

Dengan melakukan diskursus secara terbuka, setiap pihak memiliki asumsi bahwa apa yang mereka yakini selalu tidak sempurna sehingga karenanya dituntut untuk membuka ruang penalaran publik agar dapat melengkapi apa yang masih dianggap kurang. Bahkan apa yang dihasilkan dari proses ini pun selalu bersifat tentatif untuk saat itu dan di situ sehingga harus dievaluasi dan dikontestasikan kembali ketika menghadapi persoalan di waktu dan tempat yang berbeda. Membuka ruang penalaran yang terbuka bagi setiap pihak yang berkepentingan menjadi mekanisme yang sangat penting dalam memaknai keadilan sebagai proses. Yang menjadi penting dari proses ini adalah bahwa setiap perspektif telah diberi tempat untuk menyampaikan pandangannya mengenai masalah yang tengah dihadapi. Memberikan kesempatan kepada setiap pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangannya menjadi poin penting bagi upaya mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat. Proses ini menjadi jembatan untuk masuk pada persoalan berikutnya, yakni tentang isi dari tuntutan keadilan sendiri – yang diuraikan dalam tuntutan etis keadilan Sen.

¹⁵³ Sen menyebut kecenderungan untuk menghindar dari kontestasi nalar sehingga mengatakan “kamu benar untuk komunitasmu, dan aku benar untuk komunitasku” sebagai toleransi yang tidak merangkul (*disengaged toleration*) atau resolusi yang malas (*lazy resolution*). Lih. Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. x

Proses penalaran publik – yang juga dapat disebut sebagai deliberasi secara terbuka – dalam menilai adil dan tidak adil sebagaimana yang dipahami oleh Sen dapat dipahami sebagai prinsip epistemik ide keadilannya. Melalui penalaran publik, penilaian mengenai yang adil dan tidak adil bukanlah sebuah ide yang final melainkan lebih dilihat sebagai proses pencarian yang harus selalu diperbaharui dan dievaluasi setiap waktu. Melaluinya, penilaian mengenai yang adil dan tidak adil juga bukan monopoli dari satu kebudayaan tertentu. Setiap kebudayaan memiliki hak yang setara untuk menyuarakan gagasan keadilannya, dan pada saat yang sama setiap kebudayaan juga harus memiliki keinsafan untuk mendengar gagasan yang disampaikan oleh kebudayaan lain. Dalam ide keadilan Sen, kebudayaan tertentu – kebudayaan Barat misalnya – tidak dilihat sebagai pusat dari peradaban dunia yang karenanya kebudayaan-kebudayaan lain harus mengikuti cara pandangnya. Tentu saja Sen tidak bermaksud menutup ruang bagi satu kebudayaan untuk belajar dari kebudayaan yang lain. Dengan melakukan diskursus terbuka setiap pihak justru dituntut untuk belajar dari pengalaman terbaik yang sudah dicapai oleh kebudayaan lain.

Selain sebagai prinsip epistemik, praktik penalaran publik yang menuntut perspektif yang lebih luas juga dapat dimaknai sebagai prinsip yang memiliki dimensi etis. Mengapa ia dimaknai demikian? Dalam praktik diskursus terbuka terdapat tuntutan moral untuk memperluas perspektif di mana kita tidak mendasarkan keputusan yang kita ambil hanya pada satu pandangan tertentu – Sen menyebut kecenderungan semacam ini disebut sebagai gejala monisme – sehingga karenanya praktik penalaran publik tidak hanya dipahami sebagai prinsip epistemik dari keadilan Sen tetapi juga sebagai tuntutan yang memiliki dimensi etis. Penalaran yang hanya didasarkan pada satu pandangan tertentu tanpa pernah mengkontestasikan pandangan tersebut dengan pandangan-pandangan lain yang berbeda, bagi Sen dapat dianggap jatuh pada kecenderungan teori keadilan transendental. Untuk terhindar dari kecenderungan itu, Sen sangat menekankan pendekatan penalaran publik yang lebih luas sehingga dengannya kita dapat membandingkan kekurangan dan kelebihan sebuah pandangan dalam menjawab persoalan yang tengah dihadapi.

Gagasan Sen tentang penalaran publik atau diskursus terbuka tentu saja memiliki beberapa pengandaian. Pengandaian yang pertama adalah prinsip kesetaraan setiap kebudayaan. Sen menempatkan pluralitas kebudayaan dalam posisi yang setara sehingga karenanya setiap kebudayaan memiliki hak yang sama untuk

mempublikasikan pandangannya mengenai sesuatu dan pada saat yang sama ia juga menuntut agar setiap kebudayaan memiliki kemampuan untuk mendengar suara yang berbeda dari kebudayaan lain. Dengan cara ini, setiap kebudayaan dituntut untuk mengkontestasikan argumentasinya secara setara dan juga bisa saling belajar dalam mengatasi masalah yang barangkali pernah berhasil diatasi oleh kebudayaan lain. Pengandaian yang kedua tentu saja adalah kebebasan. Setiap pandangan harus memiliki kebebasan untuk menyatakan pandangan yang dianggap baik tanpa ada tekanan dari pihak lain. Dengan adanya kebebasan, setiap pihak dapat menyampaikan sebuah perspektif sebagaimana yang diyakini dan tidak ada pretensi untuk memanipulasi perspektifnya. Tanpa kebebasan sangat sulit bagi kita untuk menilai sebuah penalaran publik sebagai penalaran yang terbuka dan objektif.

Pengandaian yang ketiga, sebagaimana yang sudah diuraikan panjang lebar dalam bab 3 adalah prinsip objektivitas. Tuntutan untuk melakukan diskusi secara terbuka tentu saja didorong oleh motivasi mencari yang objektif. Bahkan – dengan cukup hati-hati – agar tidak jatuh pada ilusi mengenai yang objektif Sen menuntut setiap pandangan untuk mendengar pandangan yang berbeda dan berseberangan sehingga kelemahan dan kekeliruan sebuah pandangan dapat dilihat. Yang keempat adalah prinsip imparisial. Dengan tuntutan sikap imparisial, Sen mencoba menutup kemungkinan sebuah keputusan yang memiliki kecenderungan pada parsialitas tertentu. Sebagaimana yang juga diyakini oleh Rawls, kecenderungan pada parsialitas tertentu dapat melukai prinsip *fairness* dari keadilan. Bahkan Sen mencoba untuk melampaui gagasan imparisialitas Rawls – yang menurutnya dibatasi oleh kontrak kewarganegaraan – melalui ide imparisialitas terbuka yang membuka sekat keadilan yang didasarkan pada kontrak sosial tertentu. Melalui ide imparisialitas terbuka, pertimbangan mengenai adil dan tidak adil bukan lagi monopoli mereka yang sudah terikat dalam kontrak tetapi lebih didasarkan pada perspektif kemanusiaan yang lebih luas.

Asumsi yang kelima adalah penerimaan terhadap partikularitas atau lokalitas. Sen menolak gagasan apapun yang memiliki kecenderungan untuk menggeneralisasi setiap masalah atau solusi dalam arti dapat diaplikasikan kapanpun dan di manapun. Kehendak untuk menggeneralisasi masalah, dalam pandangan Sen, dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap gagasan lain yang memiliki cara berada yang berbeda. Melihat dunia Timur dengan kaca mata Barat misalnya adalah sebuah kekeliruan dan dapat dianggap sebagai sikap tidak adil terhadap kebudayaan lain. Setiap

kebudayaan, pandangan, keyakinan atau perspektif adalah sesuatu yang bersifat partikular dan setiap pihak dituntut untuk menghargai cara berada masing-masing. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, hal ini tidak berarti bahwa setiap kebudayaan dibiarkan dengan cara beradanya sendiri, karena Sen juga menuntut setiap pihak membuka ruang untuk melakukan penalaran publik secara terbuka. Dan asumsi yang keenam adalah kesementaraan. Setiap keputusan yang dihasilkan dari proses penalaran yang terbuka bukanlah sesuatu yang tetap, abadi dan sempurna. Meyakini sesuatu sebagai sempurna dan paripurna dapat menutup ruang pengujian terhadap apa yang sudah dihasilkan.¹⁵⁴

Yang ketujuh, dalam diskursus rasional yang terbuka tentu mengasumsikan penolakan terhadap segala bentuk tindak kekerasan. Tindak kekerasan baik dalam bentuk kata-kata, apa lagi fisik dapat merusak makna diskursus terbuka yang rasional. Proses kontestasi nalar sebagaimana yang dipahami oleh Sen (dan juga oleh banyak pemikir lain) mengeksklusi seluruh praktik kekerasan, pemaksaan dan intimidasi. Dengan mengeksklusi seluruh praktik kekerasan dari diskusi terbuka maka hasil yang diharapkan dapat diabdikan pada pencarian mengenai yang baik bagi kehidupan bersama yang lebih adil. Melalui pengandaian-pengandaian yang ada dalam praktik wacana terbuka, proses penalaran publik tentu diharapkan dapat berlangsung dalam suasana yang dapat mengurangi rasa ketidakadilan terhadap pandangan-pandangan yang berbeda di satu sisi dan berhasil untuk sampai pada hasil yang komprehensif di sisi yang lain.

5.3. Perluasan Kebebasan Sebagai Tuntutan Etis

Melalui penalaran publik yang terbuka, Sen berusaha untuk tidak jatuh pada salah satu model etika konsekuensial (teleologis) atau deontologis – pandangan etika yang mendasarkan pada prinsip kewajiban. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam praktik penalaran publik, untuk menilai tentang adil dan tidak adil, setiap perspektif perlu melakukan proses penalaran publik satu sama lain secara setara. Dalam praktik penalaran publik, setiap pihak bukan hanya melakukan publikasi pandangannya (gerak keluar), tetapi juga perlu mendengar pandangan pihak lain secara seksama (gerak kedalam). Dengan praktik penalaran semacam ini, penilaian mengenai adil dan tidak

¹⁵⁴ Dalam artikel berjudul “Incompleteness and Reasoned Choice”, Sen menegaskan bahwa sebuah pilihan atau putusan yang dihasilkan selalu bersifat tentatif atau tidak sempurna. Hasil yang dicapai selalu menunggu pertimbangan yang lebih matang atau informasi yang lebih kaya. Elaborasi lebih kaya dapat dilihat dalam “Incompleteness and Reasoned Choice”.

adil diharapkan sudah didasarkan pada proses yang terbuka sehingga kemungkinan adanya pandangan yang kepentingannya tidak diakomodasi dapat ditekan sedemikian rupa. Meski Sen sangat menekankan praktik penalaran terbuka semacam ini, tidak berarti bahwa proses ini tanpa tujuan yang harus dipertimbangkan. Sen menyebut tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam realisasi keputusan, yang pertama bagaimana sebuah keputusan diaplikasikan (proses), yang kedua sejauhmana sebuah keputusan sudah didasarkan pada prinsip tanggungjawab (kepelakuan) dan yang ketiga sejauhmana sebuah keputusan berimplikasi pada relasi kemanusiaan (relasi) – uraian ini dijelaskan dalam bagian tentang hasil komprehensif.

Jika ditelisik lebih dalam, sebenarnya ada dua hal yang mendasari tiga pertimbangan ini. Pertama, perhatian pada kehidupan dan kedua, perhatian pada kebebasan. Yang dimaksud dengan kehidupan adalah kehidupan manusia yang riil dan bersifat plural. Kehidupan manusia yang riil selalu bersifat partikular sehingga tidak bisa digeneralisasi dalam satu kerangka tertentu. Setiap kehidupan memiliki nilai berbeda yang harus dihormati dengan cara beradanya sendiri. Namun pada saat yang sama setiap kehidupan dan nilai yang terkandung di dalamnya juga harus terbuka untuk melakukan sebuah penalaran publik bersama dengan nilai dari kehidupan yang lain. Dengan kata lain, kita harus memahami pluralitas nilai dalam posisi yang setara di mana mereka dapat menyuarakan pandangannya secara terbuka dan pada saat yang sama setiap nilai juga harus memiliki kerelaan untuk mau mendengar suara-suara yang berbeda. Dengan praktik penalaran publik semacam ini diharapkan terjadi proses saling belajar antar-nilai agar tercapai hasil yang lebih baik.

Sementara perhatian pada kebebasan berarti bahwa sebuah keputusan diambil atas dasar pertimbangan agar kebebasan yang kita miliki dapat semakin meluas. Pada bab 4 penulis menguraikan pandangan Sen tentang kebebasan dalam dua pengertian: kebebasan dalam arti proses (kebebasan kepelakuan) dan kebebasan dalam arti kesempatan (kapabilitas). Bagi Sen, kualitas kehidupan banyak ditentukan oleh seberapa luas kebebasan yang dimiliki. Semakin luas kebebasan yang dimiliki maka semakin baik pula kualitas kehidupannya. Dengan demikian, kebebasan setiap kehidupan sebenarnya tidak bersifat tetap, ia bisa meluas dan juga bisa menyusut. Sebuah tindakan seharusnya selalu didasarkan pada upaya untuk memperluas kebebasan, bukan membuatnya semakin menyusut. Dengan kebebasan yang semakin meluas maka ketidakadilan dalam hidup akan dapat semakin dikurangi. Sen tidak

memahami kebebasan sebagai konsep yang penuh melainkan sebagai sebuah kondisi yang harus terus diperluas. Begitu juga dalam refleksinya tentang keadilan, ia tidak berpretensi untuk mewujudkan sebuah tatanan keadilan yang sempurna dan paripurna, namun lebih pada upaya mengurangi ketidakadilan.

Dengan tuntutan pada perluasan kebebasan dan perhatian pada kehidupan yang bersifat plural, etika Sen mempertimbangkan aspek proses dan sekaligus juga hasil. Pluralitas kehidupan didekati dengan cara yang cukup radikal, yakni memberikan ruang pada setiap perspektif kehidupan untuk mempublikasikan gagasannya tentang sesuatu dan menuntut setiap perspektif agar mau mendengar suara-suara yang lain. Model pendekatan ini berbeda dengan Rawls yang memiliki motivasi merawat pluralitas kehidupan, namun pada saat yang sama sebenarnya telah mengeksklusi pluralitas itu sendiri dengan tidak memberikan tempat bagi doktrin komprehensif mempublikasikan gagasannya secara bebas. Bagi Sen, penilaian objektif mengenai keadilan terkait erat dengan cara kita memperlakukan setiap perspektif yang ada untuk memberikan kontribusi ide mengenai keadilan. Dengan kata lain, ide keadilan Sen sangat mempertimbangkan proses atau cara menyikapi kehidupan yang plural. Perhatian pada cara menyikapi kehidupan yang plural, juga diimbangi oleh motivasi tindakan yang selalu didasarkan pada upaya memperluas kebebasan. Sebuah tindakan, baik kolektif maupun individu dituntut memberikan kontribusi pada perluasan kebebasan. Dengan pemahaman ini, etika Sen dipandu oleh sebuah imperatif yang berbunyi “bertindaklah dengan nalar terbuka yang sedemikian rupa sehingga dapat memperluas kebebasan kepelakuan dan kebebasan kesejahteraan!”.

Sebagaimana sudah disinggung, Sen memahami kebebasan dalam dua pengertian. Yang pertama ia memahami kebebasan sebagai proses memilih yang tidak didasarkan pada tekanan atau keharusan yang datang dari luar diri. Seseorang dapat dikatakan bebas jika pilihan yang diambil sudah didasarkan pada pertimbangan otonom mengenai yang baik. Sen menyebut kebebasan ini sebagai kebebasan kepelakuan (*agency freedom*).¹⁵⁵ Yang kedua ia juga memahami kebebasan sebagai kesempatan yang memungkinkan seseorang mencapai apa yang dianggap baik. Kesehatan, tidak adanya kecacatan, tersedianya asuransi kesehatan, dapat membaca, dapat menulis,

¹⁵⁵ Ricoeur menyebut gagasan ini sebagai imputabilitas, yakni kemampuan untuk menempatkan diri kita sebagai yang bertanggungjawab atas tindakan yang diambil atau dengan kata lain berarti menempatkan diri kita sebagai agen atau pelaku. “...our ability to recognize ourselves as accountable for our acts in the sense of being their actual outhor.” Ricoeur, 2007, *Reflection on the Just*, hlm. 2

pemerintahan yang demokratis bisa menjadi kesempatan yang memungkinkan seseorang mencapai apa yang dianggap baik. Karena itu, kebebasan untuk memilih apa yang dianggap baik adalah persoalan yang tidak bisa dipisahkan dengan ketersediaan kesempatan untuk mencapai apa yang dianggap baik. Setiap tindakan, baik yang dilakukan secara personal maupun institusional, dituntut untuk selalu mengupayakan perluasan kebebasan dalam arti ini dengan cara mengatasi rintangan-rintangan yang membuat seseorang tidak bisa bebas memilih dan memperbesar kesempatan untuk mencapai apa yang sudah dipilih secara bebas.

Membentuk pemerintahan yang demokratis, mengatasi masalah kelaparan dan kemiskinan, memperjuangkan layanan asuransi kesehatan bagi rakyat miskin, mendesain sistem pendidikan yang membuat anak didik semakin kreatif dalam menatap masa depannya, menghargai kebebasan orang lain, bersikap toleran terhadap pandangan yang berbeda adalah contoh-contoh tindakan yang dapat semakin memperluas kebebasan.¹⁵⁶ Dengan semakin memperluas kebebasan untuk memilih dan memiliki kesempatan mencapai apa yang dipilih maka ketidakadilan semakin dapat dikurangi. Dengan demikian tindakan pengurangan kemiskinan dan kelaparan, dalam contoh di atas, memiliki korelasi dengan upaya mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat. Masalah ketidakadilan dalam masyarakat terkait erat dengan seberapa besar kebebasan yang dimiliki. Semakin luas kebebasan yang dimiliki, semakin besar pula keadilan yang dicapai. Pada saat yang sama masalah ketidakadilan juga terkait dengan cara kita menyikapi pluralitas pandangan yang ada dalam masyarakat. Semakin terbuka ruang diskursus yang dibangun maka akan semakin baik bagi kita untuk meraih keadilan. Sebaliknya, semakin tertutup sebuah ruang diskursus maka akan semakin menyusut ruang yang diciptakan untuk mengurangi ketidakadilan.

5.4.Masalah Kebebasan dan Tentang Yang Baik

Setelah menguraikan gagasan yang ada pada bab-bab sebelumnya dalam hubungannya dengan rumusan tesis, pada bagian ini akan diajukan tanggapan dan catatan atas gagasan yang diajukan oleh Sen. Tema sentral yang digarisbawahi dari

¹⁵⁶ Dalam *Development as Freedom* Sen menekankan bahwa peran pembangunan seharusnya lebih dimaknai sebagai upaya semakin memperluas kebebasan manusia. Dengan demikian agenda pembangunan bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan GNP atau GDP tetapi melihat variabel lain yang dapat memberikan kontribusi pada perluasan kebebasan manusia. Proses pendidikan adalah salah satu variabel penting dalam upaya perluasan kebebasan manusia sebagaimana yang dipahami oleh Sen. Aplikasi pendekatan kapabilitas dalam pendidikan banyak dibahas oleh Melanie Walker dan Elaine Unterhalter dalam *Amartya Sen's Capability Approach and Social Justice in Education*.

gagasan Sen adalah soal kebebasan dan konsep mengenai yang baik. Uraian pada bagian ini akan dibagi menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan soal batas-batas kebebasan partikularitas nilai dan yang kedua soal konsep mengenai yang baik dan objektivitas nilai. Pada bagian pertama akan banyak dipersoalkan masalah kebebasan dalam hubungannya dengan partikularitas nilai yang dilindungi oleh ide keadilan Sen. Titik persoalannya adalah bagaimana perluasan kebebasan satu kelompok dimungkinkan ketika pada saat yang sama ia bertabrakan dengan kebebasan partikularitas nilai dari kelompok lain? Sementara pada bagian yang kedua masih mempersoalkan soal perlindungan terhadap partikularitas nilai, hanya saja pada bagian ini akan dihubungkan dengan masalah objektivitas. Jika Sen memberikan jaminan hak yang setara kepada setiap perspektif mengenai nilai apakah tetap ada ruang objektivitas dan objektivasi di dalamnya?

5.4.1. Batas-batas Kebebasan Partikularitas Nilai

Dalam uraian mengenai kebebasan, Sen sangat menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki nilai yang dianggap baik yang berbeda satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga memberikan perlindungan atas hak setiap orang untuk mencapai apa yang dianggap baik.¹⁵⁷ Dalam ilustrasi tentang dua orang yang sedang duduk berdampingan di kursi pesawat, salah seorang yang duduk di samping jendela tengah menikmati pemandangan indah di cuaca yang cerah. Namun tiba-tiba, penumpang yang duduk di samping memintanya menutup jendela karena mengganggu layar laptop yang sedang ia gunakan. Dalam ilustrasi yang menurut penulis agak ekstrim, program yang sedang dibuka oleh penumpang tersebut sebenarnya hanya program permainan (*games*). Meski begitu, demi komitmen terhadap kebebasan si pengguna laptop agar dapat mencapai tujuannya (*goal*), penumpang yang duduk di samping jendela itu akhirnya menutup jendela agar layar laptop yang sedang dibuka oleh penumpang yang duduk di sebelahnya tidak terganggu sinar matahari.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Uraian mengenai kebebasan banyak dielaborasi dalam konsep kapabilitas dan kepelakuan. Dalam uraian mengenai kapabilitas misalnya, Sen menegaskan bahwa teori keadilan yang didasarkan pada *fairness* harus memerhatikan kebebasan setiap orang untuk mencapai cita-cita yang menurutnya baik. "...I argue that a theory of justice based on fairness must be deeply and directly concerned with the actual freedoms enjoyed by different persons – persons with possibly divergent objectives – to lead different lives that they can have reason to value." Sen, 1990, "Justice: Means versus Freedom" dalam *Philosophy and Public Affairs*, hlm. 112

¹⁵⁸ Ilustrasi tentang dua orang yang duduk berdampingan di dalam pesawat dapat dibaca dalam uraian Sen mengenai "Commitments and Goals". Ilustrasi ini diangkat oleh Sen untuk mengkritik pandangan Smith mengenai kepentingan diri (*self interest*). Dalam pandangan Sen, tidak semua tindakan rasional diabdikan

Ini tentu saja hanya sebuah ilustrasi, namun dari ilustrasi ini kita mencoba menarik ke persoalan batas kebebasan partikularitas nilai. Jika tindakan yang baik dalam pandangan Sen dipandu oleh sebuah imperatif yang berbunyi “bertindaklah dengan nalar terbuka, yang sedemikian rupa sehingga dapat memperluas kebebasan kepelakuan dan kebebasan kesejahteraan!” tentu akan muncul pertanyaan bagaimana kebebasanku dan kebebasan orang lain dapat diperluas secara bersamaan. Jika penumpang yang duduk di samping jendela menutup jendela pesawat dan memberi kesempatan pada si pengguna laptop bermain *game* berarti kebebasan si pengguna laptop meluas sementara kebebasan penumpang yang duduk di samping jendela justru mengalami penyusutan karena tidak lagi bisa menikmati pemandangan yang indah. Itu artinya ada gerak kebebasan yang saling berlawanan, yang satu meluas sementara yang lain menyusut. Jika yang terjadi demikian maka bagaimana kita harus menempatkan imperatif etis yang menuntut perluasan kebebasan? Kebebasan siapa yang harus diperluas? Apakah mungkin bagi kita untuk membatasi kebebasan seseorang dalam mencapai apa yang dianggap bernilai olehnya demi menjaga kebebasan orang lain?

Isi persoalan di atas juga direfleksikan secara mendalam oleh filsuf seperti John Rawls. Bagaimana kita menyikapi kemajemukan nilai dalam masyarakat plural yang setiap nilai mengklaim paling baik dan paling benar? Solusi yang ditawarkan oleh Rawls, demi menjaga pluralisme maka harus ada aturan di mana setiap pihak atau pandangan perlu dibatasi dalam mempublikasikan sebuah gagasannya. Gagasan yang dikategorikan sebagai doktrin komprehensif (*comprehensive doctrine*), misalnya simbol dan bahasa agama, tidak diizinkan untuk ditarik ke ranah publik politis. Ruang bagi gagasan doktrin komprehensif hanya ada di dalam ruang privat atau yang disebut sebagai budaya latar (*background culture*). Gagasan yang dapat diperbincangkan dalam ranah publik harus steril dari bahasa agama dan dapat dipahami oleh publik yang lain. Rawls menyebut komunikasi publik jenis ini sebagai konsensus tumpangtuh (*overlapping consensus*).¹⁵⁹ Gagasan yang ditawarkan oleh Rawls ini kemudian

pada kepentingan diri si pelaku. Dalam hal ini Sen memberikan contoh komitmen orang yang duduk di samping jendela pesawat yang mau menutup jendelanya demi kepentingan orang yang berada di sampingnya yang tengah membuka komputer. Lih. Sen, 2009, *The Idea of Justice*, hlm. 191-193

¹⁵⁹ Gagasan Rawls mengenai tempat doktrin komprehensif dalam kehidupan publik politis banyak dibahas dalam *Political Liberalism*, 1993

ditanggapi secara kritis oleh para filsuf lain, di antaranya adalah Chantal Mouffe dan Juergen Habermas.¹⁶⁰

Bagi Sen, upaya untuk merawat pluralisme sebagaimana yang diajukan oleh Rawls masih dianggap kurang memadai. Meski melalui liberalisme politis, Rawls sebenarnya tengah memberikan tawaran model matra politik yang dapat menjamin pluralisme, namun pada saat yang sama partikularitas nilai tidak lagi bisa bicara karena sudah ditutup oleh standar komunikasi rasional yang ditetapkan oleh kelompok tertentu. Alih-alih menutup kanal komunikasi dari partikularitas nalar yang ada, Sen justru memberikan ruang yang sangat terbuka bagi kemajemukan nalar yang ada dalam masyarakat. Bahkan, ia juga memberikan tempat yang setara bagi semua partikularitas nalar untuk berbicara mengenai masalah bersama. Namun, meski ia memberikan tempat yang setara bagi pluralitas nalar, ia juga menuntut setiap nalar untuk saling mendengar agar terjadi perukaran ide sehingga dapat saling melengkapi dan menutup kekurangan yang ada dalam setiap perspektif.

Dalam ilustrasi tentang dua penumpang pesawat, Sen memang hanya menjelaskan bahwa penumpang yang duduk di samping jendela akhirnya menutup jendela atas dasar komitmen untuk memperluas kebebasan penumpang sebelah yang sedang menggunakan laptop. Namun lepas dari ilustrasi yang disampaikan oleh Sen, jika kita kembali pada model penalaran publik yang terbuka sebagai prinsip epistemik maka seharusnya dua penumpang itu perlu melakukan proses penalaran bersama secara terbuka. Si pengguna laptop tidak bisa memaksa orang yang berada di samping jendela untuk menutup jendela hanya karena pertimbangan layar laptop yang ia gunakan terganggu sinar matahari. Mereka berdua harus saling meyakinkan bahwa kebebasan mereka berdua dapat semakin diperluas secara bersama. Tidak hanya itu, keputusan

¹⁶⁰ Dalam penelusuran penulis, Habermas adalah salah satu pemikir yang memberikan catatan bagaimana seharusnya agama ditempatkan dalam ruang publik. Dalam pandangannya, kerangka kehidupan demokrasi konstitusional yang sekular seharusnya juga membuka ruang bagi kelompok agama (kaum beriman) untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan bersama. Mereka yang disebut sebagai kaum sekular juga harus membuka diri untuk mau mendengar pandangan dari kelompok yang disebut sebagai kelompok religius. Uraian mengenai hubungan agama dan ruang publik banyak dibahas dalam buku kumpulan tulisan yang berjudul *Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays*, khususnya dalam “Religion and the Public Sphere”. Tuntutan untuk berdialog dengan kelompok religius juga dapat dibaca dalam dialognya dengan Ratzinger. Selain Habermas, filsuf yang juga banyak mengomentari upaya proteksi pluralisme *a la* Rawls adalah Chantal Mouffe, seorang pemikir postmarxis kelahiran Belgia. Menurutnya gagasan politik Rawls dianggap telah menegasi yang politis karena sudah membatasi pluralisme hanya pada gagasan yang sesuai dengan konsensus tumpangtuh (*overlapping consensus*). Kritiknya terhadap Rawls dapat dibaca dalam *The Return of the Political*, 1993. Sementara elaborasi lebih jauh mengenai pemikiran pluralisme radikalnya dapat dilihat dalam *The Democratic Paradox*, 2000, dan *On the Political*, 2005.

yang akan mereka ambil juga perlu mengakomodasi pertimbangan yang lebih luas, bukan hanya dari mereka berdua. Misalnya apakah membuka laptop pada saat pesawat sudah lepas landas tidak mengganggu navigasi pesawat itu sendiri. Pertimbangan yang lebih luas menjadi penting untuk melihat dan memperkaya perspektif di luar mereka berdua untuk kepentingan bersama.

Dari ilustrasi tentang dua penumpang pesawat, penulis mencoba menggeser ke ilustrasi yang lain namun memiliki titik persoalan yang sama. Jika Sen melindungi hak setiap orang untuk mencapai apa yang dianggap bernilai, kita akan dihadapkan pada persoalan yang tidak mudah. Dalam kasus terorisme di awal abad ini misalnya, hal yang dianggap bernilai oleh Presiden Bush bertentangan dengan apa yang dianggap baik oleh tokoh yang bernama Osama bin Laden. Hal yang dianggap bernilai oleh Front Pembela Islam (FPI) bertentangan dengan apa yang dicita-citakan oleh kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL). Pertanyaannya, apakah hak mereka untuk mencapai apa yang dianggap bernilai tetap dilindungi? Jika ya maka akan terjadi konflik nilai yang sulit didamaikan antara JIL dan FPI, atau antara Bush dan Osama. Sen tidak memberikan batasan dan penjelasan lebih lanjut tentang nilai partikular macam apa yang dapat dicapai secara bebas. Persis karena kesulitan ini, pembatasan yang dilakukan oleh Rawls dianggap lebih mungkin (*feasible*) untuk diaplikasikan dalam merawat kemajemukan masyarakat.

Namun meski tidak ditemukan uraian eksplisit tentang pembatasan kebebasan untuk mencapai apa yang dianggap bernilai, tidak berarti hal ini luput dalam pemikiran Sen. Penulis mencoba meraba maksud proteksi hak untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai pada sesuatu yang hanya memiliki implikasi personal. Jika saya memiliki pandangan bahwa menjadi guru adalah sesuatu yang sangat bernilai sehingga karenanya saya ingin sekali menjadi guru, maka kesempatan untuk mencapai keinginan itu seharusnya diperluas oleh institusi, lingkungan sosial dan saya sendiri. Keinginan untuk menjadi guru terkait dengan konsep mengenai yang baik yang saya yakini. Setiap orang memiliki perbedaan konsep mengenai yang baik. Itu artinya hak setiap orang untuk mencapai apa yang dianggap baik harus diproteksi dan kesempatan untuk mencapai itu harus diperluas bukan malah dipersempit. Tuntutan untuk memperluas kesempatan setiap orang untuk mencapai apa yang dianggap baik memiliki implikasi besar dalam penentuan kebijakan publik. Kebijakan publik yang ditentukan dari atas tanpa bertanya apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat dianggap sebagai kebijakan

yang tidak mempertimbangkan keadilan karena mengabaikan kebebasan warga untuk mencapai apa yang dianggap baik.

Masalahnya kemudian, apa yang dianggap baik secara personal tidak berarti bahwa ia steril dari implikasi sosial. Apa yang dianggap bernilai oleh seseorang selalu memiliki implikasi pada kebebasan orang lain dan itu artinya proteksi kebebasan untuk mencapai apa yang kita anggap bernilai dapat mengalami konflik dengan kebebasan orang lain. Dihadapkan pada persoalan ini, penulis berpendapat bahwa prinsip epistemik yang ditawarkan Sen memainkan peran yang sangat penting dalam mengkontestasikan kebebasan mencapai apa yang dianggap bernilai. Uraian mengenai konflik kebebasan dan upaya mengatasinya sebenarnya banyak dijelaskan oleh Sen dalam teori pilihan sosial – yang sudah masuk dalam ranah ilmu ekonomi. Dalam ulasan mengenai pilihan sosial, terdapat masalah yang disebut “ketidakmungkinan liberal paretian” (*the impossibility of the paretian liberal*).¹⁶¹ Dengan gagasan ini hendak disampaikan bahwa sebuah putusan sosial yang memberikan perhatian pada agregasi pilihan, dalam pandangan Sen, akan melahirkan konflik kebebasan. Jika sebuah pilihan sosial pada akhirnya memilih pilihan A atas pertimbangan agregasi pilihan maka sebenarnya ada pilihan minoritas yang terpaksa diabaikan dan itu artinya ada sebagian kebebasan yang tidak dihitung. Teori pilihan sosial, yang biasanya dipakai dalam mempertimbangkan kebijakan publik, memang tidak bisa menghindar dari situasi di mana ada sebagian kecil kebebasan yang tidak diperhitungkan. Namun lepas dari kesulitan dan ketidakmungkinan untuk menghindar dari kondisi semacam itu, Sen mendorong proses penalaran publik dalam menentukan sebuah pilihan sosial sehingga setiap pihak dapat memperkaya informasi dan tidak hanya mendasarkan pada satu perspektif saja.¹⁶²

¹⁶¹ Gagasan dasar yang ingin disampaikan dalam ketidakmungkinan liberal paretian adalah bahwa dalam sebuah putusan sosial (yang diambil dari agregasi hasil pilihan sosial) selalu ada kebebasan dari yang minimal yang tidak bisa diakomodasi. Dengan ketidakmungkinan ini Sen ingin mengatakan bahwa sebuah putusan selalu tidak bulat. Ada ruang di mana yang minoritas itu berbeda pendapat dengan yang mayoritas. Elaborasi mengenai konflik kebebasan dalam pilihan sosial banyak dijelaskan dalam artikel “Liberty and Social Choice” dan “Liberty, Unanimity and Rights”. Prinsip Pareto mengatakan jika setiap orang dalam masyarakat memilih satu pilihan sosial tertentu atas pilihan yang lain maka pilihan yang pertama dianggap lebih baik dari yang lain untuk masyarakat secara keseluruhan. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita menempatkan kebebasan kelompok minoritas yang dikalahkan oleh mayoritas.

¹⁶² “To try to make social welfare judgments without using any interpersonal comparison of utilities, and without using any nonutility information, is not a fruitful enterprise. We do care about the size and distribution of the overall achievements; we have reasons to want to reduce deprivation, poverty, and inequality; and all these call for interpersonal comparisons – either of utilities or of other indicators of individual advantages, such as real incomes, opportunities, primary goods, or capabilities.” Sen, 1995, “Rationality and Social Choice” dalam *The American Economic Review*, hlm. 8

Dengan memperbanyak perspektif maka kita dapat melakukan perbandingan dan pertimbangan yang lebih kaya meski tidak sempurna.

5.4.2. Tentang Yang Baik dan Objektivitas Nilai

Proteksi Sen terhadap hak setiap orang untuk mencapai apa yang dianggap baik menyiratkan pembelaan terhadap partikularitas nilai. Setiap orang dan setiap komunitas memiliki nilai yang berbeda dengan orang atau komunitas yang lain. Bahkan perbedaan nilai ini bersifat tak dapat dibandingkan (*incommensurable*) meski terbuka untuk berdialog dan berkomunikasi. Proteksi terhadap eksistensi nilai yang berdiri dengan cara beradanya sendiri tidak berarti bahwa ia laksana *monad* Leibniz yang tidak memiliki jendela sehingga karenanya tidak bisa berkomunikasi dengan nilai yang lain. Betapapun ia tidak dapat dibandingkan dan cara beradanya harus dihormati, Sen justru menuntut setiap nilai untuk menjalin komunikasi dan bersikap terbuka terhadap nilai dan perspektif lain yang mungkin dapat berkontribusi memecahkan persoalan yang tengah dihadapi. Jika Sen memahami nilai tentang yang baik demikian, bagaimana kita menempatkan prinsip objektivitas pada nilai? Dan sebelum menjawab pertanyaan itu, bukankah pemahaman mengenai yang baik terbentuk dari hasil relasi internal dan dunia eksternal? Itu artinya komunitas dan lingkungan memiliki andil besar dalam membentuk pemahaman seseorang mengenai nilai. Jika demikian, konsep mengenai yang baik pada dirinya tidak mungkin bersifat tertutup karena ia adalah produk dari relasi internal dan eksternal yang terus berkembang.

Setiap manusia berelasi dengan dunia luar dalam pola dialog dan komunikasi terus-menerus. Hasil dari relasi ini membentuk pemahaman mengenai nilai dan konsep mengenai yang baik. Hal yang sama juga terjadi dalam pembentukan nilai dan konsep mengenai yang baik yang diyakini oleh satu komunitas. Pemahaman mengenai nilai pada akhirnya akan menuntun seseorang pada cita-cita dan ideal tertentu yang ingin dicapai dalam hidupnya. Ketika seseorang, dengan pandangan nilai yang diyakininya, menentukan sebuah cita-cita ideal tertentu, maka orang tersebut memiliki hak dan kebebasan untuk mencapainya. Setiap orang atau komunitas dengan nilai yang diyakininya menjadi satu kesatuan yang wajib dihormati dan tidak bisa dilangkahi begitu saja. Jika kita berpikir dan bertindak atas dasar prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap kebebasan, maka manusia dengan nilai yang diyakininya harus kita tempatkan dalam kerangka yang setara dengan manusia-manusia yang lain dan

kebebasannya juga harus dihormati sebagaimana kebebasan yang dimiliki oleh manusia yang lain.

Jika manusia dengan nilai yang diyakininya dipahami demikian, lantas bagaimana prinsip objektivitas ditempatkan? Rawls menuduh gagasan Sen sudah bercampur dengan doktrin komprehensif yang oleh Rawls sangat dihindari dalam ruang publik politis bersama. Dalam pandangan Rawls, konsep politik yang masuk akal mengenai keadilan haruslah didasarkan pada asumsi bahwa (1) gagasan itu dapat diterima oleh semua warga negara yang bebas dan setara; dan (2) ia tidak mengasumsikan atau membawa satu doktrin komprehensif tertentu.¹⁶³ Dengan begitu, relasi antar-pandangan dituntut untuk selalu mengupayakan titik temu sehingga karenanya tidak menimbulkan masalah bagi pluralitas satu komunitas politik yang majemuk. Namun Sen menolak anggapan bahwa gagasannya ini sudah bercampur dengan apa yang oleh Rawls disebut sebagai doktrin komprehensif. Menurut Sen, kebebasan setiap orang untuk mencapai apa yang dianggap bernilai tidak perlu diturunkan dari satu doktrin komprehensifnya (Sen, *Justice: Means versus Freedoms*, 1990:118).

Dalam pandangan penulis, kritik Rawls harus ditempatkan sebagai sikap kritis terhadap setiap hal yang dikategorikan sebagai doktrin komprehensif. Baginya membawa doktrin komprehensif ke arena kehidupan publik dapat mengancam pluralitas masyarakat karena akan ada dominasi doktrin komprehensif tertentu atas doktrin komprehensif yang lain. Untuk menghindari hal itu, maka seluruh doktrin harus ditempatkan dalam ruang domestik atau kehidupan privat. Tentu saja Sen sangat menyadari itu dan atas pemahaman itu ia mencoba untuk mencari jalan lain yang di satu sisi ia tetap mempertimbangkan prinsip kebebasan dan kesetaraan, namun di sisi yang lain atas dasar prinsip itu sendiri ia harus memberi ruang bagi setiap perspektif untuk mempublikasikan sebuah alasan yang diinspirasi dari pandangan nilai partikularnya. Jika kita konsekuen dengan ide kesetaraan dan kebebasan maka kita juga harus menghormati kebebasan setiap orang untuk mencapai apa yang dianggap baik baginya atau bagi kelompoknya.

¹⁶³ “That is, they must belong to a reasonable political conception of justice so that we may assume (i) that they are, or can be, shared by citizens regarded as free and equal; and (2) that they do not presuppose any particular fully (or partially) comprehensive doctrine.” Sen, 1990, “Justice: Means and Freedom” dalam *Philosophy and Public Affairs*, hlm. 118

Lantas di mana letak objektivitas nilai? Sebagai seorang ilmuwan dan juga filsuf – yang merefleksikan masalah keadilan secara komprehensif, Sen tentu saja menempatkan masalah objektivitas sebagai sesuatu yang penting dalam menimbang konsep mengenai yang adil dan tidak adil. Kerangka berpikir yang didasarkan pada prinsip objektivitas terdapat dalam tuntutan Sen agar setiap pandangan dan perspektif mendengar dan mempertimbangkan pandangan lain yang berbeda. Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, meski setiap entitas nilai memiliki kebebasan untuk mencapai apa yang dianggap baik namun itu tidak berarti bahwa ia mengabaikan tuntutan untuk mendengar dan mempertimbangkan nilai-nilai lain bahkan yang berseberangan sekalipun.

Tuntutan untuk mendengar dan memperluas perspektif dapat dilihat sebagai tuntutan untuk melakukan objektivasi nilai atau pandangan yang diyakini selama ini oleh satu komunitas tertentu. Hal yang termasuk terobosan besar dari Sen dalam mengatasi persoalan partikularitas nilai di satu sisi dan objektivitas nilai di sisi yang lain ada pada jaminan terhadap setiap pandangan untuk mempublikasikan nalarnya secara setara dan tuntutan untuk mendengar perspektif nalar lain yang barangkali dapat mengoreksi kekeliruan yang ada dalam pandangannya. Hak bagi setiap perspektif untuk mengemukakan sebuah alasan atas dasar nalar yang diyakininya disebut sebagai gerak keluar, sementara tuntutan untuk mendengar perspektif lain yang berbeda disebut sebagai gerak kedalam. Asumsi yang mendasari gerak keluar adalah prinsip kesetaraan dan kebebasan yang harus dinikmati oleh semua, bukan hanya oleh nalar dari kebudayaan tertentu saja. Jika kita konsekuen dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan maka kita harus memberikan hak kepada setiap nalar dari berbagai latar kebudayaan untuk berdiri secara setara dan bebas untuk menyampaikan pandangannya. Sementara asumsi yang melatari tuntutan untuk mau mendengar adalah karena setiap perspektif selalu tidak sempurna sehingga harus membuka diri terhadap perspektif lain yang barangkali dapat memberikan kontribusi pada perbaikan kekurangan yang ada dalam satu perspektif tertentu. Dalam pandangan Sen, setiap perspektif dan setiap hasil dari sebuah diskusi pada dasarnya selalu tidak sempurna sehingga selalu terbuka untuk dikoreksi dan dievaluasi setiap saat.

5.5.Rangkuman

Isi pokok yang diulas dalam bab 5 ini adalah uraian dan penegasan lebih jauh dari apa yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, khususnya terkait dengan perumusan tesis yang diajukan. Hal yang juga pokok dalam separuh dari bab ini adalah

tanggapan atas gagasan Sen. Berkaitan dengan uraian bab-bab sebelumnya diperoleh dua temuan yang cukup sentral dalam ide keadilan Amartya Sen, yakni tentang prinsip epistemik dan tuntutan etis keadilan Amartya Sen. Pandangan keadilan yang menempatkan praktik penalaran publik sebagai proses penting dan tuntutan untuk selalu memperluas perspektif – dengan tidak mendasarkan hanya pada satu perspektif saja – dapat dipahami sebagai prinsip epistemik berdimensi etis yang ada di dalam ide keadilan Amartya Sen. Sementara tuntutan untuk selalu memperluas kebebasan baik dalam arti kepelakuan maupun kesejahteraan yang dapat diinisiasi baik oleh perseorangan atau institusi dapat disimpulkan sebagai tuntutan etis yang ada di dalam ide keadilan Sen. Dua persoalan yang dianggap sebagai masalah mendasar di dalam ide keadilan Sen ini kemudian menjadi bahan utama dalam rumusan tesis yang diajukan.

Berdasarkan dari ulasan itu penulis kemudian merumuskan sebuah tesis mengenai keadilan Amartya Sen sebagai berikut:

“Dari kritik Sen atas pendekatan institusionalisme transendental, ada dua hal yang sangat mendasar dalam ide keadilan Sen. Yang pertama tentang prinsip epistemik, dan yang kedua tentang tuntutan etis keadilan Sen. Tentang yang pertama, untuk meraih keadilan, Sen sangat menekankan model perspektif terbuka – sebagaimana yang ada dalam penalaran publik – yang tidak melihat persoalan hanya dari sudut tertentu saja. Melalui penalaran publik, di satu sisi seseorang akan memperoleh pemahaman yang lebih kaya, di sisi yang lain model ini juga menjadi realisasi kebebasan setiap perspektif untuk menyuarakan kepentingannya. Sementara tentang yang kedua, ide keadilan Sen yang menjadikan kehidupan (manusia) secara luas sebagai tema sentral (*nyaya*) melihat kebebasan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan, ia menuntut agar tindakan yang diambil selalu didasarkan pada upaya memperluas kebebasan kepelakuan dan kesejahteraan. Atas dasar pemahaman ini maka tuntutan etis keadilan Sen dipandu oleh sebuah imperatif yang berbunyi ‘bertindaklah dengan nalar terbuka, yang sedemikian rupa sehingga dapat memperluas kebebasan kepelakuan dan kebebasan kesejahteraan!’.”

Setelah mengulas tema yang kemudian menjadi bahan pokok dari rumusan tesis yang diajukan, pada separuh bab selanjutnya adalah tanggapan dan catatan atas gagasan Sen. Ada dua masalah yang saling terkait yang ditanggapi dalam tesis ini: yang pertama soal batas-batas kebebasan partikularitas nilai dan yang kedua soal konsep mengenai yang baik dan objektivitas nilai. Meski penulis memberikan tanggapan dan catatan, namun tetap diupayakan kemungkinan jawaban yang dapat diberikan oleh Sen sendiri – tentu dengan rujukan teks yang diperoleh baik dari *The Idea of Justice* atau tulisan

Sen yang lain. Kemungkinan jawaban atau jalan keluar yang diberikan oleh Sen juga telah diulas di dalam tanggapan.

Bab 6

PENUTUP

Di dalam bab 6 yang akan dijadikan sebagai bab penutup tesis, ada tiga hal yang hendak dipertegas kembali sebagai bagian dari proses akhir dari penulisan tesis ini. Yang pertama adalah rangkuman seluruh bab sebelumnya, dari bab 1 hingga bab 5. Yang kedua soal relevansi tesis. Dan yang ketiga adalah uraian mengenai kelebihan dan kekurangan serta pertanyaan-pertanyaan baru yang diinspirasi dari tesis ini.

6.1. Rangkuman

Pada bagian rangkuman, ada tiga hal yang dipertegas dalam bagian ini: yang pertama adalah rangkuman isi bab 1 hingga bab 5, yang kedua tentang masalah filosofis yang dipersoalkan di dalam tesis ini dan yang ketiga adalah penegasan kembali tesis yang sudah dirumuskan.

6.1.1. Rangkuman Bab 1 Hingga Bab 5

Tesis ini dimulai dengan sebuah rumusan permasalahan yang diajukan dalam kaitannya dengan ide keadilan Amartya Sen. Dalam buku *The Idea of Justice*, Sen banyak memberikan respon terhadap teori keadilan yang ia sebut sebagai institusionalisme transendental. Salah satu filsuf yang banyak ia tanggapi adalah John Rawls yang secara khusus menulis buku tentang teori keadilan. Sen beranggapan bahwa teori keadilan institusionalisme transendental tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan keadilan yang plural. Maka pertanyaan pertama yang diajukan adalah mengapa Sen memiliki penilaian bahwa teori keadilan institusionalisme transendental tidak lagi memadai untuk menjawab masalah ketidakadilan. Pertanyaan yang kedua terkait dengan pendekatan komparatif yang ditawarkan oleh Sen: bagaimana ide-ide yang saling bertentangan dapat dimungkinkan dalam ruang bersama. Sementara pertanyaan yang ketiga adalah soal hal yang paling mendasar dalam materi keadilan Amartya Sen. Perumusan masalah, metode penulisan dan uraian singkat tentang Amartya Sen juga diuraikan dalam bab 1.

Dalam bab 2 diuraikan secara padat tentang teori keadilan institusionalisme transendental, dalam hal ini sebagaimana yang diwakili oleh John Rawls. Ada beberapa ide pokok yang ada di dalam teori keadilan Rawls seperti makna keadilan sebagai “*fairness*”, soal posisi asali (*the original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) serta dua prinsip keadilan yang dihasilkan dalam posisi asali. Setelah menjelaskan teori keadilan Rawls kemudian diuraikan tanggapan dan kritik Sen terhadap teori keadilan Rawls. Kritik terhadap Rawls dibagi menjadi dua: kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal terkait dengan logika yang dipegang dalam oleh Rawls sendiri, sementara kritik eksternal adalah kritik yang bertopang pada logika yang dibawa oleh Sen. Di bagian akhir bab ini diuraikan secara singkat gagasan dasar pendekatan keadilan komparatif yang diajukan oleh Amartya Sen.

Pada bab 3 diuraikan ulasan yang berupaya menjawab pertanyaan kedua yang diajukan dalam tesis. Pokok pertama yang diuraikan adalah soal prinsip pluralitas dan tuntutan untuk bersikap terbuka terhadap perspektif yang lebih luas dalam praktik penalaran publik (*public reasoning*). Dalam ulasan mengenai tindakan penalaran publik dijelaskan soal tahapan yang perlu dilalui dalam proses penalaran publik. Ada tiga tahap penting yang perlu dilalui, pertama mempublikasikan nalar yang diyakini, kedua mendengarkan nalar dari pihak lain (objektivitas inter-posisional) dan yang ketiga memperluas nalar mereka yang tidak terikat pada kontrak tertentu (imparsialitas terbuka). Tuntutan untuk terbuka terhadap perspektif yang lebih luas dikaitkan dengan salah satu teori yang cukup mendasar yakni teori pilihan sosial (*social choice theory*). Dalam pandangan Sen, tuntutan untuk bersikap terbuka terhadap perspektif yang plural merupakan relevansi yang dapat diangkat dari pendasaran terhadap teori pilihan sosial. Selain tuntutan untuk bersikap terbuka ada relevansi lain yang juga diuraikan dalam bab ini yakni soal prinsip ketidaksempurnaan terbuka dalam merumuskan sebuah keputusan.

Pada bab 4 diuraikan pengertian kebebasan dalam pandangan Sen. Uraian yang diulas dalam bab 4 ini sebenarnya berupaya menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yang ketiga. Dalam gagasan keadilan Sen, kebebasan merupakan hal mendasar yang sangat dilindungi dalam ide keadilannya. Menurutnya ada dua pengertian kebebasan, yang pertama kebebasan dalam arti proses dan yang kedua kebebasan dalam arti kesempatan. Pengertian kebebasan dalam arti proses diulas dalam konsep kebebasan kepelakuan (*agency freedom*), sementara kebebasan dalam arti kesempatan diulas dalam konsep kapabilitas (kebebasan kesejahteraan/*well-being freedom*). Dalam pandangannya baik kebebasan kepelakuan maupun kebebasan kesejahteraan adalah sesuatu yang dituntut untuk selalu diperluas. Perluasan kebebasan memiliki korelasi pada upaya pengurangan ketidakadilan, fokus yang sangat digarisbawahi di dalam ide keadilan dalam arti *nyaya*.

Sementara bab 5 adalah uraian yang lebih mendalam tentang gagasan-gagasan pokok yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, khususnya bab 3 dan bab 4. Ulasan lebih mendalam ini dikaitkan dengan rumusan pertanyaan yang sudah diajukan dalam bab 1. Hasil dari ulasan ini kemudian dihasilkan dua hal mendasar di dalam ide keadilan Amartya Sen, yang pertama berkaitan dengan prinsip epistemik dan yang kedua tentang tuntutan etis keadilan. Selain dua hal mendasar ini, pada bab 5 juga terdapat tanggapan terhadap gagasan yang ada dalam pemikiran Sen. Ada dua hal yang ditanggapi di dalam bab 5 ini: yang pertama soal batas-batas kebebasan partikularitas nilai dan yang kedua soal konsep mengenai yang baik dan objektivitas nilai.

6.1.2. Masalah Filsafat Yang Dipersoalkan

Melalui inspirasi pemikiran Amartya Sen, khususnya dari buku *The Idea of Justice*, paling tidak ada tiga gagasan mendasar yang saling terkait untuk merespon masalah yang kerap dikategorikan sebagai persoalan etika dan filsafat politik. Masalah pertama berkaitan dengan ide rasionalitas, yang kedua tentang konsep kebebasan dan yang ketiga mengenai partikularitas nilai. Tentang masalah yang pertama, Sen memahami konsep rasionalitas, khususnya dalam memahami apa yang disebut sebagai tindakan rasional atau pilihan rasional, bukan sebagai tindakan yang hanya diabdikan pada kepentingan diri (*self-interest*). Bagi Sen, tetap terbuka kemungkinan bagi tindakan yang tidak dimotivasi oleh kepentingan diri untuk disebut sebagai tindakan atau pilihan rasional. Kritik Sen terhadap pemahaman tindakan rasional yang hanya dimaknai sebagai tindakan yang dimotivasi oleh kepentingan diri dijelaskan melalui gagasan tentang komitmen (lih di bab. 3 [3.4.3.]). Selain itu, apa yang disebut dengan rasionalitas juga bukan monopoli dari karakter berpikir masyarakat tertentu – misalnya kebudayaan Barat. Dalam pandangan Sen, masyarakat dari kebudayaan manapun dapat dan mampu berpikir secara rasional jika corak berpikir ini tidak dikaitkan hanya pada kebudayaan tertentu saja.

Konsekuensi dari kritik Sen ini berdampak pada persoalan etis, yakni penerimaan akan adanya rasionalitas yang sangat beragam dan tuntutan untuk membuka diri terhadap rasionalitas yang lebih luas. Ada dua konsekuensi yang diterima sekaligus, di satu sisi rasionalitas setiap masyarakat memiliki hak yang sama, di sisi yang lain, setiap rasionalitas juga dituntut untuk memperluas pertimbangannya dengan mendengar rasionalitas kelompok lain. Pemahaman Sen mengenai konsep rasionalitas tidak hanya menegaskan signifikansi dari partikularitas nilai tetapi juga pentingnya sikap untuk memperluas perspektif dengan mendengar dan mempertimbangkan rasionalitas lain yang berbeda. Sen tidak hanya memberi tempat pada lokalitas yang bersifat partikular tetapi juga menuntut partikularitas nilai itu untuk bersikap kosmopolitan, yakni dengan memperluas perspektif secara global. Persoalan yang dihadapi oleh satu masyarakat tertentu barangkali sudah pernah dialami dan berhasil diatasi oleh masyarakat dari tempat yang lain. Bukan hanya itu, dengan bersikap kosmopolitan, suatu masyarakat juga semakin sadar bahwa pilihan yang mereka ambil akan berimplikasi bagi masyarakat dari tempat yang lain.

Masalah yang kedua berkaitan dengan konsep kebebasan. Pada umumnya konsep kebebasan (*freedom* dan *liberty*) dipahami sebagai kemampuan untuk memilih sesuatu tanpa ada paksaan yang bersifat eksternal.¹⁶⁴ Dalam pandangan Sen, pemahaman kebebasan dalam arti ini tentu saja penting. Pengertian kebebasan dalam makna ini berkaitan dengan kebebasan dalam arti proses. Namun selain kebebasan yang dimaknai sebagai kemampuan untuk menentukan apa

¹⁶⁴ Ide tentang kebebasan banyak dikaitkan dengan sikap otonom atau kemampuan untuk menentukan diri sendiri. Uraian mengenai konsep kebebasan secara umum diambil dari Joel Feinberg, 1998, "Freedom and Liberty" dalam *Routledge Encyclopedia of Philosophy* (diedit oleh Edward Craig). hlm. 753-757.

yang dianggap baik tanpa paksaan, juga perlu dilihat apakah kemampuan untuk menentukan sendiri itu sudah ditopang oleh kesempatan untuk mencapai apa yang diinginkan. Adanya jaminan kebebasan untuk memilih apa yang dikehendaki tanpa ada paksaan eksternal juga harus didukung oleh adanya kesempatan untuk meraih kebebasan tersebut. Sen memahami pengertian kebebasan ini sebagai kesempatan real. Dalam pandangannya, dua pengertian kebebasan ini tidak terpisah melainkan laksana dua mata uang yang saling mengandaikan. Setiap orang harus bebas dalam menentukan apa yang dianggap baik dan pada saat yang sama setiap orang juga harus memiliki kesempatan untuk mencapai apa yang dianggap baik itu.

Konsekuensi dari pemahaman ini telah membawa Sen untuk mengaitkan ide kebebasan dengan masalah kemiskinan, kelaparan dan penyakit. Dalam memaknai kebebasan, seseorang tidak hanya perlu menolak segala bentuk pemaksaan yang datang dari luar, tetapi juga signifikansi pemberantasan kemiskinan, kelaparan dan penyakit. Musuh dari kebebasan bukan hanya pemerintahan otoriter tetapi juga masalah deprivasi kapabilitas. Dengan demikian, dalam merefleksikan konsep kebebasan, penolakan terhadap segala bentuk otoritarianisme dan pemaksaan kehendak memiliki resonansi yang sama dengan perjuangan untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi masalah kelaparan. Dua makna kebebasan ini tidak hanya didekati dengan penataan institusi politik *an sich*, tetapi juga signifikansi aktor atau *person* dalam melakukan perubahan. Dalam pandangan Sen, kebebasan memang tidak akan bisa diraih secara penuh dan sempurna sehingga karenanya apa yang dapat dilakukan adalah bagaimana agar kebebasan yang dimiliki dapat semakin meluas. Untuk memperluas kebebasan, baik dalam arti proses maupun kesempatan, kita tidak hanya mengandalkan peran institusi tetapi juga peran setiap orang yang memiliki daya efektif (*effective power*) untuk melakukan perubahan.

Sementara ide yang ketiga – yang juga berkaitan dengan dua ide pertama – adalah persoalan partikularitas nilai. Jika kita mengamati isu filsafat politik kontemporer, salah satu isu yang menjadi persoalan bersama yang hendak diatasi oleh para filsuf kontemporer adalah tentang perbedaan. Kesadaran kita tentang masyarakat pada saat ini selalu dikaitkan dengan pluralitas pandangan yang ada dalam sebuah komunitas politik. Bagaimana kita harus menempatkan pluralitas masyarakat yang begitu beragam agar tidak terjadi konflik yang dapat saling membunuh satu sama lain. Rawls adalah satu pemikir penting yang banyak merefleksikan masalah pluralitas masyarakat dan berupaya untuk mengatasi persoalan pluralitas ini secara adil melalui gagasan liberalisme politis (*political liberalism*). Pandangan Sen mengenai keadilan juga menempatkan persoalan pluralisme sebagai masalah yang penting. Namun yang membedakan Sen dengan Rawls adalah pendekatannya terhadap pluralisme yang menurut penulis cukup radikal. Sen tidak berpretensi untuk menutup nalar setiap pandangan dalam sebuah perbincangan publik, bahkan yang politis sekalipun. Sen memberikan tempat yang setara

kepada setiap perspektif yang partikular untuk berdiri di atas keyakinannya dan berhak untuk berargumentasi sesuai dengan keyakinannya.

Hak ini tentu bukan menjadi alasan bagi sebuah perspektif nilai tertentu untuk berhenti pada keyakinan yang dianut. Karena pada saat yang sama Sen juga menuntut setiap perspektif membuka diri terhadap pandangan-pandangan yang lain. Sebagaimana yang sudah disinggung, memberikan tempat yang setara bagi lokalitas dan partikularitas nilai tidak berhenti pada nilai yang partikular itu sendiri, tetapi juga menuntut setiap nilai untuk bersikap kosmopolitan, yakni mendengar pandangan-pandangan lain yang berbeda dan mempertimbangkannya. Dengan demikian di satu sisi Sen menjamin kesetaraan setiap pandangan namun di sisi yang lain ia juga menuntut setiap pandangan itu untuk mendengar pandangan lain yang berbeda. Melalui pemahaman ini, tindakan penalaran publik sebagaimana yang dipahami oleh Sen (lih. Bab 3) menjadi sangat penting dalam hubungannya dengan masalah partikularitas nilai dalam setiap masyarakat. Dua gerak pemahaman ini – hak atas rasionalitas tertentu dan tuntutan untuk mendengar rasionalitas yang lain – dapat dipahami sebagai sebuah terobosan yang cukup penting dalam memecahkan persoalan partikularitas nilai dalam filsafat politik kontemporer. Dengan terobosan ini, pemikiran Sen tentu saja bisa menjadi salah satu pertimbangan – di antara pemikiran-pemikiran besar yang ada saat ini – untuk memecahkan persoalan pluralisme yang ada dalam masyarakat kita. Paling tidak tiga gagasan inilah yang dapat memberikan sumbangan terhadap persoalan etika dan filsafat politik saat ini. Tentu saja selain tiga gagasan ini masih ada gagasan lain yang dapat diinspirasi dari pemikiran Amartya Sen.

6.1.3. Tesis

Berdasarkan ulasan yang sudah dilakukan di dalam bab 5 – dengan pendasaran pada bab-bab sebelumnya – penulis kembali mempertegas rumusan tesis yang diajukan dalam penulisan tesis mengenai ide keadilan Amartya Sen:

“Dari kritik Sen atas pendekatan institusionalisme transendental, ada dua hal yang sangat mendasar dalam ide keadilan Sen. Yang pertama tentang prinsip epistemik dan yang kedua tentang tuntutan etis keadilan Sen. Tentang yang pertama, untuk meraih keadilan, Sen sangat menekankan model perspektif terbuka – sebagaimana yang ada dalam penalaran publik – yang tidak melihat persoalan hanya dari sudut tertentu saja. Melalui penalaran publik, di satu sisi seseorang akan memperoleh pemahaman yang lebih kaya, di sisi yang lain model ini juga menjadi realisasi kebebasan setiap perspektif untuk menyuarakan kepentingannya. Sementara tentang yang kedua, ide keadilan Sen yang menjadikan kehidupan (manusia) secara luas sebagai tema sentral (*nyaya*) melihat kebebasan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan, ia menuntut agar tindakan yang diambil selalu didasarkan pada upaya memperluas kebebasan, kepelakuan dan kesejahteraan. Atas dasar pemahaman ini maka tuntutan etis keadilan Sen dipandu oleh sebuah

imperatif yang berbunyi ‘bertindaklah dengan nalar terbuka, yang sedemikian rupa sehingga dapat memperluas kebebasan kepelakuan dan kebebasan kesejahteraan!’.”

6.2.Relevansi Tesis

Tesis keadilan yang memberikan tempat pada pluralitas nalar dan tuntutan untuk memperluas kebebasan – baik dalam arti kepelakuan maupun kesejahteraan – memiliki relevansi yang sangat penting bagi dunia kita saat ini secara global, dan juga untuk kita sebagai sebuah bangsa yang sangat majemuk. Dalam konteks global, setiap orang atau komunitas dituntut memiliki kemampuan untuk mendengar suara-suara lain yang berbeda. Hingga saat ini, baik secara individual maupun kolektif, kita memiliki kecenderungan untuk berdiri hanya pada apa yang kita yakini tanpa pernah mau mendengar suara-suara yang lain. Kecenderungan ini bukan hanya bermasalah dari perspektif prosedur komunikasi yang setara tetapi juga mengancam hak dan kebebasan setiap pandangan untuk memiliki suara yang berbeda. Sementara relevansi bagi kita sebagai sebuah bangsa, kecenderungan sistem komunikasi yang menempatkan Jakarta sebagai pusat memiliki implikasi pada pengabaian suara-suara anak negeri yang begitu luas dan sangat majemuk. Hingga saat ini, meski sudah masuk pada era reformasi, kecenderungan untuk mengabaikan suara-suara partikular dari bangsa ini masih cukup kuat. Dengan tuntutan untuk memperluas perspektif dan menempatkan pluralitas rasionalitas setiap komunitas secara setara seharusnya kita juga mau mendengar kepentingan dan solusi yang ditawarkan oleh masyarakat dari berbagai pelosok negeri.¹⁶⁵

Sementara dalam kaitannya dengan tuntutan untuk memperluas kebebasan, apa yang kita raih pada era reformasi saat ini adalah capaian kebebasan bagi setiap orang dan komunitas untuk berpendapat dan berpolitik – dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Tentu saja ini sebuah capaian yang sangat penting. Namun capaian pada kebebasan untuk berpendapat, berpikir dan berpolitik juga harus diimbangi dengan tersedianya kesempatan untuk mencapai kebebasan itu. Pada saat ini kita masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, kelaparan, kurangnya akses pendidikan yang memadai, ketersediaan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh semua, yang karenanya akan memengaruhi eksistensi kebebasan untuk berpikir, berpolitik dan

¹⁶⁵ Di tengah gemerlap modernitas dan kemajuan yang diraih teknologi, masa depan kemanusiaan kita juga menuntut kemampuan untuk mendengar suara-suara yang berasal dari tradisi masyarakat lokal atau yang kerap disebut sebagai kearifal lokal (*local wisdom*).

berpendapat. Jika di masa Orde Baru, rakyat tidak bebas berpolitik karena pemerintahan yang otoriter maka saat ini rakyat juga dapat tidak bebas berpolitik karena kemiskinan dan kelaparan yang menjerat. Akibat dari kemiskinan dan tidak adanya akses menuju kesejahteraan seseorang bisa mengorbankan kesempatan untuk bebas berpendapat. Karenanya upaya untuk memperluas kebebasan baik dalam arti kesejahteraan maupun kepelakuan bisa menjadi proyek yang sangat penting bagi bangsa ini ke depan.

6.3.Kelebihan dan Kelemahan Tesis

Ide keadilan yang memberikan tempat kepada setiap perspektif untuk berdiri secara setara dan memiliki hak kebebasan yang sama untuk menyampaikan pandangannya tentu saja memiliki makna emansipasi yang sangat penting dalam kerangka masyarakat yang plural. Setiap orang selalu berdiri pada apa yang mereka pahami dan yakini, namun tidak berarti bahwa ia kemudian terjebak pada pandangannya sehingga mengunci diri dari perspektif lain yang berbeda. Karena pertimbangan ini Sen sangat menggarisbawahi pentingnya sikap membuka diri terhadap perspektif yang lebih luas agar pemahaman kita yang tidak pernah sempurna dapat lebih diperkaya dengan pandangan-pandangan yang lain. Tuntutan untuk memperluas dan membuka diri terhadap perspektif yang lebih luas merupakan salah satu keunggulan ide keadilan yang diajukan oleh Amartya Sen.

Selain tuntutan untuk memperluas perspektif, gagasan lain yang juga menjadi keunggulan Sen adalah konsepnya mengenai kebebasan. Sen tidak hanya memahami kebebasan sebagai tidak adanya paksaan (kebebasan dalam arti proses) tetapi juga kebebasan dalam arti kesempatan (kapabilitas). Dengan dua pengertian kebebasan ini, untuk sampai pada level kebebasan seseorang tidak hanya dituntut untuk memerangi sistem pemerintahan otoriter dan despotik yang kerap dianggap sebagai musuh utama kebebasan, tetapi juga menuntut untuk lepas dari kemiskinan, kelaparan dan penyakit. Dalam pandangan Sen, tuntutan untuk terbebas dari kemiskinan, kelaparan dan penyakit memiliki resonansi yang sama dengan tuntutan untuk meruntuhkan sistem pemerintahan yang otoriter dan despotik. Konsep kebebasan Sen, dalam pandangan penulis merupakan keunggulan lain dari ide keadilannya.

Di samping kelebihan yang ada dalam ide keadilan Sen, pada saat yang sama kita juga bisa menelisik kelemahan yang di ada dalamnya. Ide keadilan yang menuntut perluasan perspektif memang memiliki kontribusi besar bagi proyek emansipasi

pluralitas nalar, namun pada saat yang bersamaan kita dihadapkan pada proses aplikasi ide itu sendiri. Sebagai contoh, tuntutan untuk memperluas perspektif yang tidak hanya melibatkan mereka yang sudah terikat dalam kontrak kewarganegaraan tertentu dalam praktiknya menjadi sangat sulit. Perjuangan keadilan pada umumnya selalu terkait dengan lokus negara-bangsa sebagai kerangka praktis. Di dalam kehidupan real yang kita alami, pembelaan terhadap hak selalu dikaitkan dengan pemenuhan administratif sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak sosial tertentu. Barangkali persoalan aplikasi proyek keadilan Sen adalah persoalan tersendiri, namun sebuah pendekatan yang diajukan juga harus didasarkan pada kemungkinan untuk diaplikasikan. Paling tidak hingga saat ini, apa yang dibayangkan oleh Sen mengenai keadilan sebagian besar masih menjadi proyek normatif yang perlu diperjuangkan secara terus-menerus.

Jika gagasan Sen mengenai keadilan sebagian besar masih dianggap sebagai proyek normatif, maka ada beberapa pertanyaan yang diinspirasi dari tesis ini. Yang pertama bagaimana mengaplikasikan perluasan perspektif yang diidealkan oleh Sen? Tentu tidak mudah bagi kita yang masih terikat dalam kerangka berpikir institusional dan kerangka kontrak negara bangsa untuk memperluas perspektif nalar keadilan, meski kita juga kerap sadar bahwa ide keadilan seharusnya melampaui masalah-masalah administrasi dan organisasi. Sebagai contoh, seorang nenek yang datang ke sebuah rumah sakit untuk berobat pada akhirnya tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan gratis hanya karena tidak memiliki surat-surat yang diperlukan. Atas nama keadilan tentu saja kita melihat bahwa perlakuan itu dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak adil, namun persoalan administrasi tidak bisa dilihat sebagai kendala keadilan yang harus dilampaui begitu saja. Karena motivasi administrasi pada awalnya merupakan upaya menutup kemungkinan manipulasi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Hanya saja institusi yang terlampau kaku dalam menuntut administrasi dapat mengancam substansi keadilan yang hendak dicapai. Karena itu, apa yang ditawarkan oleh Sen harus selalu dilihat sebagai kerangka yang memandu signifikansi keadilan yang melampaui kekakuan administrasi-institusional.

Masalah kedua yang dapat diinspirasi dari tesis ini adalah soal kritik Sen terhadap konsep kepentingan diri (*self interest*) Adam Smith – sebagaimana yang dapat dilihat dalam 3.4.3. Dengan konsep komitmen, Sen menilai bahwa tidak semua tindakan yang rasional selalu diabdikan untuk kepentingan diri. Dalam kasus simpati atau antipati kita masih bisa melihat lokus kepentingan diri di dalamnya. Namun di dalam komitmen

kita tidak lagi melihat adanya kepentingan diri yang menyusup di dalamnya. Sen mencontohkan komitmen seseorang untuk membela bangsa dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak diabdikan untuk kepentingan diri. Dari sini kita dapat mengajukan sebuah pertanyaan, apakah di dalam tindakan yang didasari pada komitmen sudah betul-betul steril dari kepentingan diri? Jika kepentingan diri dipahami sebagai kepentingan material yang diraih oleh si pelaku dalam waktu dekat tentu saja sebuah komitmen bisa lolos dari kepentingan diri. Namun jika kita memaknai kepentingan diri termasuk pada hal-hal ideal, misalnya nama baik, martabat, atau bahkan pengharapan pada sesuatu yang berasal dari dunia lain (surga misalnya), maka bahkan tindakan komitmen sekalipun tetap tidak bisa lolos dari kepentingan diri.

Tentu saja, Sen sangat menyadari kemungkinan kritik semacam ini. Karena melalui konsep komitmen sebenarnya Sen tengah memutus relasi antara tindakan rasional dan pengabdian pada kepentingan diri (*self interest*). Ada pandangan kuat, khususnya di dalam ilmu ekonomi bahwa pilihan rasional adalah pilihan tindakan yang diabdikan untuk kepentingan diri. Secara definitif, sebagaimana yang sudah diuraikan dalam sub 3.4.3. kepentingan diri lebih dimaksudkan sebagai manfaat yang diterima langsung oleh si pelaku. Melalui konsep komitmen, Sen hendak menunjukkan adanya tindakan yang didasari pada pertimbangan rasional namun tidak diabdikan pada kepentingan diri secara langsung. Dengan demikian ada begitu banyak tindakan rasional yang tidak selalu diabdikan pada kepentingan diri sebagaimana tindakan rasional yang dipahami dalam ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama

Sen, Amartya 2009, *The Idea of Justice*, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge

Sumber Pendukung Utama

Rawls, John [1971], 1999, *A Theory of Justice* (edisi revisi), Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge

Rawls, John [1993], 1996, *Political Liberalism*, New York, Columbia University Press

Rawls, John 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge

Sen, Amartya [1987], 1988, *On Ethics and Economics*, Malden, Blackwell Publishing

Sen, Amartya 1992, *Inequality Reexamined*, Oxford, Oxford University Press

Sen, Amartya 1999, *Development as Freedom*, New York, Alfred A. Knopf, INC

Sen, Amartya 2002, *Rationality and Freedom*, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge

Sumber Pendukung Tambahan

Alkire, Sabina 2002, *Valuing Freedom: Sen's Capability Approach and Poverty Reduction*, Oxford, Oxford University Press

Bentham, Jeremy 2000, *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, Kitchener, Batoche Books

Comim, Flavio, dll. 2008, *The Capability Approach: Concepts, Measures and Applications*, Cambridge, Cambridge University Press

Crocker, David A. dan Ingrid Robeyns, "Capability and Agency" 2010 dlm: Morris, Christopher W. 2010, *Amartya Sen*, Cambridge, Cambridge University Press

Farrelly, Colin 2004a, *Introduction Contemporary Political Theory*, London, Sage Publication

Freeman, Samuel, 2007, *Rawls*, New York, Routledge

Habermas, Juergen 2008, *Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays*, diterjemahkan oleh Ciaran Cronin, Cambridge, Polity

Kleden, Paul Budi dan Adrianus Sunarko 2010, *Dialektika Sekularisasi: Diskusi Habermas-Ratzinger dan Tanggapan*, Penerbit Lamalera dan Penerbit Ledalero

- Magnis-Suseno, Franz 1987, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Jogjakarta, Penerbit Kanisius
- Magnis-Suseno, Franz 1997, *13 Tokoh Etika*, Jogjakarta, Penerbit Kanisius
- Magnis-Suseno, Franz 2000, *12 Tokoh Etika abad ke-20*, Jogjakarta, Penerbit Kanisius
- Melanie Walker dan Elaine Unterhalter 2007, *Amartya Sen's Capability Approach and Social Justice in Education*, New York, Palgrave Macmillan
- Mill, John Stuart 2003, *Utilitarianism and on Liberty* (Mary Warnock, ed.), Malden, Blackwell Publishing
- Morris, Christopher W. 2010, *Amartya Sen*, Cambridge, Cambridge University Press
- Mouffe, Chantal, 1993, *The Return of The Political*, London, Verso
- Mouffe, Chantal, 2000, *The Democratic Paradox*, London, Verso
- Mouffe, Chantal, 2005, *On The Political*, London, Routledge
- Nozick, Robert, "The Entitlement Theory of Justice" 2004b, dlm Farrelly, Colin 2004b, *Introduction to Contemporary Political Theory*, Sage Publication, London
- Nussbaum, Martha C. [2000], 2006, *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, Cambridge, Cambridge University Press
- Nussbaum, Martha, dan Amartya Sen (editor.) 1993, *The Quality of Life*, Oxford, Oxford University Press
- Pogge, Thomas, 2007, *John Rawls: His Life and Theory of Justice*, Oxford, Oxford University Press, diterjemahkan oleh Michelle Kosch
- Ricoeur, Paul 2007, *Reflection on the Just*, The University of Chicago Press
- Roberts, Kevin, "Social Choice Theory and the Informational Basis Approach" 2010, dlm: Morris, Christopher W. 2010, *Amartya Sen*, Cambridge University Press
- Sandel, Michael J., "The Procedural Republic and the Unencumbered Self" 2004b, dlm Farrelly, Colin 2004b, *Introduction to Contemporary Political Theory*, Sage Publication, London
- Smith, Adam [2002], 2004, *The Theory of Moral Sentiment*, Cambridge University Press, diedit oleh Knud Haakonssen

Sumber dari Jurnal

- Nagel, Thomas, "The Problem of Global Justice" (Spring, 2005) dlm *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 33, No. 2, pp. 113-147

- Nussbaum, Martha, "Capabilities and Social Justice" (Summer, 2002) dlm *International Studies Review*, Vol. 4, No. 2, International Relations and the New Inequality, pp. 123-135
- (The) Scandinavian Journal of Economics, "Bibliography of Amartya K. Sen's Publications", 1957-1998 (Jun., 1999) dlm *The Scandinavian Journal of Economics*, Vol. 101, No. 2, pp. 191-203
- Sen, Amartya "Open and Closed Impartiality" (Sep., 2002) dlm *The Journal of Philosophy*, Vol. 99, No. 9, pp. 445-469.
- Sen, Amartya "Social Choice Theory: A Re-Examination" (Jan., 1977) dlm *Econometrica*, Vol. 45, No. 1, pp. 53-88
- Sen, Amartya, "Rational Fools : A Critique of the behavioral Foundations of Economic Theory" (Summer, 1977) dlm *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 6, No. 4, pp. 317-344
- Sen, Amartya, "Incompleteness and Reasoned Choice" (May, 2004) dlm *Synthese*, Vol. 140, No. 1/2, Knowledge and Decision: Essays on Isaac Levi, pp. 43-59
- Sen, Amartya, "Justice: Means versus Freedoms" (Spring, 1990) dlm *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 19, No. 2, pp. 111-121
- Sen, Amartya, "Liberty and Social Choice" (Jan., 1983) dlm *The Journal of Philosophy*, Vol. 80, No. 1, pp. 5-28
- Sen, Amartya, "Liberty, Unanimity and Rights" (Aug., 1976) dlm *Economica*, New Series, Vol. 43, No. 171, pp. 217-245
- Sen, Amartya, "Rational Fools: A Critique of the behavioral Foundations of Economic Theory" (Summer, 1977) dlm *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 6, No. 4, pp. 317-344
- Sen, Amartya, "Rationality and Social Choice" (Mar., 1995) dlm *The American Economic Review*, Vol. 85, No. 1, pp. 1-24
- Sen, Amartya, "The Formulation of Rational Choice" (May, 1994) dlm *The American Economic Review*, Vol. 84, No. 2, Papers and Proceedings of the Hundred and Sixth Annual Meeting of the American Economic Association, pp.385-390
- Sen, Amartya, "The Impossibility of a Paretian Liberal: Reply" (Nov. - Dec., 1971) dlm *The Journal of Political Economy*, Vol. 79, No. 6, pp. 1406-1407
- Sen, Amartya, "Well-Being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984" (Apr., 1985) dlm *The Journal of Philosophy*, Vol. 82, No. 4, pp. 169-221

Sumber dari Kamus

- Feinberg, Joel 1998, "Freedom and Liberty" dalam *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, vol.3., (diedit oleh Edward Craig), Routledge.

MacDonell, Arthur Anthony 1954, 1958, *A Practical Sanskrit Dictionary*, Oxford University Press

Sumber dari Website

http://wn.com/Conversations_with_History_Amartya_Sen

MLA style: "Amartya Sen - Autobiography". Nobelprize.org. 29 Apr 2011
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998/sen-autobio.html